



KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM

# LAPORAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal  
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan  
Umum dan Perumahan

**2024**



**RENI AHANTINI**

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja disusun sesuai amanat: i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; ii) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; iii) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; iv) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan v) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan ini memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan serta menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai mengenai pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan. Laporan Kinerja dapat berperan sebagai alat penilaian kinerja dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain itu laporan kinerja merupakan salah satu alat kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun agar setiap pemangku kepentingan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak karena keberhasilan yang diraih atas berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh pegawai.

Sebagai salah satu pertanggungjawaban kinerja, kami berharap Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan menjadi sarana untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Jakarta, 16 Januari 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur  
Pekerjaan Umum dan Perumahan



Reni Ahiantini

NIP. 196910181996032002

## EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama 1 tahun atas target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan Rencana Strategis. Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dinilai dari 7 indikator kinerja kegiatan (IKK). Pada tahun 2024, terdapat perubahan pada metode perhitungan berdasarkan revisi Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Selama tahun 2024, terjadi 3 kali revisi perjanjian kinerja dan 13 kali Revisi DIPA dimana perubahan anggaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terjadi sebanyak 6 kali. Adapun capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel Capaian Kinerja berdasarkan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Renstra 2024 (%)	Target PK 2024 (Baseline) (%)	Realisasi 2024 (%)
<b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>				
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR				
<b>SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	<b>99,37</b>	<b>94,58</b>	<b>99,37</b>	<b>99,96</b>
<b>Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,59</b>
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	16,13	15,00	15,00	14,96
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	15,00	15,00	15,00	15,00
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	10,00	15,00	15,00	15,34
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	15,00	15,00	15,00	15,43
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	18,75	15,00	15,00	14,50
IKK. Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang Modern, Terpadu dan Berorientasi Publik	10,00	15,00	15,00	15,24
IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi	-	10,00	10,00	10,13

Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2024 sebesar 99,96. Capaian dan realisasi kinerja tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan target tahun 2024 maupun realisasi di tahun 2023. Mendukung pencapaian kinerja tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan didukung oleh sumber daya yang terdiri dari anggaran dan manusia. Realisasi anggaran Sekretariat

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2024 sebesar 95,52% atau senilai Rp81.996.774.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp84.164.426.000,00. Terdapat pula anggaran sebesar Rp97.615.000,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang di blokir untuk optimalisasi anggaran Perjalanan Dinas sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 perihal Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA. 2024 tanggal 7 November 2024. Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tanpa blokir sebesar Rp85.747.091.000,00 sehingga persentase realisasi adalah 95,63%. Adapun realisasi

**Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2024**

(Status iemonitoring PUPR tanggal 6 Januari 2025)

Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu	Realisasi	Keuangan		Fisik		
			(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL	RN	RL	Kinerja
<b>Program Dukungan Manajemen</b>									
<b>Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>			<b>85.844.706</b>	<b>81.996.774</b>	<b>100</b>	<b>95,75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Layanan Dukungan Manajemen Internal	7	Layanan/Laporan /Dokumen	78.741.705	75.051.498	100	95,58	100	100	100
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6	Unit/m2/Paket	3.166.799	3.123.245	100	98,62	100	100	100
Layanan Manajemen SDM Internal	422	Orang/Layanan	1.669.699	1.666.301	100	99,80	100	100	100
Layanan Manajemen Kinerja Internal	10	Layanan/Laporan /Dokumen	2.266.503	2.155.730	100	95,11	100	100	100

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan didukung oleh 126 pegawai yang terdiri dari :

1. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan sebanyak 1 orang;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan sebanyak 1 orang;
3. Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan sebanyak 40 orang;
4. Bagian Kepegawaian dan Umum sebanyak 59 orang; dan
5. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik sebanyak 25 orang.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama tahun 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menghadapi beberapa isu dan kendala. Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja dan realisasi adalah :

1. Koordinasi dan kerjasama dari seluruh pegawai dari tingkat tertinggi hingga terendah dan meningkatkan kesadaran pencapaian kinerja;
2. Meningkatkan peran monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran sebagai alat monitor dalam kontrol kualitas kinerja unit organisasi;
3. Memperbaiki kualitas perencanaan untuk meminimalisir kemungkinan pelaksanaan revisi anggaran dan kegiatan;
4. Meningkatkan peran koordinasi secara internal dengan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan maupun dengan unit organisasi di luar lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

---

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
EXECUTIVE SUMMARY .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	1
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia .....	2
1. Struktur Organisasi .....	2
2. Sumber Daya Manusia.....	4
D. Sarana dan Prasarana.....	6
E. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	9
F. Isu Strategis.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis.....	13
B. Perjanjian Kinerja .....	15
C. Metode Pengukuran .....	23
D. Target Kinerja .....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	33
A. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja .....	33
B. Capaian Kinerja.....	35
C. Analisis Perbandingan Kinerja.....	51
D. Analisis Realisasi Anggaran .....	57
E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	60
F. Analisis Sumber Daya dan Anggaran.....	61
G. Analisis Pemanfaatan Laporan Kinerja.....	62
H. Penghargaan Atas Kinerja .....	64
BAB IV PENUTUP .....	66
A. Simpulan Umum.....	66
B. Faktor Pendukung Keberhasilan .....	67
C. Permasalahan.....	68
D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut .....	69
LAMPIRAN	

---

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi PNS dan PPPK Berdasarkan Jabatan Fungsional tertentu .....	5
Tabel 1.2	Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dari Tahun 2020-2024 .....	6
Tabel 1.3	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana .....	7
Tabel 2.1	Target Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal.....	16
Tabel 2.2	Target Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Akhir .....	17
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024 Berdasarkan Rencana Strategis.....	23
Tabel 2.4	Metode Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2024 .....	24
Tabel 2.5	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2024 menurut Perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2020-2024.....	27
Tabel 2.6	Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2024 menurut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk.....	31
Tabel 3.1	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi AKIP.....	34
Tabel 3.2	Capaian Kinerja berdasarkan Target Rencana Strategis dan Target Perjanjian Kinerja .....	36
Tabel 3.3	Capaian Kinerja berdasarkan Target DIPA .....	38
Tabel 3.4	Realisasi Kerangka Regulasi Sesuai Rencana Strategis .....	40
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya .....	51
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis.....	52
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Output Tahun 2024 berdasarkan Target Rencana Strategis .....	53
Tabel 3.8	Capaian Output Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja.....	55
Tabel 3.9	Capaian Output Tahun 2024 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) .....	56
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024 dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2023.....	57
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	59
Tabel 3.12	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024.....	60
Tabel 4.1	Capaian Kinerja berdasarkan Target Rencana Strategis dan Target Perjanjian Kinerja .....	66
Tabel 4.2	Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	67

---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Denderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024.....	3
Gambar 1.2	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	4
Gambar 1.3	Rekapitulasi PNS dan PPPK Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin .....	4
Gambar 1.4	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin .....	5
Gambar 1.5	Dokumentasi Sarana dan Prasarana.....	8
Gambar 1.6	Kronologis Revisi DIPA dan Anggaran.....	9
Gambar 1.7	Total Pagu dan Pagu Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan).....	10
Gambar 2.1	Struktur Program Direktorat Denderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2022 .....	14
Gambar 2.2	Struktur Program Direktorat Denderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023-2024 .....	14
Gambar 2.3	Kronologi Revisi Perjanjian Kinerja .....	18
Gambar 2.4	Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Direktorat Denderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024 .....	19
Gambar 2.5	Perjanjian Kinerja Revisi Ke-1 Sekretariat Direktorat Denderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024 .....	20
Gambar 2.6	Perjanjian Kinerja Revisi Ke-2 Sekretariat Direktorat Denderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023 .....	21
Gambar 2.7	Perjanjian Kinerja Revisi Ke-3 Sekretariat Direktorat Denderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023 .....	22
Gambar 3.1	Tren Nilai AKIP .....	33
Gambar 3.2	Nilai Setiap Komponen dari Tahun 2019-2023 .....	33
Gambar 3.3	Nilai Setiap Komponen terhadap Nilai Maksimal Penilaian AKIP .....	34
Gambar 3.4	Kurva S Realisasi Keuangan Tahun 2024.....	58
Gambar 3.5	Kurva S Realisasi Fisik Tahun 2024.....	58
Gambar 3.6	Perbandingan Dukungan Sumber Daya Manusia dengan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024 .....	62
Gambar 3.7	Dokumentasi Pembahasan Hasil Evaluasi Kepuasan Pelayanan Setditjen PI	61
Gambar 3.8	Dokumentasi Pembahasan Capaian Kinerja Bulanan .....	63
Gambar 3.9	Dokumentasi Pembahasan Konsep Rencana Aksi .....	63
Gambar 3.10	Sertifikat SNI ISO 37001:2016.....	64
Gambar 3.11	Komitmen Kebijakan Anti Penyuapan dan Pakta Integritas .....	64
Gambar 3.12	Sertifikat Penghargaan BMN.....	65
Gambar 3.13	Sertifikat SNI ISO 37001:2016.....	65

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengamanatkan bahwa kementerian/ Lembaga bertanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja melalui pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan capaian pada Laporan Kinerja. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan perlu melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja sebagai amanat dalam perundang-undangan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melaksanakan tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target kinerja Tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan serta tugas dan fungsi sesuai tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap jumlah anggaran yang dimanfaatkan. Selain itu, Laporan Kinerja ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dan penyampaian gambaran permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi masukan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan maupun Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

### B. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki tugas berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 528 berupa:

*“Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal”*

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melakukan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pembiayaan infrastruktur PU dan perumahan;
- b. pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur PU dan perumahan;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat

- jenderal;
- e. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;
  - f. pengelolaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan jabatan fungsional.
  - h. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga direktorat jenderal;
  - i. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
  - j. pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan
  - k. pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

## **C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia**

### **1. Struktur Organisasi**

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan dibantu oleh tiga Kepala Bagian yang saling mendukung dalam melaksanakan amanat tugas dan fungsi organisasi. Adapun struktur organisasi beserta tugas dan fungsi pada setiap bagian sebagai berikut:

#### **Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan;**

Tugas : melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran; penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi; pelaksanaan pemantauan, evaluasi; dan pelaporan keuangan, pelaksanaan anggaran, dan kinerja program pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal; pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan barang milik negara; serta pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah direktorat jenderal.

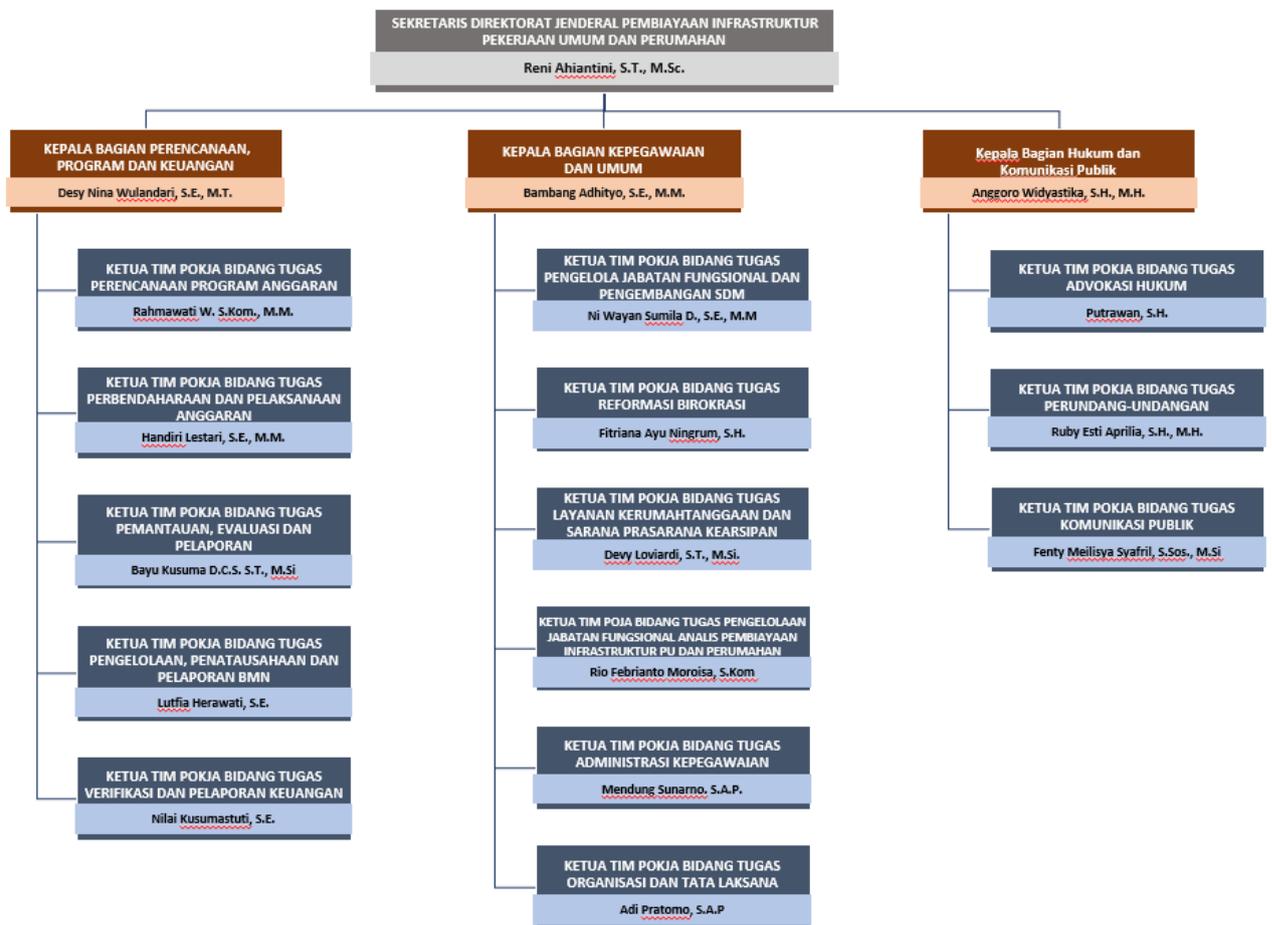
#### **Bagian Kepegawaian dan Umum;**

Tugas : melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengelolaan data kepegawaian, fasilitasi perencanaan kebutuhan, formasi, dan pengembangan pegawai; fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai; penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi; pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan jabatan fungsional; pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan kearsipan; penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana direktorat jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga direktorat jenderal.

#### **Bagian Hukum dan Komunikasi Publik**

Tugas : melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang- undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum; pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama Pembiayaan; pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Susunan organisasi pada setiap bagian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Denderal Pembiayaan Infrastruktur**  
**Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024**



## 2. Sumber Daya Manusia

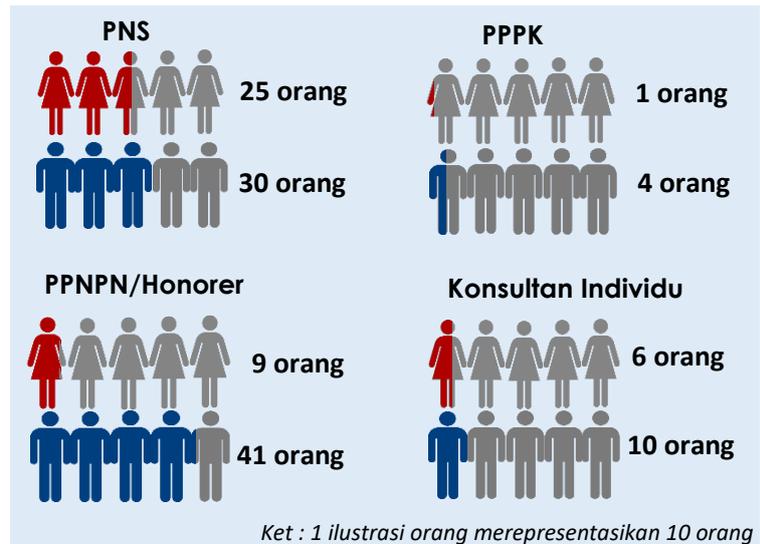
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki sumber daya manusia total sebanyak 126 orang termasuk didalamnya Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Adapun pegawai yang terdapat di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ditampilkan pada Gambar 1.2. Rincian pegawai (Lampiran 1) pada setiap bagian sebagai berikut:

1. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan sebanyak 1 orang;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan sebanyak 1 orang;
3. Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan sebanyak 40 orang;
4. Bagian Kepegawaian dan Umum sebanyak 59 orang; dan
5. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik sebanyak 25 orang.

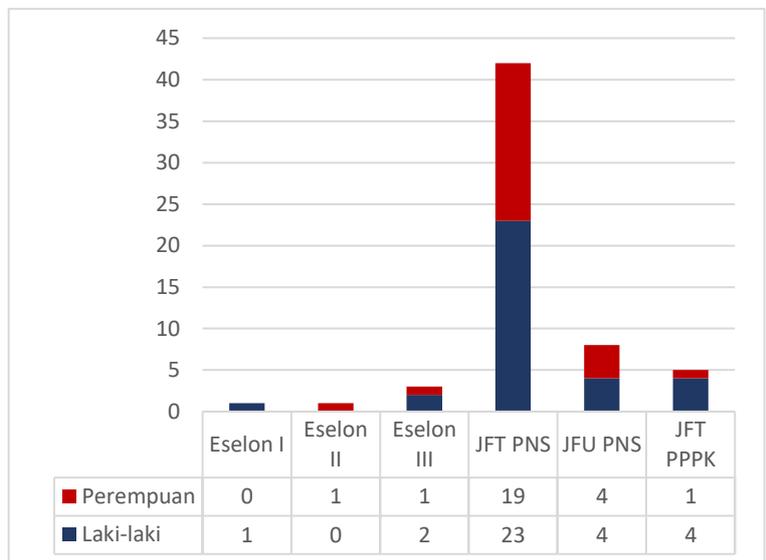
Berdasarkan gambar 1.2, total pegawai PNS sebanyak 55 orang, PPPK sebanyak 5 orang, PPNPN (honorar) sebanyak 50 orang dan Konsultan Individu sebanyak 16 orang. Jumlah pegawai untuk mendukung tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2024 idealnya didukung oleh 172 ASN. Dengan jumlah ASN yang ada saat ini, masih terdapat kebutuhan ASN sebanyak 112 pegawai yang belum dapat dipenuhi sehingga gap antara kebutuhan dan kondisi pegawai saat ini, dipenuhi melalui pengadaan Konsultan Individu. Pemenuhan kebutuhan pegawai ASN mengalami peningkatan jumlah di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 dengan bertambahnya jumlah PPPK di tahun 2024 menjadi 5 orang, yang sebelumnya hanya 1 orang.

Pegawai PNS dan PPPK di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari Eselon I, II, III, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan jenis kelamin ditampilkan pada Gambar 1.3. Berdasarkan pada gambar 3.3, 5 orang PPPK sudah berstatus Jabatan Fungsional Tertentu.

Pegawai PNS dan PPPK di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berdasarkan Permen PANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dengan rincian pada Tabel 1.1 berikut.



**Gambar 1.2**  
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



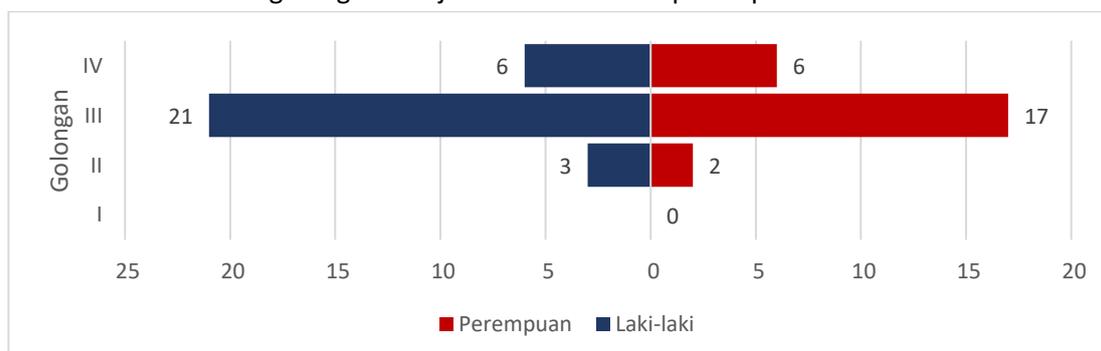
**Gambar 1.3**  
Rekapitulasi PNS dan PPPK  
Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi PNS dan PPPK Berdasarkan Jabatan Fungsional tertentu**

No	Jabatan Fungsional Tertentu	Madya	Muda	Pertama	Penyelia	Mahir	Terampil	Jumlah
1	Analisis Anggaran	-	2	-	-	-	-	2
2	Analisis Hukum	-	2	1	-	-	-	3
3	Analisis Kebijakan	1	-	4	-	-	-	5
4	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	8	3	-	-	-	12
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	-	3	-	-	-	-	3
6	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	-	4	1	-	-	-	5
7	Arsiparis	-	3	-	-	-	-	3
8	Penata Kelola Jalan dan Jembatan	1	-	-	-	-	-	1
9	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	1	-	-	-	-	-	1
10	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	-	1	-	-	-	-	1
11	Perencana	-	-	1	-	-	-	1
12	Pranata Hubungan Masyarakat	-	3	2	-	-	1	6
13	Pranata Komputer	-	-	4	-	-	-	4
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>47</b>

Berdasarkan tabel 1.1, jabatan fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan yang paling besar jumlahnya dengan jumlah 12 orang di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan belum terdapat jabatan fungsional tertentu tingkat penyelia dan mahir. Pada tahun 2024, terdapat 1 pegawai yang sedang melakukan karyasiswa (sekolah) yaitu Fikri Nuru Jaman, S.E., Jabatan fungsional Analisis Kebijakan Ahli Pertama. Selain karyasiswa, terdapat 1 pegawai yang sedang ditugaskan di BP Tapera yaitu Siska Purnianti, S.H., M.Hum selama 5 tahun sejak 1 April 2022.

Selain berdasarkan jabatan, PNS di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan juga dikelompokkan berdasarkan golongan. Adapun jumlah PNS berdasarkan golongan dan jenis kelamin ditampilkan pada Gambar 1.4 berikut.



**Gambar 1.4**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin**

Gambar 1.4 menggambarkan mayoritas pegawai PNS di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan golongan III sebanyak 38 orang, kemudian terdapat 12 orang golongan IV dan 5 orang golongan II. Tidak terdapat pegawai PNS dengan golongan I.

Kualitas sebuah organisasi dapat dipengaruhi dari kualitas pegawainya. Kesempatan untuk pengembangan kompetensi pegawai terus dilaksanakan baik dari internal maupun eksternal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pengembangan kompetensi ini dapat berupa peningkatan kapasitas organisasi secara keseluruhan maupun per individu. Pada tahun 2023, terdapat 2 pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang mendapat kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan dengan karyasiswa. Selain karyasiswa, sebanyak 3 orang pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan ke luar negeri. Sehingga terdapat 28 pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan teknis, manajerial dan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR maupun selain Kementerian PUPR. Adapun pegawai yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan ditampilkan pada Tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dari Tahun 2020-2024**

Jenis Pelatihan / Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Pelatihan Kepemimpinan	0	0	0	2	0	<b>2</b>
Pelatihan Bidang PUPR	2	4	4	5	4	<b>19</b>
Pelatihan Manajemen	12	4	17	9	0	<b>42</b>
Pelatihan Jabatan Fungsional	0	0	3	6	0	<b>9</b>
Karyasiswa	0	0	0	3	1	<b>4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>76</b>

Pengembangan pegawai tidak hanya diberikan pada PNS dan PPPK saja, namun juga diberikan kepada pegawai PPNPN/honorar dan TPI (Tenaga Pendukung Individu). Pengembangan yang diberikan kepada seluruh pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

#### **D. Sarana dan Prasarana**

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibutuhkan sarana dan prasarana sebagai alat pendukung untuk mencapai output dan outcome organisasi. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menempati ruangan kerja yang terletak di Gedung A Lantai 2 Wing 1, Wing 2 dan Wing 3 serta Gedung B Lantai 1, Lantai 2, dan Lantai 4. Sesuai dengan penetapan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka ruangan pada Gedung A Lantai 2 wing 2 dan sebagian dari Gedung A Lantai 2 wing 3 digunakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai ruang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Gedung A Lantai 2 wing 2) dan ruang Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Gedung A Lantai 2 wing 3).

Adapun rekap sarana dan prasarana di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ditampilkan pada Tabel 1.3 berikut.

**Tabel 1.3**  
**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana**

No	Nama BMN	Total	No	Nama BMN	Total
1	PC	74	35	Kursi Besi Metal	31
2	Acces Poin	1	36	Kursi Fiber Glas	214
3	Auto Switch/Data Switch	1	37	Kursi Kayu	4
4	Lap Top	7	38	LCD Projector	7
5	Monitor	1	39	Lemari Besi Metal	18
6	Note Book	42	40	Lemari Display	2
7	Printer	54	41	Lemari es	3
8	Rack Server	1	42	Lemari Kayu	8
9	Router	1	43	Lensa Kamera	3
10	Scanner	9	44	Locker	4
11	Switch	1	45	Meja Kerja Kayu	95
12	Tablet PC	7	46	Meja Komputer	1
13	Wireless Acces Poin	3	47	Meja Makan Kayu	5
14	Alat Angkutan Darat Bermotor (KDO)	1	48	Meja Rapat	11
15	AC Sentral	21	49	Meja Resepsionis	2
16	AC Split	36	50	Mesin Jilid	2
17	Acces Control system	2	51	Mic Conference	1
18	Air Cleaner	3	52	Nakas	17
19	Alat Penghancur Kertas	6	53	Oven Listrik	2
20	Camera Conference	4	54	Peralatan Fitnes	5
21	Camera Digital	7	55	Pintu Elektrik yg Memakai Akses	25
22	Camera Video	2	56	Portable Air Pendingin	2
23	CCTV	5	57	Rak Besi	20
24	Dispenser	4	58	Rak Kayu	3
25	Drone	4	59	Sofa	2
26	Exhause Fan	2	60	Televisi	8
27	Filing Cabinet Besi	15	61	Tripod Camera	1
28	Finger Printer and attendance	1	62	Unit Power Suplay	1
29	Focusing Screen Layar	4	63	Voice Recoder	1
30	Handy Cam	1	64	White Board	1
31	Handy Talky	16	65	White Board Elektronik	1
32	Kaca Hias	1	66	Pompa Air	1
33	Kipas Angin	2	67	Telephone Mobile	2
34	Kitchen set	1	68	digital multimedia	1
			69	Ultra Mobile P.C.	1

Berdasarkan tabel 1.3, total sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebanyak 845 unit. Untuk detail dari sarana dan prasarana terlampir pada Lampiran 3 Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024. Adapun beberapa dokumentasi sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai berikut.



**Ruang Arsip  
Lantai 2 Wing 3 (Kiri) & Gedung Arsip (Kanan)**



**Ruang Kerja  
Lantai 2 Wing 3 (Kiri) & Lantai 2 Wing 1 (Kanan)**



**Ruang Musholla (Kiri) & Pelayanan Publik DJPI  
(Kanan)**



**Ruang Rapat  
RR Dirjen (Kiri), RR 1 (Tengah) dan RR2 (Kanan)**



**Ruang Kerja Dirjen  
Lantai 2 Wing 2**



**Pantry Lantai 2 Gedung A1 (Kiri) & Toilet Lantai  
2 Gedung A1 (Kanan)**



**Ruang Menyusui (Kiri) & Pojok Informasi DJPI (Kanan)**



**Selasar Lantai 2**

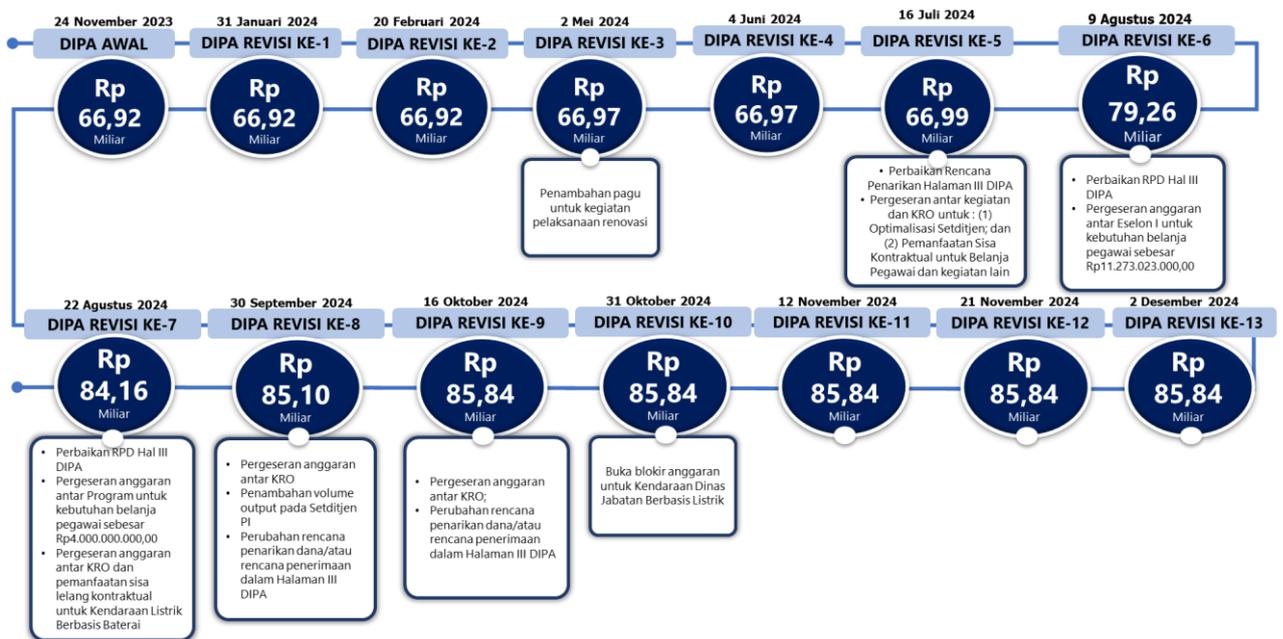


**Ruang Kerja Satuan Kerja  
Gedung A2 Lantai 2**

**Gambar 1.5  
Dokumentasi Sarana dan Prasarana**

## E. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah melakukan 13 kali Revisi DIPA sepanjang tahun 2024. Untuk pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah mengalami perubahan pagu sebanyak 6 kali. Adapun pagu awal Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp66.920.590.000,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pagu terakhir Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp85.844.706.000,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam ribu rupiah). Adapun kronologis Revisi DIPA di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ditampilkan dalam Gambar 1.6 berikut.



**Gambar 1.6**  
**Kronologis Revisi DIPA dan Anggaran**

Mengacu pada gambar 1.6, perubahan pagu pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terjadi sebanyak 6 kali dikarenakan :

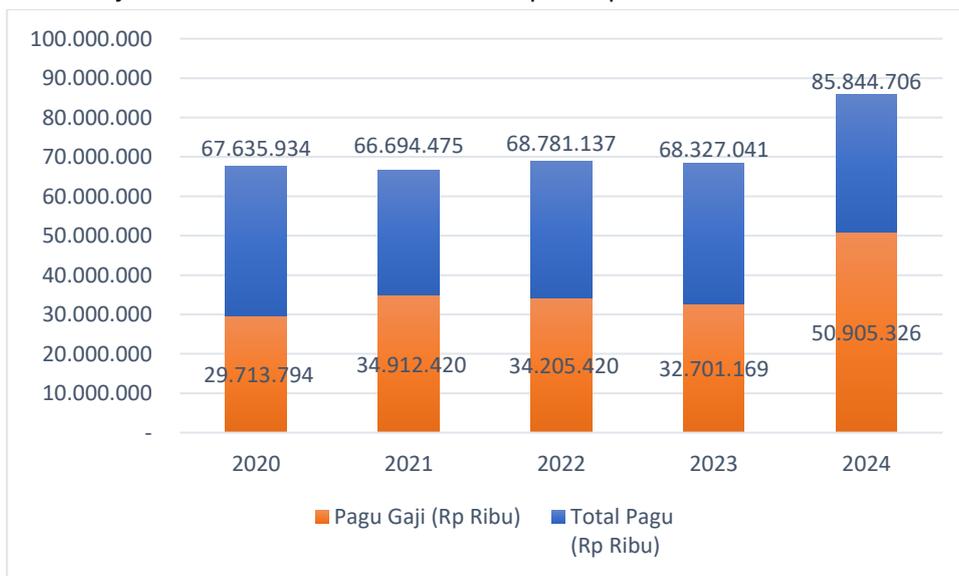
- Perubahan pagu pertama pada DIPA Revisi ke-3**, terbit pada tanggal 2 Mei 2024. Revisi dilakukan untuk penambahan pagu pada kegiatan pelaksanaan renovasi. Akibat adanya penambahan anggaran tersebut, pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengalami perubahan menjadi Rp66.970.590.000,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Perubahan pagu kedua pada DIPA Revisi ke-5**, terbit pada tanggal 16 Juli 2024. Revisi dilakukan untuk memperbaiki rencana penarikan Halaman III DIPA dan pergeseran anggaran antar kegiatan dan KRO untuk mengakomodir optimalisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan pemanfaatan sisa pagu kontraktual untuk belanja pegawai ataupun kegiatan lainnya. Perubahan ini menyebabkan bertambahnya pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menjadi Rp67.991.513.000,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- Perubahan pagu ketiga pada DIPA Revisi ke-6**, terbit pada tanggal 9 Agustus 2024. Pada revisi ini mengakomodir perbaikan Rencana Penarikan Halaman III DIPA dan pergeseran anggaran dari unit

organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp11.273.023.000,00 (Sebelas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juga dua puluh tiga ribu rupiah). Pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menjadi Rp79.264.536.000,00 (Tujuh puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

4. **Perubahan pagu keempat pada DIPA Revisi ke-7**, terbit pada tanggal 22 Agustus 2024. Pada revisi ini mengakomodir perbaikan Rencana Penarikan Halaman III DIPA, pergeseran anggaran antar program untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) dan pergeseran antar KRO dan pemanfaatan sisa lelang kontraktual untuk penambahan anggaran belanja modal pada pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Listrik Berbasis Baterai. Pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pasca DIPA Revisi ke-7 adalah Rp84.164.426.000,00 (Delapan puluh empat milyar seratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. **Perubahan pagu kelima pada DIPA Revisi ke-8**, terbit pada tanggal 30 September 2024. Revisi diperuntukkan pergeseran anggaran antar KRO, penambahan volume output pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan perubahan rencana penarikan halaman III DIPA. Pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pasca DIPA Revisi ke-8 adalah Rp85.104.426.000,00 (Delapan puluh lima milyar seratus empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. **Perubahan pagu keenam pada DIPA Revisi ke-9**, terbit pada tanggal 16 Oktober 2024. Revisi dilakukan untuk pergeseran anggaran antar KRO dan perbaikan rencana penarikan halaman III DIPA. Pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pasca DIPA Revisi ke-9 adalah Rp85.844.706.000,00 (Delapan puluh lima milyar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Rincian dari perubahan DIPA pada Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat dilihat pada Lampiran 6.

Tren pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 fluktuatif namun mengalami peningkatan total pagu yang cukup tinggi di tahun 2024. Adapun pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ditampilkan pada Gambar 1.7 berikut.



**Gambar 1.7**  
Total Pagu dan Pagu Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)

Berdasarkan gambar 3.7, rata-rata 50% dari total pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diperuntukkan untuk Belanja Pegawai (pembayaran gaji dan tunjangan pegawai ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sedangkan sisanya untuk belanja operasional, dukungan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang (belanja modal). Pada tahun 2024 terjadi peningkatan pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang juga dipengaruhi oleh penambahan pagu belanja pegawai hingga 45% dari total pagu belanja pegawai di tahun 2023. Penambahan pagu belanja pegawai untuk mengakomodir gaji PPPK serta kenaikan Tunjangan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## **F. Isu Strategis**

Dalam pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2024, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi kendala capaian dalam kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di tahun 2024. Adapun beberapa isu strategis yang terjadi selama tahun 2024 sebagai berikut:

1. Reorganisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat yang menyebabkan beberapa hal berikut:
  - Beberapa pelaksanaan kegiatan yang tertunda dan penyesuaian kembali;
  - Adanya penyesuaian terhadap Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kegiatan;
  - Penyesuaian pada produk hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang menunggu Peraturan Presiden dan SOTK terbaru; dan
  - Penyesuaian RKA-KL Tahun 2025 akibat dari restrukturisasi Kementerian/Lembaga;
2. Pelaksanaan Revisi DIPA yang melebihi toleransi maksimal pelaksanaan Revisi DIPA pada setiap triwulan (1 kali setiap Triwulan) menyebabkan beberapa pelaksanaan kegiatan tertunda dan nilai IKPA pada indikator Revisi DIPA mengalami penurunan;
3. Penyesuaian materi dan narasumber pada pelaksanaan kegiatan podcast menyebabkan keterlambatan pelaksanaan rekaman dan penayangan podcast pada kanal youtube Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
4. Kendala pada beberapa dashboard yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan akibat dari penyerangan Pusat Data Nasional yang menyebabkan :
  - Dashboard layanan penanganan pengaduan masyarakat DJPI tidak dapat beroperasi sementara waktu;
  - Sistem pertata naskah dinas yang tidak dapat diakses;
  - Terlambatnya penilaian SKP Triwulan II dan penyusunan SKP Triwulan III;
  - Updating pelaksanaan anggaran mengalami keterlambatan karena Sinkronisasi data antara Sakti dan iemonitoring tidak dapat dilakukan secara otomatis; dan
  - Beberapa dashboard lain juga tidak dapat diakses sementara waktu;
5. Proses pengembalian Barang Milik Negara (BMN) dari BP Tapera kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang perlu untuk didokumentasikan dan dilakukan pencatatan agar tertib administrasi. Dalam pelaksanaan terdapat keterlambatan yang menyebabkan laporan pengembalian melewati Triwulan III;
6. Belum terdapat standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sehingga belum dapat dilakukan uji kompetensi untuk kenaikan pangkat;

7. Pelaksanaan belanja modal yang dilaksanakan pada akhir Triwulan III dan Triwulan IV yang berpotensi untuk tidak dapat dilakukan pencatatan dan Penetapan Status Pengguna di tahun 2024;
8. Penetapan Zona Integritas dan SMAP di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
9. Pelaksanaan kegiatan yang memperhatikan manajemen risiko; dan
10. Penyelesaian dan tindak lanjut terhadap temuan eks BLU PPDPP sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal berupa penyelesaian dilakukan oleh BP Tapera.

## **G. Sistematika Laporan**

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), isu strategis dan sistematika penulisan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini menjelaskan secara singkat terkait Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, target kinerja tahun yang dilaporkan dalam Rencana Strategis.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab III, dijelaskan terkait capaian kinerja tahun anggaran 2024, perbandingan kinerja (yang terdiri dari perbandingan realisasi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah, dan perbandingan realisasi capaian kinerja dengan standar nasional (benchmarking)), realisasi anggaran, analisis pemanfaatan laporan kinerja, dan penghargaan atas kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini dijelaskan terkait simpulan umum, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan, rekomendasi dan tindak lanjut.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan lima tujuan dan lima sasaran strategis Kementerian dalam 2020-2024. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR (SS-3) yaitu Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau dan (SS-5) yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya. Pada 20 Februari 2024, terbit Perubahan atas Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024. Kemudian Surat Edaran Nomor 05/SE/Dp/2024 tentang Perubahan atas Surat Edaran Edaran Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 09/Se/Dp/2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 – 2024 terbit pada 14 Juni 2024. Perubahan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan disusun mengikuti perubahan pada Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang terbit pada 30 Juli 2024. Dengan adanya perubahan ini, maka perubahan perhitungan capaian kinerja output pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan disampaikan sebagai berikut.

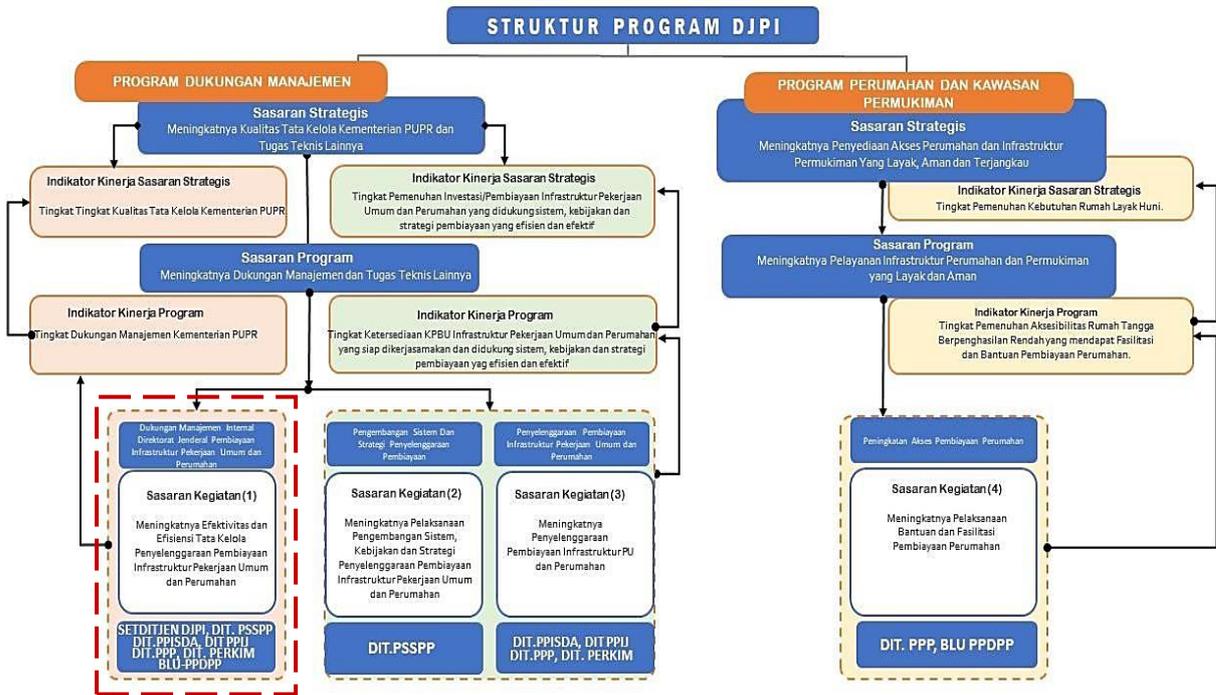
#### 1. Tujuan

Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendukung tujuan Kementerian PUPR khususnya pada Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM aparatur yang berkinerja tinggi.

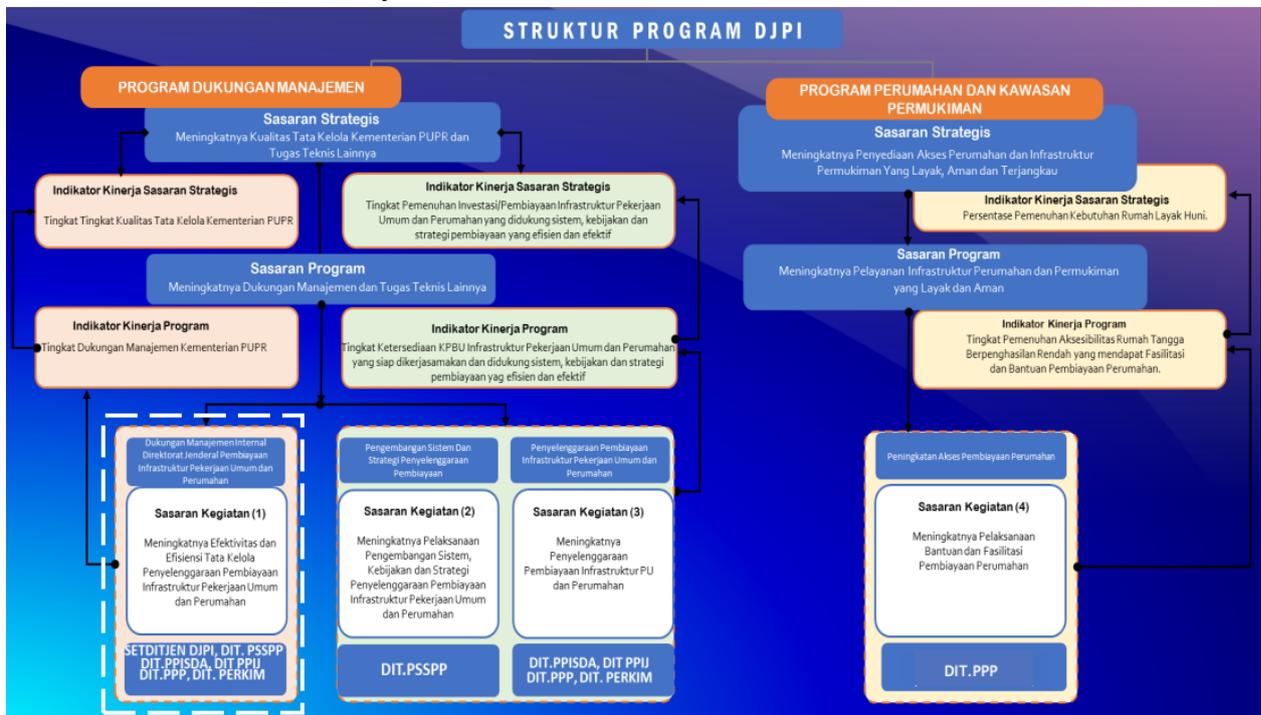
#### 2. Sasaran Strategis dan Sasaran Program

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendukung Sasaran Strategis (SS-5) Kementerian PUPR dengan indikator kinerja **“Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR”**. Sasaran Program Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berdasarkan Sasaran Strategis tersebut adalah **“Program Dukungan Manajemen”** dengan indikator kinerja Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR. Adanya perubahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memberikan pengaruh pada struktur program Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Perubahan ditandai dengan pasca likuidasi BLU PPDPP. Adapun struktur program DJPI dijelaskan pada gambar 2.1 dan gambar 2.2.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Program Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur**  
**Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2022**



**Gambar 2.2**  
**Struktur Program Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur**  
**Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023-2024**



### **3. Arah Kebijakan dan Strategi**

Arah kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berupa meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dengan cara :

- i. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan , penatausahaan barangmilik negara, dan pengelolaanketatausahaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- ii. Meningkatkan layanan pembentukan produk hukum;
- iii. Meningkatkan layanan pengelolaan kelembagaan dan jabatan fungsional serta pengadministrasian pegawai pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- iv. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran;
- v. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran;
- vi. Meningkatkan layanan komunikasi publik; serta
- vii. Meningkatkan nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

### **4. Program dan Kegiatan**

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendukung program Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang memiliki indikator kinerja program berupa "Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR (mendukung Indikator Sasaran Program Kesekretariatan Kementerian PUPR). Sebagai salah satu unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan berkontribusi dalam pencapaian sasaran program pada unit organisasi melalui Sasaran Kegiatan (SK) "Meningkatjanya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan".

### **B. Perjanjian Kinerja**

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang terbit pada 5 Januari 2024 dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Berdasarkan pada Surat Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan Nomor 26/ND/Ps.1/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Notulensi Rapat Pembahasan Keselarasan Renstra Setditjen PI 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2020 yang menetapkan penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dikarenakan adanya ketidaksinkronan pada Indikator Kinerja Kegiatan yang tercantum pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Perjanjian Kinerja awal Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pada Perjanjian Kinerja Awal, jumlah Indikator Kinerja Kegiatan berjumlah 6 dengan total bobot berupa 100%. Pada IKK.

**Tabel 2.1**  
**Target Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal**

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		Target 2024
1		2
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan		20%
EBA.956	Layanan Barang Milik Negara	1 Layanan
EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan
EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan
EBA.951	Layanan Sarana Internal	2 Unit
EBA.971	Layanan Prasarana Internal	2 Unit
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum		15%
EBA.957	Layanan Hukum	1 Layanan
EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai		20%
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	260 Orang
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran		15%
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	3 Dokumen
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran		15%
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4 Dokumen
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik		15%
EBD.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan

Pada Revisi Perjanjian Kinerja pertama, penyusunan sudah kembali mengacu pada Revisi Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024 yang terbit pada 30 Juli 2024. Target kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk Tahun 2024 mengalami perubahan (revisi) sebanyak dua (2) kali. Adapun target capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024 ditampilkan pada Tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**  
**Target Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur**  
**Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Akhir**

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		Target 2024
1		2
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan		15%
EBA.956	Layanan Barang Milik Negara	1 Layanan
EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan
EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan
EBA.951	Layanan Sarana Internal	2 Unit
EBA.971	Layanan Prasarana Internal	2 Unit
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum		15%
EBA.957	Layanan Hukum	1 Layanan
EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai		15%
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	260 Orang
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran		15%
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	3 Dokumen
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran		15%
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4 Dokumen
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik		15%
EBD.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan
IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi		10%

Selama Tahun Anggaran 2024, telah terjadi perubahan Perjanjian Kinerja sebanyak dua (2) kali dengan kronologi sebagai berikut:

- 1. Perjanjian Kinerja Awal**, terbit pada 5 Januari 2024 yang disusun berdasarkan DIPA Awal yang terbit pada tanggal 24 November 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp66.920.590.000,00 (Enam puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). Adapun Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Gambar 2.4;
- 2. Revisi ke-1**, terbit pada 31 Juli 2024 yang disusun berdasarkan perubahan pagu anggaran sesuai dengan DIPA Revisi ke-5 dan perubahan indikator kinerja kegiatan sesuai Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang terbit pada 30 Juli 2024. Berdasarkan perubahan Rencana Strategis, jumlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berubah dari 6 IKK menjadi 7 IKK dengan penambahan berupa IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi. Selain itu, perubahan juga berpengaruh pada metode perhitungan capaian

kinerja. Pagu anggaran pada Perjanjian Kinerja Revisi ke-1 ini sebesar Rp67.991.513.000,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah). Revisi ke-1 pada Perjanjian Kinerja ini juga dipengaruhi oleh perubahan pimpinan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dari Bapak Herry Trisaputra Zuna menjadi Bapak Triono Junoasmono. Adapun Perjanjian Kinerja Revisi ke-1 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Gambar 2.5;

3. **Revisi ke-2**, terbit pada 1 Oktober 2024 yang disusun berdasarkan perubahan pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai dengan DIPA Revisi ke-8. Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah Rp85.104.426.000,00 (Delapan puluh lima milyar seratus empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah). Perubahan Perjanjian Kinerja pada Revisi ke-2 dilakukan karena adanya perubahan pimpinan pada Jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Adapun Perjanjian Kinerja Revisi ke-2 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Gambar 2.6;
4. **Revisi ke-3**, terbit pada 31 Desember 2024 yang disusun berdasarkan perubahan pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai dengan DIPA Revisi ke-13. Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah Rp85.844.706.000,00 (Delapan puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam ribu rupiah). Adapun Perjanjian Kinerja Revisi ke-3 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Gambar 2.7.

Adapun kronologi perubahan perjanjian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama Tahun 2024 sebagai berikut :



**Gambar 2.3**  
Kronologi Revisi Perjanjian Kinerja

**Gambar 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sudiro Roi Santoso**  
 Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**  
 Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

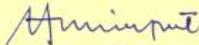
**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

  
**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

  
**SUDIRO ROI SANTOSO**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

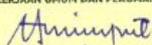
SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
<b>SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>	
<b>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>	
<b>SK. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	
<b>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	<b>20%</b>
EBA.956 Layanan Barang Milik Negara	1 Layanan
EBA.962 Layanan Umum	1 Layanan
EBA.994 Layanan Perantara	1 Layanan
EBB.951 Layanan Sarana Internal	2 Unit
EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2 Unit
<b>IKK. Tingkat Layanan Pumbentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	
EBA.957 Layanan Hukum	1 Layanan
EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan
<b>IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan
EBB.954 Layanan Manajemen SDM	260 Orang
<b>IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	
EBO.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen
EBO.955 Layanan Manajemen Keuangan	3 Dokumen
<b>IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	
EBO.952 Layanan Perencanaan dan Penjanggaran	4 Dokumen
<b>IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik</b>	
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan

**KEGIATAN**  
 Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

**ANGGARAN**  
 Rp66.920.590.000,00

JAKARTA, 5 JANUARI 2024

DIREKTUR JENDERAL  
 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

  
**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

  
**SUDIRO ROI SANTOSO**

**Gambar 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Revisi ke-1 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024**

<b>REVISI</b>

<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024</b> <b>SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</b>
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:</p> <p>Nama : <b>Sudiro Roi Santoso</b>          Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan          Selanjutnya disebut <b>PIHAK PERTAMA</b></p> <p>Nama : <b>Triono Junoasmono</b>          Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan          Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b></p> <p><b>PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA</b> sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</li> <li>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</li> </ol> <p align="right">Jakarta, 31 Juli 2024</p> <p align="right">Pihak Pertama</p> <p align="right">  <b>SUDIRO ROI SANTOSO</b></p> <p>Pihak Kedua</p> <p align="left">  <b>TRIONO JUNOASMONO</b></p>

<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024</b> <b>SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</b>		<b>REVISI</b>
SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	
<b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>		
<b>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>		
<b>SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>		
<b>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Keorsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan</b>	<b>15%</b>	
EBA.956 Layanan Barang Milik Negara	1	Layanan
EBA.962 Layanan Umum	1	Layanan
EBA.994 Layanan Perencanaan	1	Layanan
EBB.951 Layanan Sarana Internal	2	Unit
EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2	Unit
<b>IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum</b>	<b>15%</b>	
EBA.957 Layanan Hukum	1	Layanan
EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan
<b>IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai</b>	<b>15%</b>	
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	260	Orang
<b>IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran</b>	<b>15%</b>	
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	Dokumen
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3	Dokumen
<b>IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran</b>	<b>15%</b>	
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4	Dokumen
<b>IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik</b>	<b>15%</b>	
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	1	Layanan
<b>IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi</b>	<b>10%</b>	

**KEGIATAN**  
 Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

**ANGGARAN**  
 Rp67.991.513.000,00

JAKARTA, 31 JULI 2024

DIREKTUR JENDERAL  
 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

  
**TRIONO JUNOASMONO**

  
**SUDIRO ROI SANTOSO**

**Gambar 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Revisi ke-2 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024**

<b>REVISI</b>

<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024</b> <b>SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</b>
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:</p> <p>Nama : <b>Reni Ahiantini</b>          Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan          Selanjutnya disebut <b>PIHAK PERTAMA</b></p> <p>Nama : <b>Triono Junoasmono</b>          Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan          Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b></p> <p><b>PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA</b> sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</li> <li>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</li> </ol> <p align="right">Jakarta, 1 Oktober 2024</p> <p align="center"> <span style="display: inline-block; width: 45%;">Pihak Kedua</span> <span style="display: inline-block; width: 45%;">Pihak Pertama</span> </p> <p align="center">   </p> <p align="center"> <b>TRIONO JUNOASMONO</b> <span style="margin-left: 150px;"><b>RENI AHIANINI</b></span> </p>

<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024</b> <b>SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</b>		<b>REVISI</b>
SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	
<b>SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>		
<b>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>		
<b>SK. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>		
<b>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan</b>	<b>15%</b>	
EBA.956 Layanan Barang Milik Negara	1	Layanan
EBA.962 Layanan Umum	1	Layanan
EBA.994 Layanan Perkantoran	1	Layanan
EBB.951 Layanan Sarana Internal	3	Unit
EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2	Unit
<b>IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum</b>	<b>15%</b>	
EBA.957 Layanan Hukum	1	Layanan
EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan
<b>IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai</b>	<b>15%</b>	
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	422	Orang
<b>IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran</b>	<b>15%</b>	
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	Dokumen
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3	Dokumen
<b>IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran</b>	<b>15%</b>	
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4	Dokumen
<b>IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik</b>	<b>15%</b>	
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan
<b>IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi</b>	<b>10%</b>	

<b>KEGIATAN</b> Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	<b>ANGGARAN</b> Rp85.104.426.000,00
DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  <b>TRIONO JUNOASMONO</b>	JAKARTA, 1 OKTOBER 2024 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  <b>RENI AHIANINI</b>

**Gambar 2.7**  
**Perjanjian Kinerja Revisi ke-3 Sekretariat Direktorat Denderal Pembiayaan Infrastruktur**  
**Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024**

### C. Metode Pengukuran

Pengukuran merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Metode pengukuran berdasarkan pada indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024. Terdapat tujuh (7) Indikator Kinerja Kegiatan dimana sebelumnya hanya terdapat enam (6) Indikator Kinerja Kegiatan dalam menilai capaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata Kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan” yaitu:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024 Berdasarkan Rencana Strategis**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Tahun 2020 - 2024</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan sesuai Revisi Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Tahun 2020 - 2024</b>
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;	IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan;
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;	IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum;
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;	IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai;
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;	IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;	IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran;
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik;	IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik;
-	IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi

Metode pengukuran pada setiap IKK mengalami perubahan/perbedaan dari Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024 yang terbit pada September 2020 dengan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024 yang terbit pada 30 Juli 2024. Adapun perbedaan pada metode pengukuran ditampilkan pada Tabel 2.4 berikut.

**Tabel 2.4**  
**Metode Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur**  
**Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2024**

Indikator Kinerja Kegiatan	Renstra DJPI TA. 2020-2024	Revisi Renstra DJPI TA. 2020-2024
<p>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip yang disusun dibandingkan dengan target (10%)</li> <li>• Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan yang disusun dibandingkan dengan target (10%)</li> <li>• Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%)</li> <li>• Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%)</li> <li>• Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%)</li> <li>• Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%)</li> <li>• Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (10%)</li> <li>• Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (10%)</li> </ul>	<p>Penjumlahan dari indikator kontributor:</p> <p>a. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = <math>\frac{\text{Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas}}{\text{Jumlah Seluruh Unit Kerja}}</math></li> <li>• Persentase Pembinaan Kearsipan = <math>\frac{\text{Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan}}{\text{Jumlah Seluruh Unit Kerja}}</math></li> </ul> <p>b. Tingkat Efektifitas Pengelolaan BMN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan</li> <li>- <math>\text{PSP} = \frac{\text{Jumlah BMN yang sudah di PSP}}{\text{total jumlah asset yang harus di PSP}}</math></li> <li>- <math>\text{Alih Status} = \frac{\text{Jumlah BMN yang sudah dialih status}}{\text{total jumlah asset yang harus dialih status}}</math></li> <li>• Pemindahtanganan</li> <li>- <math>\text{Hibah} = \frac{\text{Jumlah BMN yang diproses}}{\text{total jumlah usulan}}</math></li> <li>- <math>\text{Penjualan} = \frac{\text{Jumlah BMN yang disetujui atau ditolak untuk dijual}}{\text{(dibagi) total jumlah usulan yang telah diproses ke pengelola barang dan atau mendapat persetujuan penjualan pengguna barang}}</math></li> <li>- <math>\text{Tukar menukar} = \frac{\text{Jumlah BMN yang dilakukan tukar menukar}}{\text{(dibagi) total jumlah usulan yang telah diproses ke Menteri / Sekjen selaku pengguna barang}}</math></li> <li>• Penghapusan</li> <li>- <math>\text{Jumlah BMN yang dilakukan penghapusan} / \text{(dibagi) total jumlah usulan yang telah diproses ke pengelola barang dan/atau mendapat persetujuan penghapusan di pengguna barang}</math></li> </ul> <p>c. Tingkat Efektivitas Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penertiban BMN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penatausahaan BMN = Persentase tindak lanjut penyelesaian Data Anomali BMN</li> </ul>

Indikator Kinerja Kegiatan	Renstra DJPI TA. 2020-2024	Revisi Renstra DJPI TA. 2020-2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan BMN = nJumlah izin prinsip pemanfaatan BMN (KSP/KPBU/KSPI/BSGBGS/Sewa/Pinjam Pakai) yang telah disetujui dibagi dengan yang telah disampaikan ke pengelola barang dan/atau mendapat persetujuan dari pengguna barang</li> <li>• Penertiban BMN = Persentase penanganan pengamanan dan penertiban BMN yang direncanakan</li> </ul>
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum yang disusun dibandingkan dengan target (30%)</li> <li>• Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama yang disusun dibandingkan dengan target (20%)</li> <li>• Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang disusun dibandingkan dengan target (50%)</li> </ul>	Penjumlahan dari indikator kontributor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Efektifitas Penyelesaian Produk Hukum Jumlah usulan produk hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100%</li> <li>• Tingkat Efektivitas Advokasu Hukum Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%</li> <li>• Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian Jumlah usulan perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah perjanjian dikali 100%</li> <li>• Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum Jumlah usulan pertimbangan hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah pertimbangan hukum dikali 100%</li> </ul>
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (25%)</li> <li>• Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (25%)</li> <li>• Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%)</li> </ul>	Penjumlahan dari indikator kontributor: Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu  <b>Masukan dari Bagian Kepegawaian Umum terkait metode perhitungan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Jumlah layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu/ total permintaan atau nominasi layanan administrasi pegawai</li> <li>• Persentase Fasilitasi Kelembagaan dan/atau Ketatalaksanaan Jumlah fasilitasi kelembagaan dan/atau ketatalaksanaan/ total permintaan fasilitasi kelembagaan dan/atau ketatalaksanaan</li> <li>• Tingkat layanan pembinaan dan pengembangan pegawai yang tepat sasaran               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah pegawai yang diproses pengajuan mengikuti pendidikan dan pelatihan/ total permintaan mengikuti pendidikan dan pelatihan DJPI</li> <li>- Jumlah evaluasi kinerja pegawai ASN/ jumlah pegawai ASN</li> </ul> </li> </ul>

Indikator Kinerja Kegiatan	Renstra DJPI TA. 2020-2024	Revisi Renstra DJPI TA. 2020-2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kualitas pengelolaan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan               <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penerbitan rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional/ permintaan rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional</li> <li>Jumlah pelaksanaan seleksi pengangkatan dalam jabatan fungsional/ jumlah rencana pelaksanaan seleksi</li> </ul> </li> </ul>
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi yang ditetapkan dibandingkan dengan target (50%)</li> <li>Jumlah Laporan Kinerja yang disusun dibandingkan dengan target (50%)</li> </ul>	Penjumlahan dari indikator kontributor: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Nilai IKPA berdasarkan aplikasi MONEV – PA Unit Organisasi</li> <li>Persentase tindak lanjut rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK – RI</li> <li>Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP               <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah laporan penyelenggaraan SPIP Unor yang tepat waktu (50%),</li> <li>Jumlah laporan penyelenggaraan SPIP yang lengkap (50%)</li> </ul> </li> </ul>
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun dibandingkan dengan target (50%)</li> <li>Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan yang disusun dibandingkan dengan target (50%)</li> </ul>	Penjumlahan dari indikator kontributor: <p>Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanbaan RKA-K/L Mengacu pada PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga</p>
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat yang disusun dibandingkan dengan target (50%)</li> <li>Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi yang disusun dibandingkan dengan target (50%)</li> </ul>	Penjumlahan dari indikator kontributor: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Kesuksesan Penyelenggaraan Publikasi Tingkat kehadiran peserta, stakeholder feedback dan/atau persepsi/sentiment positif</li> <li>Tingkat Kepuasan Pemohon Informasi Publik Persepsi/sentiment positif stakeholder dan/atau stakeholder feedback</li> </ul>
IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi	-	Dihitung dari perbandingan antara realisasi nilai SAKIP dengan target nilai SAKIP tahun berjalan

## D. Target Kinerja

### 1. Target Kinerja Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis

Sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024, target kinerja kegiatan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 100% dengan tujuh (7) indikator kinerja kegiatan. Selain target kinerja, output kegiatan pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata Kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan” ditampilkan pada Tabel 2.2. Total anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal yang terbit pada tanggal 24 November 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp66.920.590.000,00 (Enam puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). Adapun rincian pendanaan pada setiap kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2024 menurut Perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024 RENSTRA		TARGET TOTAL RENSTRA*	ANGGARAN 2024 (Juta Rupiah)	
			AWAL	REVISI		AWAL	REVISI
<b>UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</b>							
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							
INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya							
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan							
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		%	100	100	100		80.266
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :							
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	15	15	15		
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	15	15	15		
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	10	15	15		
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	10	15	15		
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	15	15	15		

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024 RENSTRA		TARGET TOTAL RENSTRA*	ANGGARAN 2024 (Juta Rupiah)	
			AWAL	REVISI		AWAL	REVISI
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	%	10	15	15		
7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Memenuhi Kebutuhan Tugas Teknis PPDP	%		0	0		
8	Tingkat Pemenuhan Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas Teknis PPDP	%		0	0		
9	Nilai SAKIP Unit Organisasi	%		10	10		
<b>KOORDINATOR : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Perkerjaan Umum dan Perumahan</b>							
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Perkerjaan Umum dan Perumahan							80.266
OUTPUT KEGIATAN :							
1	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	Layanan	1	1	5	358	358
	1 Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	1	5	358	358
2	Manajemen Transformasi Organisasi	Layanan	2	1	10	1.433	1.433
	1 Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi	Laporan	2	1	10	1.433	1.433
3	Pengelolaan Pegawai	Orang	260	260	260	1.792	1.792
	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai	Laporan	3	2	13	1.792	1.792
4	Tata Kelola TNDE dan Arsip	Layanan	1	1	5	597	597
	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip	Laporan	1	1	5	597	597
5	Kerumahtanggaan	Layanan	2	2	11	1.194	1.194
	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan	Laporan	2	2	11	1.194	1.194
6	Advokasi Hukum	Layanan	2	1	8	956	956
	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum	Laporan	2	1	8	956	956
7	MOU dengan APH dan Instansi Lain Terkait	Layanan	1	1	5	478	478
	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama	Laporan	1	1	5	478	478
8	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Layanan	3	2	13	1.792	1.792
	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	3	3	13	1.792	1.792

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024 RENSTRA		TARGET TOTAL RENSTRA*	ANGGARAN 2024 (Juta Rupiah)	
			AWAL	REVISI		AWAL	REVISI
9	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	Layanan	1	1	5	1.063	1.063
	1 Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Laporan	1	1	5	1.063	1.063
10	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I	Layanan	2	3	13	1.630	1.630
	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan	Laporan	2	3	13	1.630	1.630
11	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI	Layanan	1	1	5	666	666
	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN	Laporan	1	1	5	666	666
12	Strategi Komunikasi	Layanan	2	1	8	1.553	1.553
	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat	Laporan	2	1	8	1.553	1.553
13	Publikasi	Layanan	2	4	13	1.194	1.194
	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi	Laporan	2	4	13	1.194	1.194
14	Laporan Keuangan Unit Eselon I	Laporan	1	3	8	1.075	1.075
	1 Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	1	3	8	1.075	1.075
15	Laporan Kinerja Unit Eselon II	Laporan	1	1	5	358	358
	1 Jumlah Laporan Kinerja	Laporan	1	1	5	358	358
16	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	Laporan	1	2	8	1.194	1.194
	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	1	2	8	1.194	1.194
17	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	Unit	1	1	5	597	597
	1 Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran	Unit	1	1	5	597	597
18	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	Unit	1	1	5	597	597
	1 Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	Unit	1	1	5	597	597
19	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	Unit	1	2	6	490	490
	1 Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	Unit	1	2	6	490	490
20	Gaji dan Tunjangan DJPI	Layanan	1	1	5	31.403	31.403
	1 Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	5	31.403	31.403

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024 RENSTRA		TARGET TOTAL RENSTRA*	ANGGARAN 2024 (Juta Rupiah)	
			AWAL	REVISI		AWAL	REVISI
21	Operasionalisasi Kantor DJPI	Layanan	1	1	5	24.846	24.846
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	5	24.846	24.846

*\*Total target berdasarkan pada perubahan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024*

Berdasarkan tabel 2.4 diatas, terdapat perubahan jumlah output pada beberapa kegiatan. Perubahan cenderung berupa penambahan jumlah output. Sedangkan untuk anggaran tidak terdapat perbedaan baik pada Rencana Strategis awal maupun perubahan Rencana Strategis.

## 2. Target Kinerja Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja

Target kinerja berdasarkan perjanjian kinerja sesuai dengan PK revisi ke-2 yang terbit pada 1 Oktober 2024 ditampilkan pada Gambar 2.6. Target output berdasarkan Tabel 2.2 pada setiap IKK sebagai berikut :

- a) IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan dengan target 15% terdiri dari :
  - 1 layanan Barang Milik Negara;
  - 1 layanan umum;
  - 1 layanan perkantoran;
  - 3 unit layanan sarana internal; dan
  - 2 unit layanan prasarana internal.
- b) IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum dengan target 15% terdiri dari 1 layanan hukum dan 1 layanan bantuan hukum;
- c) IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai dengan target 15% terdiri dari 1 Layanan organisasi dan tata kelola internal dan 260 orang terlayani manajemen SDM;
- d) IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan target 15% terdiri dari 3 dokumen pemantauan dan evaluasi dan 3 dokumen manajemen keuangan;
- e) IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran dengan target 15% terdiri dari 4 dokumen perencanaan dan penganggaran;
- f) IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik dengan target 15% terdiri dari 1 layanan hubungan masyarakat; dan
- g) IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi dengan target 10%.

## 3. Target Kinerja Tahun 2024 berdasarkan DIPA

Target kinerja berdasarkan DIPA Awal pada 24 November 2023 dan pada DIPA Revisi ke – 13 pada 2 Desember 2024 tidak terdapat perbedaan, perbedaan terdapat pada total pagu anggaran dimana pagu terakhir Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp85.844.706.000,00. Adapun target pada indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2024 menurut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk**

Kode	Program / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Volume / Satuan
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	
SP01	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKP09	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	84,12%
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	
	IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	20%
	IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
	IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	20%
	IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
	IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%
	IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%

Adapun jumlah target output berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO) pada DIPA Revisi ke-10 adalah sebagai berikut :

KRO 1	: 4194.EBA	Layanan Dukungan manajemen Internal	7	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
RO	: EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan
	EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan
	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan
	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan
	EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan
	EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan
	EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan
KRO 2	: 4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6	Unit, m2, Paket
RO	: EBB.951	Layanan Sarana Internal	4	Unit

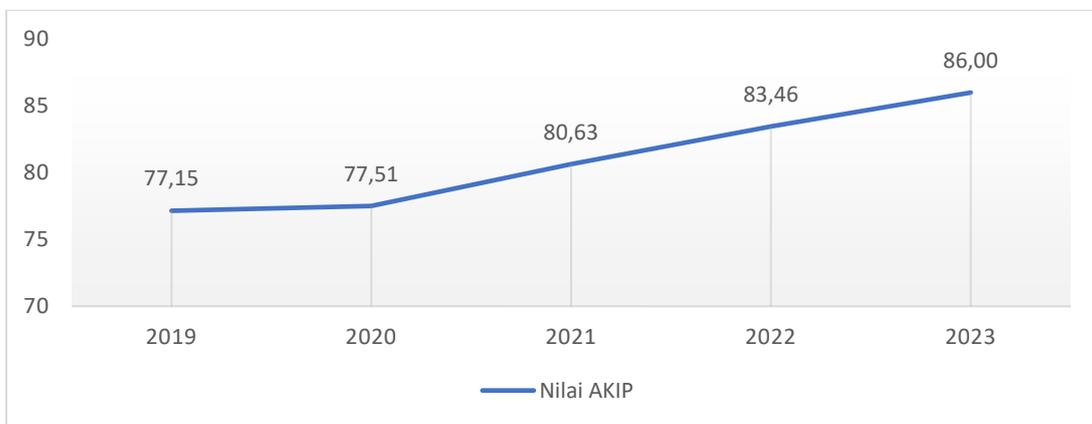
	EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2	Unit
KRO 3	: 4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	422	Orang, Layanan, Rekomendasi
RO	: EBC.954	Layanan Manajemen SDM	422	Orang
KRO 4	: 4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
RO	: EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4	Dokumen
	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	Dokumen
	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	3	Dokumen

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

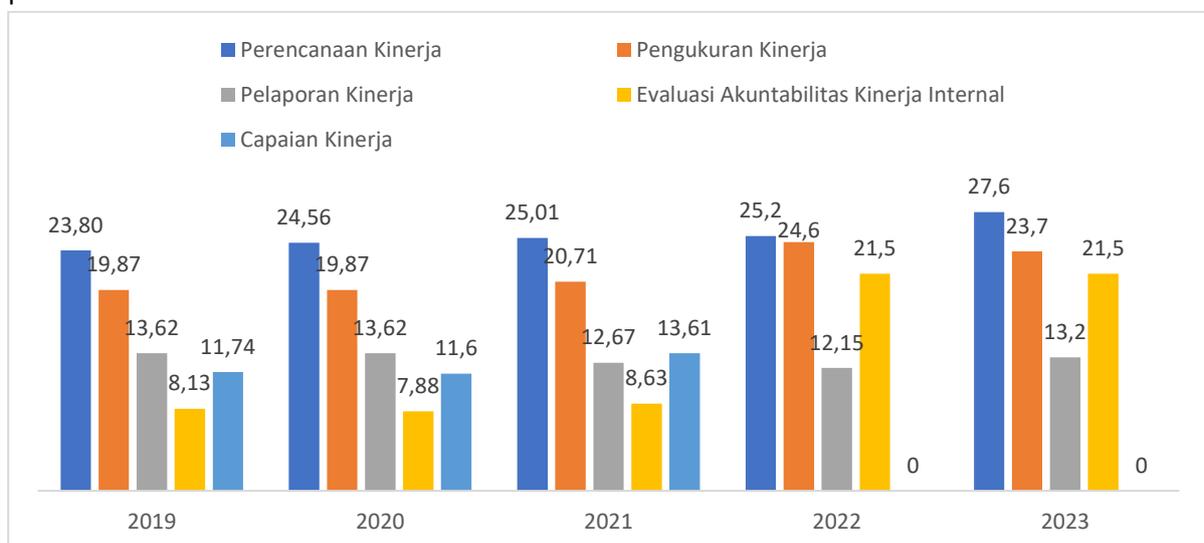
### A. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi AKIP menggunakan pedoman Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dilaksanakan oleh evaluator dari Direktorat PPIJ (Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan) melalui surat Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan No. PR0304-pj/28 tanggal 31 Mei 2024 (surat terlampir pada Lampiran 4), menyatakan bahwa nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2023 adalah 86,00 dengan predikat A (Memuaskan). Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 83,46 dengan predikat A (Memuaskan). Adapun perkembangan nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama 5 tahun terakhir ditampilkan pada Gambar 3.1 berikut.



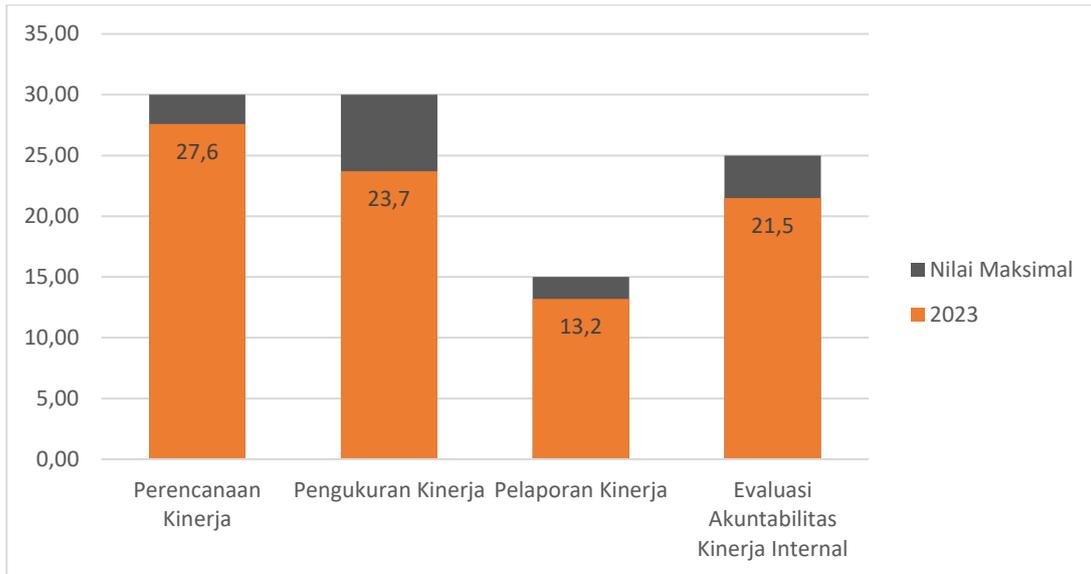
**Gambar 3.1**  
Tren Nilai AKIP

Berdasarkan gambar 3.1, nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Predikat Memuaskan didapat sejak tahun 2021. Adapun nilai pada setiap komponen ditampilkan pada Gambar 3.2 berikut.



**Gambar 3.2**  
Nilai Setiap Komponen dari Tahun 2019-2023

Terdapat perubahan komponen perhitungan pada penilaian AKIP pada tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana hanya terdapat 4 komponen (sebelumnya 5 komponen) yaitu komponen Capaian Kinerja tidak menjadi salah satu komponen dalam penilaian AKIP. Terdapat penurunan nilai pada komponen Pengukuran Kinerja di tahun 2023 dibandingkan nilai pada komponen yang sama di tahun 2022. Penurunan dikarenakan masih belum konsistennya keterlibatan pimpinan dalam pengukuran kinerja berkala, keterlambatan penyampaian laporan monitoring dan evaluasi bulanan pada aplikasi e-SAKIP dan kinerja organisasi belum menjadi dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*. Adapun nilai pada setiap komponen penilaian AKIP terhadap nilai maksimal di tahun 2023 ditampilkan pada Gambar 3.3 berikut.



**Gambar 3.3**  
**Nilai Setiap Komponen terhadap Nilai Maksimal Penilaian AKIP**

Nilai pada komponen Pengukuran Kinerja merupakan yang paling rendah jika dibandingkan terhadap nilai maksimal. Masih diperlukan perbaikan pada pengukuran kinerja berkala secara efektif dan berjenjang. Tindak lanjut atas seluruh rekomendasi evaluator pada indikator Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dapat dilakukan seluruhnya pada tahun 2023 dan menjadi salah satu penyebab nilai pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tidak dapat maksimal. Walaupun telah mendapat kategori memuaskan, masih terdapat beberapa rekomendasi yang perlu untuk ditindaklanjuti. Adapun rekomendasi dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan atas hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 ditampilkan pada tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1**  
**Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi AKIP**

Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
A. Perencanaan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan sinkronisasi pada Dokumen Perencanaan Kinerja seperti didalam Rencana Aksi dengan Laporan Monev Bulanan dan Laporan Kinerja. Apabila terdapat perubahan Rencana diharapkan dapat memberikan keterangan</li> <li>2. Memastikan keselarasan dokumen perencanaan seperti Renstra, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja</li> </ol>	<p><i>Sesuai dengan ND 98/ND/Ps.1/2023 tanggal 6 Juni 2024</i></p> <p>Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh pihak evaluator, maka Setditjen PI komitmen untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setditjen PI akan memberikan penjelasan dan perbaikan kurva S jika ditemukan perbedaan kurva S</li> </ol>

Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
B. Pengukuran Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meng-upload Laporan Monitoring Kinerja Bulanan dan Laporan Kinerja TA. 2023 kedalam aplikasi e-Sakip sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018)</li> <li>Pada Laporan monev bulanan perlu melampirkan form lembar kendali yang telah ditandatangani pimpinan secara berkala dan konsisten</li> </ol>	<p>pada dokumen perencanaan dengan dokumen laporan kinerja;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setditjen PI akan konsisten dalam penggunaan lembar kendali sebagai bentuk keterlibatan pimpinan dan konsisten dalam penyampaian laporan kedalam e-sakip sesuai dengan peraturan yang berlaku;</li> <li>Setditjen PI telah menerapkan pemberian tunjangan kinerja untuk seluruh pegawai di lingkungan DJPI berdasarkan pada kinerja individu sejak April 2024 sesuai dengan capaian kinerja pada Triwulan 1 (Bulan Maret) 2024;</li> <li>Setditjen PI akan menyampaikan penjelasan detail terkait kronologis DIPA pada laporan kinerja Setditjen PI TA. 2024;</li> <li>Setditjen PI akan mendorong Direktorat PSSPP dalam penggunaan teknologi sistem (aplikasi) dalam pelaksanaan evaluasi AKIP;</li> <li>Setditjen PI akan berusaha sebaik mungkin dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari pihak evaluator</li> </ol>
C. Pelaporan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam penyampaian Nota Dinas Laporan Kinerja kepada Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan mengikuti ketentuan yang berlaku (Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018)</li> <li>Perlu diinformasikan terkait sebab ataupun alasan terjadinya perubahan Perjanjian Kinerja didalam Laporan Kinerja</li> </ol>	
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Setditjen PI perlu berkoordinasi dengan Direktorat PSSPP agar dapat melakukan koordinasi dengan Biro PAKLN sebagai koordinator e-SAKIP</li> <li>Untuk tahun berikutnya agar setiap rekomendasi hasil evaluasi AKIP dapat ditindaklanjuti</li> </ol>	

Tindak lanjut atas rekomendasi dilakukan melalui pelaksanaan dan penyusunan laporan monitoring berkala dan didalam laporan kinerja ini. Pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi dilakukan dengan pembahasan berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan Nomor 185/ND/Ps.1/2024 perihal Notulensi Kegiatan Monitoring atas Tindak Lanjut Lembar Hasil Evaluasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023 tanggal 23 September 2024. Komitmen pimpinan juga dilakukan dengan penyampaian Memo Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 1/MD/Ps/2024 perihal Penyampaian Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Setditjen PI tanggal 26 September 2024.

## B. Capaian Kinerja

Prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah adalah komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan yang akuntabel, sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka melakukan akuntabilitas kinerja tersebut, maka perlu disampaikan berbagai capaian kinerja.

Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR dan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendukung capaian Program Dukungan Manajemen Internal Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Pasca revisi Rencana Strategis Kementerian PUPR, terdapat perubahan dalam penilaian capaian kinerja pada organisasi di

lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini juga berlaku pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 99,96% dibandingkan target yang ada pada Rencana Strategi maupun Perjanjian Kinerja. Adapun capaian pada setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disampaikan pada tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja berdasarkan Target Rencana Strategis dan Target Perjanjian Kinerja**

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024 (%)	Target PK 2024 (Baseline) (%)	Realisasi 2024 (%)	Kinerja Terhadap PK (%)
<b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>				
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR				
<b>SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	<b>94,58</b>	<b>99,37</b>	<b>99,96</b>	
<b>Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,59</b>	
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	15,00	15,00	14,96	99,73%
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	15,00	15,00	15,00	100,00%
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	15,00	15,00	15,34	102,27%
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	15,00	15,00	15,43	102,85%
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	15,00	15,00	14,50	96,65%
IKK. Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang Modern, Terpadu dan Berorientasi Publik	15,00	15,00	15,24	101,58%
IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi	10,00	10,00	10,13	101,30%

Berdasarkan tabel 3.2, capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2024 adalah 99,96% dengan kinerja terhadap target Rencana Strategi mencapai 105,69% (kinerja dihitung dari perbandingan antara realisasi terhadap target) dan kinerja terhadap target Perjanjian Kinerja mencapai 100,59%. Pada tahun 2024 terdapat perubahan metode perhitungan capaian kinerja berdasarkan perubahan/revisi Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024 (Tabel 2.3). Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024, target tahun 2024 adalah 94,58, namun berdasarkan Perjanjian Kinerja, target sebesar 99,37. Hal ini dikarenakan target pada Perjanjian Kinerja berdasarkan pada baseline (capaian) pada tahun 2023. Adapun penjelasan nilai pada setiap IKK sebagai berikut:

1. IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan memiliki capaian kinerja sebesar 14,96%. Pada IKK ini, capaian lebih rendah dikarenakan masih terdapat 1 unit BMN berupa Kendaraan Dinas Jabatan (KDJ) berbasis listrik yang belum dapat dilakukan PSP. Hal ini menyebabkan capaian pada IKK ini hanya 99,32% (dari 100%).
2. IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum memiliki capaian sebesar 15,00%. Output yang dihasilkan pada IKK ini terdiri dari :
  - Jumlah produk hukum yang terselesaikan sebanyak 1 Peraturan Pemerintah, 1 Peraturan Presiden, 1 Peraturan Menteri PUPR, 5 Keputusan Menteri PUPR, dan 55 Keputusan Dirjen PI;
  - Pendampingan terhadap pegawai internal DJPI yang memiliki masalah dan/atau berurusan dengan Aparat penegak Hukum sebanyak 7 kasus;
  - Pendampingan penyusunan 57 draft kesepakatan kerjasama; dan
  - 152 usulan pertimbangan hukum yang terselesaikan;
3. IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai memiliki capaian sebesar 15,34%. Pada IKK ini, layanan jabatan fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melebihi target yang ditetapkan. Selain itu, layanan administrasi kepegawaian dapat dilaksanakan sesuai dengan target. Selama tahun 2024, capaian terhadap layanan pembinaan dan pengembangan pegawai hanya 98,93% dikarenakan masih terdapat beberapa orang pegawai yang belum menyelesaikan penyusunan SKP pada Triwulan 1.
4. IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran memiliki capaian kinerja sebesar 15,43%. Penilaian pada IKK ini berdasarkan pada nilai IKPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 93,43 dimana lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yaitu 89,96. Selain berdasarkan nilai IKPA, komposit perhitungan pada IKK ini berdasarkan pada peningkatan kualitas laporan keuangan, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RI dimana capaian dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 88% dan lebih tinggi dibandingkan target penyelesaian yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR yaitu 80%, serta tingkat penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
5. IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran memiliki capaian sebesar 14,50%. Kualitas perencanaan anggaran berdasarkan pada penilaian melalui aplikasi SMART DJA. Angka capaian kualitas perencanaan anggaran adalah 88,60 (nilai tahun 2023 adalah 91,67) dimana komposisi nilai terdiri dari nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 83,80 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (berdasarkan nilai IKPA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan) sebesar 93,40. Capaian tahun 2024 yang lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dikarenakan adanya reformulasi dari Kementerian Keuangan (pada sistem aplikasi SMART DJA) sesuai dengan PMK
6. IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi Publik memiliki capaian kinerja sebesar 15,24%. Nilai capaian kinerja pada IKK ini didapat dari kehadiran pada pameran yang melebihi target, sentimen positif pada pemberitaan DJPI di media berdasarkan respon positif pada berita pada media sosial (Instagram, twitter, dan berita online lainnya) dan sentimen positif dari stakeholder.
7. IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi memiliki capaian 10,13% dan lebih tinggi dibandingkan target. Hal ini dikarenakan nilai AKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023 yaitu 80,45 dimana lebih tinggi dari pada nilai AKIP pada tahun 2022 sebesar 79,41 sehingga capaian pada tahun 2024 menjadi 101,31%.

Selain rencana strategis dan perjanjian kinerja, pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) terdapat pula target yang harus dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang tercantum pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-033.16-0/2024 tanggal 24 November 2023. Adapun capaian kinerja terhadap target DIPA sebagai berikut.

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja berdasarkan Target DIPA**

Kode	Program / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Target Volume / Satuan	Realisasi
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen		
SP01	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKP09	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	84,12%	89,25%
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
	IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	20%	20,00%
	IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	14,10%
	IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	20%	17,00%
	IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	17,50%
	IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	18,75%
	IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	18,75%

Pada target DIPA, terdapat perbedaan terhadap target yang tercantum pada Revisi Rencana Strategis dan Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Target DIPA masih mengacu pada target pada Perjanjian Kinerja awal. Oleh karena itu, perhitungan capaian kinerja (realisasi) menggunakan perhitungan pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis awal Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Berdasarkan tabel 3.3, realisasi kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah 89,25%. Dimana pada IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tidak tercapai berdasarkan target. Perhitungan capaian kinerja berdasarkan jumlah dokumen/output yang dihasilkan. Dengan adanya revisi Rencana

Startegi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, jumlah output pada kedua IKK yang capaian lebih rendah dibandingkan target dikarenakan jumlah output lebih sedikit. Sedangkan IKK dengan capaian lebih tinggi dibandingkan target dikarenakan bertambahnya output yang dihasilkan dibandingkan target.

Adanya perbedaan target dan metode perhitungan capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis/Perjanjian Kinerja dan DIPA, maka nilai capaian dan realisasi kinerja juga terdapat perbedaan. Namun dari kedua perhitungan, capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melebihi dari target. Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan dalam capaian kinerja adalah :

**Faktor Eksternal**

- Meningkatnya kepercayaan dari masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui branding yang dilakukan secara online maupun offline;
- Kerjasama dari seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pelaksanaan dan layanan dukungan manajemen.

**Faktor Internal**

- Komitmen dari tingkat pimpinan hingga staf dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun;
- Penerapan SOP (*Standart Operating Procedures*) dalam pelayanan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
- Pelaksanaan monitoring berkala sebagai bentuk pereventif terhadap kendala dan permasalahan yang terjadi.

Adapun beberapa faktor yang menghambatnya pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah :

- Restrukturisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sedikit banyak memberikan dampak terhadap pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan rutin yang dilaksanakan sehingga terdapat beberapa output yang belum dapat terselesaikan pada tahun 2024;
- Urgensi pelaksanaan kegiatan yang diluar rencana membutuhkan penyesuaian dan memberikan dampak pada tugas utama yang ada di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Selain capain tersebut, dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024, terdapat kerangka regulasi yang akan diselesaikan selama periode Rencana Strategis. Adapun realisasi terhadap kerangka regulasi ditampilkan pada Tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Kerangka Regulasi Sesuai Rencana Strategis**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol	Peraturan Menteri terkait Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol	Direktorat PPIJJ	Unor di Kementerian PUPR(DJBM, DJPI, BPJT)	2020	Unit Organisasi Pemrakarsa menjadi Direktorat Jenderal Bina Marga
2	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Revisi Permen PUPR No. 21 Tahun 2018	Reorganisasi dan Perubahan Simpul KPBU	Direktorat PSSPP	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020	Dicabut dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021
3	Revisi atas Peraturan Menteri PUPR tentang Revisi Permen PUPR No. 21 Tahun 2018	Reorganisasi dan Perubahan Simpul KPBU	Direktorat PSSPP	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2021	Dicabut dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021
4	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan	Perubahan skema dan mekanisme pembiayaan perumahan	Direktorat PPP	Direktorat Jenderal Perumahan	2020-2024	ditetapkan dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 35 tahun 2021
5	Standar dan Pedoman Dokumen Pengadaan KPBU Bidang SDA	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan KPBU Sektor SDA	Direktorat PPISDA	PT PII, LKPP, Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020	Diperlukan koordinasikan kepada Unit Kerja pemrakarsa dikarenakan konsep belum disampaikan kepada Setditjen

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
6	Standar dan Pedoman Dokumen Perjanjian Kerja Sama KPBU Sektor SDA	Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama KPBU Sektor SDA	Direktorat PPISDA	PT PII, Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020	
7	Pedoman Pengelolaan Aset Investasi Infrastruktur SDA	Tata Cara Pengelolaan Aset Investasi	Direktorat PPISDA	Bappenas, Kemenkeu, Ditjen SDA, PT PII, dan BUP	2020	
8	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pembiayaan Infrastruktur SDA	Amanat Permen PUPR No. 03 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR	Direktorat PPISDA	Ditjen SDA, Setjen PIPR, DJPI	2021	
9	Kriteria Usulan Proyek KPBU Sektor SDA	Pedoman Penyiapan KPBU Sektor SDA	Direktorat PPISDA	Ditjen SDA, Setjen PIPR, DJPI, PT PII	2021	
10	Pedoman Pelaksanaan Program Penggabungan Infrastruktur SDA	Pedoman Penyiapan KPBU Sektor SDA	Direktorat PPISDA	Bappenas, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, Setjen PUPR, DJPI, PT PII	2021	
11	Rancangan Peraturan Menteri PUPR Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Direktorat PPISDA	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2021	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
12	Pedoman Pemantauan Investasi Infrastruktur SDA	Tata Cara Pemantauan Investasi Infrastruktur	Direktorat PPISDA	Bappenas, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, Setjen PUPR, DJPI, PT PII	2021	
13	Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Melalui Optimasi Bendungan	Penugasan Khusus BUMN Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan Melalui Optimasi Pemanfaatan Asset Pada Bendungan Dan Pencapaian Target Bauran Energi Premier Yang Optimal Pada Tahun 2025	Direktorat PPISDA	Kemen PUPR, Kemen BUMN, Kemenkeu, Kemen ESDM, Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara, Kemenkumham, PT.PLN, BUMN Karya	2024	Kajian untuk proses Izin Prakarsa masih memerlukan penyempurnaan, diajukan Penundaan proses Izin Prakarsa ke Biro Hukum pada tanggal 14 November 2024
14	Revisi Peraturan Menteri PUPR No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur	Perbaiki proses bisnis pelaksanaan KPBU pada Tahap Perencanaan, Penyiapan, Transaksi, dan Pelaksanaan Perjanjian KPBU sebagai upaya percepatan pelaksanaan dan/atau delivery project dengan skema KPBU bidang PUPR	Direktorat PSSPP	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2024	Sudah selesai Harmonisasi, untuk pengundangan menunggu arahan pimpinan mengingat adanya perubahan organisasi
15	Service Level Agreement (SLA) Bendungan	Pedoman Pembayaran KPBU Availability Payment untuk sub sektor bendungan	Direktorat PPISDA	Ditjen SDA, Setjen PUPR, DJPI	2021	Diperlukan koordinasi kepada Unit Kerja pemrakarsa dikarenakan konsep belum disampaikan kepada Setditjen

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
16	Service Level Agreement (SLA) Daerah Irigasi	Pedoman Pembayaran KPBU Availability Payment sub sektor daerah irigasi	Direktorat PPISDA	Ditjen. SDA, DJPI	2022	
17	Rancangan Perpres Honorarium, Insentif dan Manfaat Tambahan Lainnya Komite Tapera	Perumahan dan Kawasan Permukiman: Pembiayaan Perumahan Luncuran Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2021	Direktorat PPP	BP Tapera dan Kementerian yang termasuk ke dalam Komite Tapera	2022	ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2023
18	Rancangan Keputusan Presiden Tentang Keanggotaan Komite Tapera Yang Mewakili Unsur OJK	Perumahan dan Kawasan Permukiman: Pembiayaan Perumahan Menindaklanjuti Surat Usulan OJK Nomor: S-42/MS.1/2022 Tanggal 11 Agustus 2022 tentang Anggota Komite Tapera dari Unsur Komisioner OJK	Direktorat PPP	BP Tapera dan Kementerian yang termasuk ke dalam Komite Tapera	2022	ditetapkan dengan Keputusan Presiden nomor 43/M/2023
19	Pedoman Pembiayaan Rumah Sederhana Hijau	Perumahan dan Kawasan Permukiman: Pembiayaan Perumahan	Direktorat PPP	Direktorat Jenderal Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Bappenas, GBCI, Sekretariat BGH, OJK	2023	Konsep masih dibahas oleh unit kerja dan belum disampaikan kepada Setditjen
20	Penyempurnaan NSPK KPBU Sektor Perumahan Solicited	Dukungan Manajemen KPBU Sektor Perumahan	Direktorat PPP	Direktorat Jenderal Perumahan	2022-2024	Diperlukan koordinasi kepada Unit Kerja pemrakarsa dikarenakan konsep belum disampaikan kepada Setditjen

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
	(Perencanaan, Penyiapan, Transaksi)					
21	Penyempurnaan NSPK KPBU Sektor Perumahan Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited)	Dukungan Manajemen KPBU Sektor Perumahan	Direktorat PPP	Direktorat Jenderal Perumahan, Badan Otorita, Satgas PPI IKN	2022-2024	
22	Pedoman Pelaksanaan Survey Kebutuhan Nyata (Real Demand Survey) Perumahan	Dukungan Manajemen KPBU Sektor Perumahan	Direktorat PPP	Direktorat Jenderal Perumahan	2023	
23	Pedoman Perjanjian Kerjasama (PKS) KPBU SPAM	Dukungan Manajemen KPBU Sektor Permukiman	Direktorat PPIP	Direktorat Jenderal Cipta Karya	2022	
24	Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Persampahan dan Air Limbah	Dukungan Manajemen KPBU Sektor Permukiman	Direktorat PPIP	Direktorat Jenderal Cipta Karya	2020	
25	Prosedur Standar Fasilitasi Proyek KPBU Untuk Pemerintah Daerah dan Prosedur Standar Pelaksanaan KPBU Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited)	Dukungan Manajemen KPBU Sektor Permukiman	Direktorat PPIP	Direktorat Jenderal Cipta Karya	2021	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
26	NSPK Alur Kerja dan Dokumen Pendukung yang diperlukan dalam Peralihan Proses KPBU dari Tahap Penyiapan ke Tahap Transaksi dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	Dukungan Manajemen KPBU Sektor Permukiman	Direktorat PPIP	Direktorat Jenderal Cipta Karya	2022	
27	Pedoman Standar Penyusunan Dokumen Feasibility Study (FS) Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	Dukungan Manajemen KPBU Sektor Permukiman	Direktorat PPIP	Direktorat Jenderal Cipta Karya	2024	
28	SOP Monitoring Proyek KPBU Permukiman (SPAM Karian Serpong dan Djuanda)	Dukungan Manajemen KPBU Sektor Permukiman	Direktorat PPIP	Direktorat Jenderal Cipta Karya	2024	
29	Rancangan Peraturan Menteri PUPR Tentang Pembubaran Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Menindaklanjuti: 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi B/112/M.KT.01/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Persetujuan Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.	Setditjen PI	Kementerian PANRB, Setjen PUPR, Kementerian Keuangan	2022	Sudah selesai di undangkan dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 9 tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
		<p>222. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR nomor 208/KPTS/SJ/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rapermen PUPR tentang Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembiayaan Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).</p> <p>3. Surat Menteri Keuangan nomor S-15/PB/PB.5/2022 tanggal 8 April 2022 hal Tindak Lanjut atas Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Pusat Pembiayaan Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).</p>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
30	Rancangan Peraturan Menteri PUPR Tentang Pembubaran Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	3. Surat Menteri Keuangan nomor S-15/PB/PB.5/2022 tanggal 8 April 2022 hal Tindak Lanjut atas Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Pusat Pembiayaan Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).				Sudah selesai di undangkan dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 9 tahun 2022
31	Revisi Kedua Permen PUPR Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol	Penyesuaian masa konsesi jalan tol dan Penyesuaian atas terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan	Direktorat PPIJJ	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2024	Konsep belum diajukan kepada Setditjen
32	Revisi PP 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat	Perumahan dan Kawasan Permukiman: Pembiayaan Perumahan	Direktorat PPP	BP Tapera dan Kementerian yang termasuk ke dalam Komite Tapera	2023	sudah di undangkan dengan PP nomor 21 tahun 2024
33	Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol Atas Prakarsa Badan Usaha	Kebutuhan pengaturan yang memuat secara rinci mekanisme pengusahaan jalan tol atas prakarsa badan usaha	Direktorat PPIJJ	Unit Organisasi Kementerian PUPR (DJBM, DJPI, BPJT)	2021	Diperlukan koordinasi kepada Unit Kerja pemrakarsa dikarenakan konsep belum disampaikan kepada Setditjen

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
34	Surat Edaran Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 03/SE/Dp/2021 tentang Pedoman Dokumen Standar Operasional Prosedur Evaluasi dan Persetujuan Pengusahaan Jalan Tol Atas Prakarsa Badan Usaha ( <i>Unsolicited</i> ) di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Peningkatan kepastian proses dan waktu dalam pemberian persetujuan pengusahaan jalan tol <i>unsolicited</i>	Direktorat PPIJJ	Unit Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dit. PPIJJ, Dit. PSSPP)	2021	
35	Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	<p>Tujuan: Perubahan kedua atas Perpres No. 100 Tahun 2014 dilakukan dalam rangka Program Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.</p> <p>Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dimana JTTS ditargetkan dapat tersambung dari Lampung sampai dengan Aceh yang bertujuan untuk memangkas waktu tempuh dari</p>	Direktorat PPIJJ	Kementerian/Lembaga terkait (Kemensetneg, Kemenkumham, Kemenko Bid. Perekonomian, Kemenko Bid. Kemaritiman dan Investasi, Kemenkeu, KemenPPN/Bappenas, KemenBUMN, KemenPUPR, PT Hutama Karya)	2022	sudah diundangkan dengan Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
		sebelumnya 48 jam menjadi 30 jam				
36	Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	<p>Tujuan: Perubahan ketiga atas Perpres No. 100 Tahun 2014 dilakukan dalam rangka Program Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.</p> <p>Memperhatikan konektivitas pada jalan tol yang telah beroperasi serta target penyelesaian, serta terdapat <i>missing link</i> pada ruas <i>backbone</i> sehingga konektivitas <i>backbone</i> JTTS belum optimal.</p>	Direktorat PPIJJ	Kementerian/Lembaga terkait (Kemensetneg, Kemenkumham, Kemenko Bid. Perekonomian, Kemenko Bid. Kemaritiman dan Investasi, Kemenkeu, KemenPPN/Bappenas, KemenBUMN, KemenPUPR, PT Hutama Karya)	2024	sudah diundangkan dengan Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2024
37	Surat Edaran Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 02/SE/Dp/2024 tentang Pedoman Penyusunan Kajian Studi Kelayakan Pengusahaan Jalan Tol	Meningkatkan akuntabilitas dokumen lelang perusahaan jalan tol dengan melakukan penyusunan pedoman penyusunan Studi Kelayakan Pengusahaan Jalan Tol di lingkungan Kementerian PUPR	Direktorat PPIJJ	Unit Organisasi Kementerian PUPR (DJBM, DJPI, BPJT)	2024	Diperlukan koordinasi kepada Unit Kerja pemrakarsa dikarenakan konsep belum disampaikan kepada Setditjen

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian	Keterangan
38	Surat Edaran Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 04/SE/Dp/2024 tentang Pedoman Penyusunan Evaluasi Dokumen Studi Kelayakan Pengusahaan Jalan Tol	Meningkatkan akuntabilitas dokumen lelang perusahaan jalan tol dengan melakukan penyusunan pedoman mekanisme penilaian atas substansi dokumen studi kelayakan	Direktorat PPIJJ	Unit Organisasi Kementerian PUPR (DJBM, DJPI, BPJT)	2024	
39	Rancangan Keputusan Menteri PUPR tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perencanaan dan Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol	Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan perusahaan jalan tol perlu disusun dan ditetapkan Standar Operasional Perencanaan dan Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol	Setditjen PI	Unit Organisasi Kementerian PUPR (DJBM, DJPI, BPJT)	2024	sudah ditetapkan dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1307/KPTS/M/2024

### C. Analisis Perbandingan Kinerja

Perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dilakukan untuk melihat adanya perbaikan terhadap capaian di tahun 2024. Beberapa perbandingan kinerja terhadap capaian dan realisasi tahun 2024 sebagai berikut :

#### 1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja yang akan diperbandingkan merupakan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dari tahun 2020 hingga tahun 2023 terhadap capaian kinerja di tahun 2024. Pada tahun 2024, capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Hal ini juga dikarenakan target kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Adanya perubahan metode perhitungan di tahun 2024 dikira mampu meningkatkan dan mendukung akselerasi ketercapaian pada setiap IKK di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Adapun perbandingan capaian kinerja ditampilkan pada tabel 3.5 berikut.

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja				
	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>						
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR						
<b>SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	<b>99,37</b>	<b>55,92</b>	<b>63,35</b>	<b>84,4</b>	<b>99,37</b>	<b>99,96</b>
<b>Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan)</b>	<b>100</b>					<b>100,59</b>
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan	15,00	13,50	15,00	16,90	16,13	14,96
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	15,34
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	15,00	10,00	10,00	17,50	15,00	15,43
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	15,00	14,25	15,00	15,00	18,75	14,50
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi Publik	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	15,24
IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi	10,00	-	-	-	-	10,13

Berdasarkan tabel 3.5, terdapat 2 IKK yang capaian kinerjanya dibawah target dari tahun 2023. IKK Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan merupakan IKK yang memiliki kinerja dibawah 100% yaitu 99,73% dan memiliki capaian yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu IKK Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran juga memiliki capaian yang lebih rendah dibandingkan

tahun sebelumnya. Walau terdapat 2 IKK dengan capaian kinerja dibawah target, secara total capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melebihi target di tahun 2024 dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.

Terdapat penambahan IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi dengan capaian melebihi target di tahun 2024. Pada IKK ini belum terdapat perbandingan terhadap capaian di tahun sebelumnya. Pada IKK Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki capaian tertinggi dibandingkan IKK lainnya. Walaupun masih terdapat beberapa IKK yang memiliki capaian dibawah target, namun secara total capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melebihi target dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.

## 2. Perbandingan Kinerja dengan dengan Target Jangka Menengah

Kinerja pada tahun 2024 menjadikan kinerja penutup pada periode Rencana Strategi tahun 2020-2024. Target jangka menengah tercatat pada dokumen Rencana Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 94,58 yang terdiri dari 9 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dimana 2 IKK memiliki target 0 (merupakan IKK dari BLU PPDPP yang telah dilikuidasi pada tahun 2022). Adapun perbandingan realisasi tahun 2024 dengan target jangka menengah ditampilkan pada Tabel 3.6 berikut.

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis**

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2024
	<b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>	
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		
<b>SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	<b>94,58</b>	<b>99,96</b>
<b>Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan)</b>	<b>100</b>	<b>100,59</b>
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan	15,00	14,96
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	15,00	15,00
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	15,00	15,34
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	15,00	15,43
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	15,00	14,50
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi Publik	15,00	15,24
IKK. Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP	-	-
IKK. Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP	-	-
IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi	10,00	10,13

Berdasarkan pada tabel 3.6, capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Hanya pada IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan yang memiliki realisasi kinerja dibawah target jangka menengah.

### 3. Perbandingan Kinerja output

Dalam pencapaian outcome yang telah disampaikan, terdapat pula output yang perlu dicapai sebagai bukti dukung terhadap outcome yang telah diraih. Adapaun capaian output Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2024 ditampilkan pada Tabel 3.7 berikut.

**Tabel 3.7**  
**Capaian Output Tahun 2024 berdasarkan Target Rencana Strategis**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	2024		TOTAL RENSTRA	
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I		Layanan	1	1	5	5
	1	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	1	5	5
2	Manajemen Transformasi Organisasi		Layanan	1	1	9	9
	1	Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi	Laporan	1	1	9	9
3	Pengelolaan Pegawai		Orang	260	260	260	260
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai	Laporan	2	2	13	14
4	Tata Kelola TNDE dan Arsip		Layanan	1	1	5	6
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip	Laporan	1	1	5	6
5	Kerumahtanggaan		Layanan	2	2	11	13
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan	Laporan	2	2	11	13
6	Advokasi Hukum		Layanan	1	1	8	9
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum	Laporan	1	1	9	9
7	MOU dengan APH dan Instansi Lain Terkait		Layanan	1	1	5	5
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama	Laporan	1	1	5	5
8	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan		Layanan	2	2	13	14
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	3	3	13	15
9	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I		Layanan	1	1	5	5
	1	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Laporan	1	1	5	5
10	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I		Layanan	3	3	13	13
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan	Laporan	3	3	13	13
11	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI		Layanan	1	1	5	7

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	2024		TOTAL RENSTRA		
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN	Laporan	1	1	5	7
12	Strategi Komunikasi		Layanan	1	1	8	9
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat	Laporan	1	1	8	9
13	Publikasi		Layanan	4	4	13	13
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi	Laporan	4	4	13	13
14	Laporan Keuangan Unit Eselon I		Laporan	3	3	8	13
	1	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	3	3	8	13
15	Laporan Kinerja Unit Eselon II		Laporan	1	1	5	5
	1	Jumlah Laporan Kinerja	Laporan	1	1	5	5
16	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI		Laporan	2	2	8	8
	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	2	2	8	8
17	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI		Unit	1	2	5	6
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran	Unit	1	2	5	6
18	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI		Unit	1	2	5	6
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	Unit	1	2	5	6
19	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan		Unit	2	2	6	6
	1	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	Unit	2	2	6	6
20	Gaji dan Tunjangan DJPI		Layanan	1	1	5	5
	1	Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	5	5
21	Operasionalisasi Kantor DJPI		Layanan	1	1	5	5
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	5	5

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, target output pada tahun 2024 tercapai sesuai dengan target. Sama halnya dengan capaian terhadap target jangka menengah yang tercantum pada Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang juga melebihi target. Pada beberapa kegiatan memiliki capaian output yang lebih tinggi dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu :

- Tata Kelola TNDE dan Arsip;
- Advokasi Hukum;
- Kerumahtanggaan;
- Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;

- Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI;
- Strategi Komunikasi;
- Laporan Keuangan Unit Eselon I;
- Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI; dan
- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI.

Capaian output berdasarkan pada Perjanjian Kinerja disampaikan pada Tabel 4.8 berikut.

**Tabel 3.8**  
**Capaian Output Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja**

Indikator Kinerja		Target Output PK 2024	Realisasi 2024
<b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>			
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR			
<b>SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>			
<b>Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan)</b>			
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan		15%	14,96%
EBA.956	Layanan Barang Milik Negara	1 Layanan	1 Layanan
EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan
EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
EBA.951	Layanan Sarana Internal	3 unit	4 unit
EBA.971	Layanan Prasarana Internal	2 unit	2 unit
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum		15%	15,00%
EBA.957	Layanan Hukum	1 Layanan	1 Layanan
EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	1 Layanan
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai		15%	15,34%
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	422 orang	422 orang
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran		15%	14,50%
EBD. 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen	3 Dokumen
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran		15%	
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4 Dokumen	4 Dokumen
IKK. Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang Modern, Terpadu dan Berorientasi Publik		15%	15,24%
EBA. 958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan
IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi		10%	10,13%

Berdasarkan tabel 3.8, seluruh output dan outcome yang ditargetkan pada tahun 2024 telah tercapai secara keseluruhan. Capaian tertinggi pada IKK Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai dimana kinerja capaian mencapai 15,34%. Jumlah layanan pegawai berdasarkan pada total pegawai Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pada IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi tidak terdapat

output yang harus dihasilkan dikarenakan yang menjadi perhitungan outcome adalah nilai AKIP. Sedangkan laporan pendukung menjadi output pada IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Adapun capaian output berdasarkan pada DIPA ditampilkan pada tabel 3.9 berikut.

**Tabel 3.9**  
**Capaian Output Tahun 2024 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)**

		Target		Realisasi	
KRO 1 :	4194.EBA	Layanan Dukungan manajemen Internal	7	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	7 Layanan
RO :	EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan	1 Layanan
	EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan	1 Layanan
	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	1 Layanan
	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	1 Layanan
	EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	1 Layanan
	EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan	1 Layanan
	EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1 Layanan
KRO 2 :	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6	Unit, m2, Paket	
RO :	EBB.951	Layanan Sarana Internal	4	Unit	4 unit
	EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2	Unit	2 unit
KRO 3 :	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	422	Orang, Layanan, Rekomendasi	422 orang
RO :	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	422	Orang	422 orang
KRO 4 :	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	10 Dokumen
RO :	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4	Dokumen	4 Dokumen
	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	Dokumen	3 Dokumen
	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	3	Dokumen	3 Dokumen

Terdapat 4 KRO di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pada tahun 2024, capaian output berdasarkan DIPA adalah 100% dimana seluruh output tercapai sesuai dengan target yang tercantum.

#### 4. Perbandingan Kinerja dengan Standar nasional (*Benchmarking*)

Perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan standar nasional (*benchmarking*) menggunakan unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023. Perbandingan kedua unit kerja tersebut dengan mempertimbangkan adanya beberapa kesamaan diantaranya berupa skala unit organisasi yang mirip dimana kedua unit organisasi merupakan unit kerja eselon II, memiliki 1 Sasaran Program yang sama. Adapun perbandingan realisasi kinerja antara kedua unit kerja disampaikan pada tabel 3.10 berikut.

**Tabel 3.10**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024 dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2023**

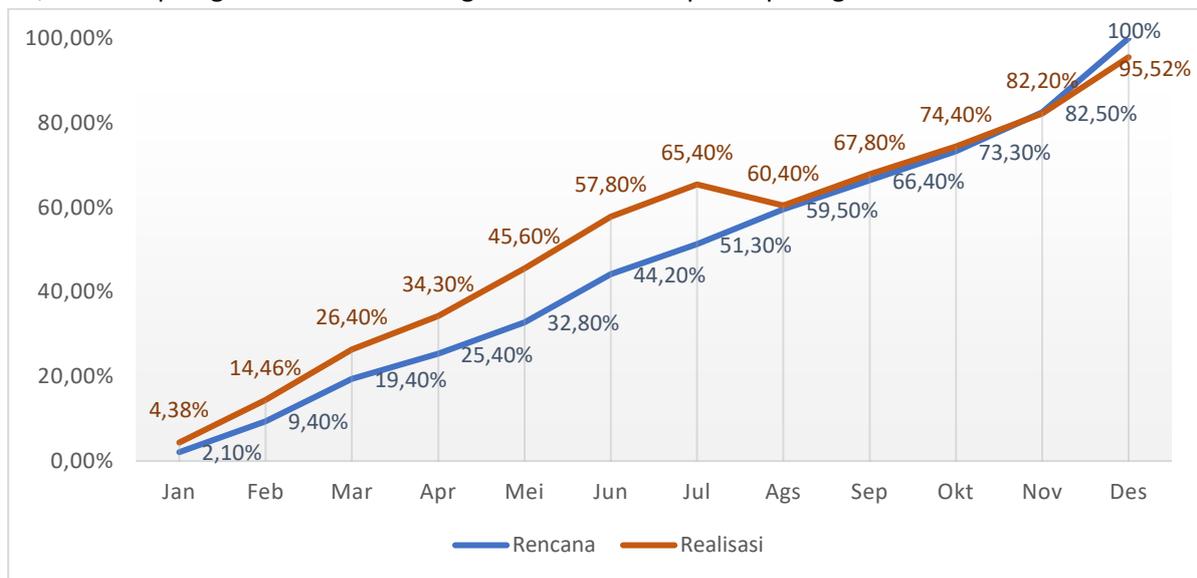
Indikator Kinerja Sekretariat DJPI	Realisasi Sekretariat DJPI Tahun 2024 (%)	Indikator Kinerja Sekretariat DJBM (%)	Realisasi Sekretariat DJBM Tahun 2023 (%)
<b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>		<b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>	
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	
<b>SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola</b>		<b>SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan</b>	<b>96,53</b>
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan	14,96	IKK. Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan perumahan	96,53
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	15,00		
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	15,34		
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	15,43		
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	14,50		
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi Publik	15,24		
IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi	10,13		

Berdasarkan tabel 3.10, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan memiliki 1 Sasaran Program yaitu SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan tugas Teknis Lainnya dan 1 Sasaran Kegiatan dengan 1 Indikator Kinerja Kegiatan. Perbandingan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan.

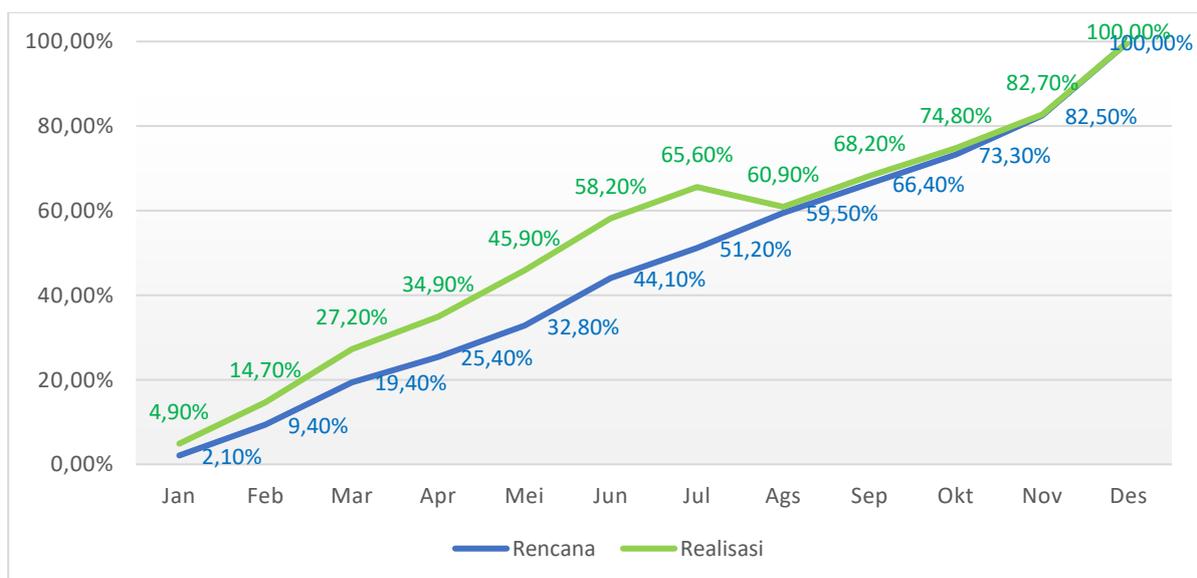
#### D. Analisis Realisasi Anggaran

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki total anggaran awal sebesar Rp66.920.590.000,00 (enam puluh enam milyar Sembilan ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdapat 6 kali perubahan pagu anggaran sepanjang Tahun Anggaran 2024 dimana perubahan terakhir terjadi pada Revisi DIPA 9

tanggal 16 Oktober 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp84.164.426.000,00 (delapan puluh empat milyar serratus enam puluh empat juta empat ratus dua pulun enam ribu rupiah). Berdasarkan iemonitoring PUPR tanggal 6 Januari 2024, realisasi keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 95,52% atau senilai Rp81.996.774.000,00 (delapan puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Terdapat pula anggaran sebesar Rp97.615.000,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang di blokir untuk optimalisasi anggaran Perjalanan Dinas sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 perihal Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA. 2024 tanggal 7 November 2024. Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tanpa blokir sebesar Rp85.747.091.000,00 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta Sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga persentase realisasi adalah 95,63%. Adapun grafik realisasi keuangan dan fisik ditampilkan pada gambar 3.4 dan 3.5 berikut.



**Gambar 3.4**  
**Kurva S Realisasi Keuangan Tahun 2024**



**Gambar 3.5**  
**Kurva S Realisasi Fisik**

Gambar 3.4 menunjukkan kurva S persentase realisasi keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Berdasarkan gambar 4.4, terlihat deviasi antrara realisasi dan rencana semakin besar dari Bulan Januari hingga Bulan Juli. Pada Bulan Agustus dilakukan perbaikan Rencana Penarikan Halaman III DIPA disertai dengan penambahan anggaran yang menjadikan persentase realisasi pada Bulan Agustus menjadi lebih rendah dibandingkan Bulan Juli (persentase dihitung dari realisasi dibagi dengan total pagu). Dengan adanya perbaikan rencana, maka deviasi pada Bulan Agustus hingga Bulan Desember kurang dari 5%. Adapun rincian realisasi anggaran pada setiap KRO dan RO berdasarkan data iemonitoring PUPR tanggal 5 Januari 2024 ditampilkan pada tabel 3.11 berikut.

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2024**

(Status iemonitoring PUPR tanggal 6 Januari 2025)

Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu	Realisasi	Keuangan		Fisik		
			(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL	RN	RL	Kinerja
<b>Program Dukungan Manajemen</b>									
<b>Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>			<b>85.844.706</b>	<b>81.996.774</b>	<b>100</b>	<b>95,75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>7</b>	<b>Layanan/Laporan /Dokumen</b>	<b>78.741.705</b>	<b>75.051.498</b>	<b>100</b>	<b>95,58</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Layanan BMN	1	Layanan/Laporan /Dokumen	726.734	724.590	100	99,71	100	100	100
Layanan Hukum	1	Layanan/Laporan /Dokumen	695.018	692.975	100	99,71	100	100	100
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan/Laporan /Dokumen	1.349.919	1.326.722	100	98,28	100	100	100
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan/Laporan /Dokumen	591.032	589.564	100	99,75	100	100	100
Layanan Umum	1	Layanan/Laporan /Dokumen	783.000	780.652	100	99,70	100	100	100
Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan/Laporan /Dokumen	30.676	29.660	100	96,69	100	100	100
Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan /Dokumen	74.565.326	70.907.336	100	95,39	100	100	100
<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>6</b>	<b>Unit/m2/Paket</b>	<b>3.166.799</b>	<b>3.123.245</b>	<b>100</b>	<b>98,62</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Layanan Sarana Internal	4	Unit/m2/Paket	1.794.848	1.751.298	100	97,57	100	100	100
Layanan Prasarana Internal	2	Unit/m2/Paket	1.371.951	1.371.948	100	100	100	100	100
<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>	<b>422</b>	<b>Orang/Layanan</b>	<b>1.669.699</b>	<b>1.666.301</b>	<b>100</b>	<b>99,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Layanan Manajemen SDM	422	Orang/Layanan	1.669.699	1.666.301	100	99,80	100	100	100
<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>10</b>	<b>Layanan/Laporan /Dokumen</b>	<b>2.266.503</b>	<b>2.155.730</b>	<b>100</b>	<b>95,11</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4	Layanan/Laporan /Dokumen	1.120.578	1.120.425	100	99,99	100	100	100

Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu	Realisasi	Keuangan		Fisik		
			(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL	RN	RL	Kinerja
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	Layanan/Laporan /Dokumen	618.425	618.177	100	99,96	100	100	100
Layanan Manajemen Keuangan	3	Layanan/Laporan /Dokumen	527.500	417.128	100	79,08	100	100	100

Berdasarkan tabel 3.11, kinerja fisik pada seluruh KRO dan RO di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah 100%. Realisasi keuangan terendah pada KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal, pada RO Layanan Manajemen Keuangan yaitu sebesar 79,08%. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi pada RO tersebut.

### E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah 104,44. Hal ini terlihat pada tercapainya seluruh output dan fisik. Adapun rincian dari efisiensi penggunaan sumber daya ditampilkan pada tabel 4.12.

**Tabel 3.12**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024**

Program/Kegiatan/KRO/RO	Target DIPA	Capaian	Satuan	Capaian Keuangan (%)	Capaian Fisik (%)	Nilai Efisiensi
<b>Program Dukungan Manajemen</b>						
<b>Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>				<b>95,75</b>	<b>100</b>	<b>104,44</b>
<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>Layanan/Laporan /Dokumen</b>	<b>95,58</b>	<b>100</b>	<b>104,62</b>
Layanan BMN	1	1	Layanan/Laporan /Dokumen	99,71	100	100,29
Layanan Hukum	1	1	Layanan/Laporan /Dokumen	99,71	100	100,29
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	1	Layanan/Laporan /Dokumen	98,28	100	101,75
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	1	Layanan/Laporan /Dokumen	99,75	100	100,25
Layanan Umum	1	1	Layanan/Laporan /Dokumen	99,70	100	100,30
Layanan Bantuan Hukum	1	1	Layanan/Laporan /Dokumen	96,69	100	103,42
Layanan Perkantoran	1	1	Layanan/Laporan /Dokumen	95,39	100	104,83
<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>Unit/m2/Paket</b>	<b>98,62</b>	<b>100</b>	<b>101,40</b>
Layanan Sarana Internal	4	4	Unit/m2/Paket	97,57	100	102,49
Layanan Prasarana Internal	2	2	Unit/m2/Paket	100	100	100,00
<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>Orang/Layanan</b>	<b>99,80</b>	<b>100</b>	<b>100,20</b>
Layanan Manajemen SDM	422	422	Orang/Layanan	99,80	100	100,20

Program/Kegiatan/KRO/RO	Target DIPA	Capaian	Satuan	Capaian Keuangan (%)	Capaian Fisik (%)	Nilai Efisiensi
<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>Layanan/Laporan /Dokumen</b>	<b>95,11</b>	<b>100</b>	<b>105,14</b>
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4	4	Layanan/Laporan /Dokumen	99,99	100	100,01
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	3	Layanan/Laporan /Dokumen	99,96	100	100,04
Layanan Manajemen Keuangan	3	3	Layanan/Laporan /Dokumen	79,08	100	126,45

Berdasarkan tabel 3.11, nilai efisiensi tahun 2024 pada setiap RO di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan seluruhnya diatas 100. Efisiensi tertinggi pada RO Layanan Manajemen Keuangan dimana nilai efisiensi mencapai 126,45. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan menjadi di dalam kantor sehingga realisasi anggaran dapat diminimalisir dengan output dan tujuan kegiatan tetap tercapai dan terlaksana.

## F. Analisis Sumber Daya dengan Anggaran

Sumber daya yang terdapat pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tidak hanya terbatas pada sumber daya manusia, namun keberadaan sarana/prasarana juga menjadi sumber daya yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan. Dari total anggaran pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pada gambar 3.7, terdapat sebesar Rp50.905.326.000,00 untuk belanja pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Total belanja pegawai tersebut untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebanyak 261 pegawai ASN. Pembayaran gaji dan tunjangan kepada seluruh pegawai di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan bentuk pelayanan dan pelaksanaan dari Tugas dan Fungsi di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Pada tahun 2024, secara total belanja pegawai dan jumlah anggaran mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 namun secara jumlah pegawai khususnya di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tidak mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah pegawai PNS dan PPPK yang mengurangi jumlah TPI. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, berdasarkan analisis kebutuhan pegawai, analisis jabatan dan analisis beban kerja, masih terdapat selisih jumlah pegawai dengan kebutuhan yang kemudian dipenuhi melalui pengadaan Honorer dan Tenaga Pendukung Individu (TPI). Selain itu, adanya peningkatan nominal pada tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebabkan total anggaran mengalami peningkatan di tahun 2024.



Gambar 3.6  
Perbandingan Dukungan Sumber Daya Manusia dengan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

## G. Analisis Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan akuntabilitas dari sebuah organisasi. Hasil serta analisis yang disampaikan dalam laporan kinerja menjadi masukan untuk perbaikan selanjutnya. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai pimpinan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sangat peduli terhadap perbaikan di unit ini. Dengan adanya dukungan dari pimpinan dan keterlibatan dari seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk memperbaiki kinerja, maka terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu:

### 1. Informasi laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai

Pemanfaatan informasi pada laporan kinerja khususnya pada capaian kinerja dan isu strategis menjadi perhatian dari seluruh pegawai dan pimpinan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Penyelesaian terhadap isu-isu yang masih belum selesai di tahun 2023 menjadi poin penting. Selain itu menindaklanjuti rekomendasi evaluator pada evaluasi AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2022 menjadi salah satu hal yang harus diselesaikan. Pembahasan atas rekomendasi dilaksanakan pada rapat pembahasan dan tindak lanjut evaluasi pelayanan Setditjen PI yang dilaksanakan pada 12 Februari 2024.



**Gambar 3.7**  
**Dokumentasi Pembahasan Hasil Evaluasi Kepuasan Pelayanan Setditjen PI**

### 2. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja;

Pembahasan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dilakukan berkala setiap bulan dan dihadiri oleh pimpinan dan pegawai sebagai bentuk monitor dan komitmen dari seluruh pegawai dalam menjaga kualitas kinerja. Kegiatan rutin dilaksanakan setiap awal bulan untuk pembahasan capaian kinerja pada bulan sebelumnya. Dalam pembahasan capaian kinerja, disampaikan pula capaian anggaran serta analisis realisasi anggaran. Analisis ini menjadi masukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran untuk bulan berjalan dan bulan selanjutnya. Adapun beberapa dokumentasi kegiatan pembahasan capaian kinerja berkala yang dilakukan sebagai berikut.



**Gambar 3.8**  
**Dokumentasi Pembahasan Capaian Kinerja Bulanan**

3. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja; Capaian kinerja pada tahun 2023 menjadi dasar dalam melakukan evaluasi keberhasilan kinerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Hasil evaluasi ini kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan penyusunan target Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

4. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya

Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja khususnya pada penyesuaian target capaian kinerja bulanan yang disampaikan pada Dokumen Rencana Aksi dan menjadi masukan dalam penyesuaian target serta perhitungan capaian kinerja pada Revisi Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020-2024. Pembahasan dilakukan dalam beberapa agenda rapat salah satunya Rapat Pembahasan Konsep Rencana Aksi yang dilaksanakan pada 23 Februari 2024.



**Gambar 3.9**  
**Dokumentasi Pembahasan Konsep Rencana Aksi**

5. Informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

Adanya informasi kinerja pada laporan kinerja memberikan pengaruh pada perubahan budaya kinerja di tahun 2024 yang ditandai dengan penganjuran Zona Integritas, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penetapan Anti Penyuapan melalui SNI ISO 37001:2016 pada tanggal 28 November 2024. Penyiapan hal ini mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.



Gambar 3.10  
Sertifikat SNI ISO 37001:2016



Gambar 3.11  
Komitmen Kebijakan Anti Penyusapan dan Pakta Integritas

## H. Penghargaan Atas Kinerja

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendukung capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR. Komitmen terhadap peningkatan capaian kinerja oleh seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menghasilkan penghargaan berupa :

1. Penghargaan Kepada Satker Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai Juara III Satuan Kerja Terbaik Bidang Pengelola BMN Satker Kategori A pada Peringatan Hari Bakti PU ke-79 yang diberikan pada 3 Desember 2024



**Gambar 3.12**  
**Sertifikat Penghargaan BMN**

2. Penetapan Anti Penyipuan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui SNI ISO 37001:2016 pada tanggal 28 November 2024



**Gambar 3.13**  
**Sertifikat SNI ISO 37001:2016**

# BAB IV

## PENUTUP

### A. Simpulan Umum

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama tahun 2024 telah melaksanakan pekerjaan dengan cukup baik. Adapun hal-hal yang mendukung capaian kinerja adalah:

1. Unit bagian yang mendukung di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari 3 bagian yaitu (1) Bagian Perencanaan, Program dan keuangan, (2) Bagian Kepegawaian dan Umum, dan (3) Bagian Hukum dan Komunikasi Publik.
2. Total pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah 126 orang pegawai yang terdiri dari 55 orang PNS, 5 orang PPPK, 50 orang Pegawai Honorer/PPNPN dan 16 orang Pegawai Konsultan Individu.
3. Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024 sebesar 99,96% yang mana lebih tinggi dibandingkan target tahun 2024 maupun capaian tahun 2023 (ditampilkan pada tabel 4.1).

**Tabel 4.1**  
Capaian Kinerja berdasarkan Target Rencana Strategis dan Target Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Renstra 2024 (%)	Target PK 2024 (Baseline) (%)	Realisasi 2024 (%)	Kinerja Terhadap PK (%)
<b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>					
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					
<b>SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	<b>99,37</b>	<b>94,58</b>	<b>99,37</b>	<b>99,96</b>	
<b>Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,59</b>	
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	16,13	15,00	15,00	14,96	99,73%
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00%
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	10,00	15,00	15,00	15,34	102,27%
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	15,00	15,00	15,00	15,43	102,85%
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	18,75	15,00	15,00	14,50	96,65%
IKK. Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang Modern, Terpadu dan Berorientasi Publik	10,00	15,00	15,00	15,24	101,58%
IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi	-	10,00	10,00	10,13	101,30%

Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2024 adalah 99,96% dengan kinerja terhadap target Rencana Strategi mencapai 105,69% (kinerja dihitung dari perbandingan antara realisasi terhadap target) dan kinerja terhadap target Perjanjian Kinerja mencapai 100,59%. Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024, target tahun 2024 adalah 94,58, namun berdasarkan Perjanjian Kinerja, target sebesar 99,37. Hal ini dikarenakan target pada Perjanjian Kinerja berdasarkan pada baseline (capaian) pada tahun 2023.

4. Realisasi keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 95,52% atau senilai Rp81.996.774.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp84.164.426.000,00. Terdapat pula anggaran sebesar Rp97.615.000,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang di blokir untuk optimalisasi anggaran Perjalanan Dinas sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 perihal Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA. 2024 tanggal 7 November 2024. Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tanpa blokir sebesar Rp85.747.091.000,00 sehingga persentase realisasi adalah 95,63%. Adapun realisasi pada setiap Rincian Output ditampilkan pada Tabel 4.2. berikut.

**Tabel 4.2**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2024**

*(Status iemonitoring PUPR tanggal 6 Januari 2025)*

Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu	Realisasi	Keuangan		Fisik		
			(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL	RN	RL	Kinerja
<b>Program Dukungan Manajemen</b>									
<b>Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>			<b>85.844.706</b>	<b>81.996.774</b>	<b>100</b>	<b>95,75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Layanan Dukungan Manajemen Internal	7	Layanan/Laporan /Dokumen	78.741.705	75.051.498	100	95,58	100	100	100
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6	Unit/m2/Paket	3.166.799	3.123.245	100	98,62	100	100	100
Layanan Manajemen SDM Internal	422	Orang/Layanan	1.669.699	1.666.301	100	99,80	100	100	100
Layanan Manajemen Kinerja Internal	10	Layanan/Laporan /Dokumen	2.266.503	2.155.730	100	95,11	100	100	100

5. Nilai efisiensi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah 104,44.

## **B. Faktor Pendukung Keberhasilan**

Selama tahun anggaran 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah mengalami 6 kali perubahan anggaran untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja. Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah :

### **Faktor Eksternal**

- Meningkatnya kepercayaan dari masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui branding yang dilakukan secara online maupun offline;

- Kerjasama dari seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pelaksanaan dan layanan dukungan manajemen.

#### **Faktor Internal**

- Komitmen dari tingkat pimpinan hingga staf dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun;
- Penerapan SOP (*Standart Operating Procedures*) dalam pelayanan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
- Pelaksanaan monitoring berkala sebagai bentuk preventif terhadap kendala dan permasalahan yang terjadi.

Adapun beberapa faktor yang menghambatnya pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah :

- Restrukturisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sedikit banyak memberikan dampak terhadap pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan rutin yang dilaksanakan sehingga terdapat beberapa output yang belum dapat terselesaikan pada tahun 2024;
- Urgensi pelaksanaan kegiatan yang diluar rencana membutuhkan penyesuaian dan memberikan dampak pada tugas utama yang ada di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

### **C. Permasalahan**

Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai berikut:

1. Reorganisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat yang menyebabkan beberapa hal berikut:
  - Beberapa pelaksanaan kegiatan yang tertunda dan penyesuaian kembali;
  - Adanya penyesuaian terhadap Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kegiatan;
  - Penyesuaian pada produk hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang menunggu Peraturan Presiden dan SOTK terbaru; dan
  - Penyesuaian RKA-KL Tahun 2025 akibat dari restrukturisasi Kementerian/Lembaga;
2. Penyesuaian materi dan narasumber pada pelaksanaan kegiatan podcast menyebabkan keterlambatan pelaksanaan rekaman dan penayangan podcast pada kanal youtube Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
3. Kendala pada beberapa dashboard yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan akibat dari penyerangan Pusat Data Nasional yang menyebabkan :
  - Dashboard layanan penanganan pengaduan masyarakat DJPI tidak dapat beroperasi sementara waktu;
  - Sistem pertata naskah dinas yang tidak dapat diakses;
  - Terlambatnya penilaian SKP Triwulan II dan penyusunan SKP Triwulan III;
  - Updating pelaksanaan anggaran mengalami keterlambatan karena Sinkronisasi data antara Sakti dan iemonitoring tidak dapat dilakukan secara otomatis; dan
  - Beberapa dashboard lain juga tidak dapat diakses sementara waktu;

4. Belum terdapat standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sehingga belum dapat dilakukan uji kompetensi untuk kenaikan pangkat;
5. Perubahan jadwal pelaksanaan beberapa kegiatan dikarenakan adanya perubahan prioritas dan adanya efisiensi anggaran yang terjadi pada kegiatan Bincang Risiko dan CreatIFF dimana pelaksanaan kegiatan CreatIFF menjadi dilaksanakan pada awal tahun 2025;
6. Pelaksanaan belanja modal yang dilaksanakan pada akhir Triwulan III dan Triwulan IV yang berpotensi untuk tidak dapat dilakukan pencatatan dan Penetapan Status Pengguna di tahun 2024; dan
7. Penyelesaian dan tindak lanjut terhadap temuan eks BLU PPDPP sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal berupa penyelesaian dilakukan oleh BP Tapera.

#### **D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

Berdasarkan kepada kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 dan menghadapi beberapa kendala/permasalahan yang terjadi selama tahun anggaran 2024, maka dapat diberikan beberapa rekomendasi dan Tindak Lanjut berupa:

1. Melakukan dan terus meningkatkan fungsi pelayanan terhadap seluruh unsur di Direktorat Jenderal dengan baik;
2. Menerapkan budaya dialog kinerja antara pimpinan dan staf/pegawai sebagai wujud komunikasi dan komitmen terhadap pengelolaan kinerja dan kegiatan guna mencapai output sesuai dengan rencana;
3. Koordinasi dengan satuan kerja, unit kerja, unit organisasi dan/atau kementerian/Lembaga lainnya dalam memaksimalkan pencapaian kinerja;
4. Review dan revisi dokumen perencanaan (Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja) sesuai dengan perubahan dan dinamika selama tahun berjalan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
5. Memaksimalkan penyelesaian dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait;
6. Merencanakan pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya sebaik mungkin dengan mengacu pada pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun berjalan/sebelumnya;
7. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun untuk meminimalisir adanya revisi selama pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan;
8. Segera menyelesaikan dan menyusun standar kompetensi untuk Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
9. Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran;
10. Menyelesaikan dan memaksimalkan pengadaan dan belanja modal sebelum Triwulan II berakhir;
11. Menyiapkan mitigasi untuk menghindari terjadinya kembali temuan BPK;
12. Lebih memperhatikan dan memonitoring pengajuan penambahan kegiatan maupun anggaran agar tidak mengakibatkan banyaknya revisi anggaran sepanjang tahun;
13. Meningkatkan kesadaran pegawai dalam penyusunan dan penilaian kinerja pegawai tepat waktu melalui sosialisasi dan pemberitahuan rutin dengan surat;
14. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi terkait edukasi Pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui media sosial dan media publikasi elektronik.

---

# **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja
2. Data Pegawai
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
  - DIPA Awal
  - DIPA Revisi ke-3
  - DIPA Revisi ke-5
  - DIPA Revisi ke-6
  - DIPA Revisi ke-7
  - DIPA Revisi ke-8
  - DIPA Revisi ke-9
4. Nota Dinas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja
6. Dokumentasi Kegiatan

## LAMPIRAN 1 Perjanjian Kinerja



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sudiro Roi Santoso**  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**  
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

**SUDIRO ROI SANTOSO**

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR (1)	TARGET (2)
<b>SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>	
<b>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>	
<b>SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	
<b>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	<b>20%</b>
EBA.956 Layanan Barang Milik Negara	1 Layanan
EBA.962 Layanan Umum	1 Layanan
EBA.994 Layanan Parkiran	1 Layanan
EBB.951 Layanan Sarana Internal	2 Unit
EBB.971 Layanan Prasana Internal	2 Unit
<b>IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	<b>15%</b>
EBA.957 Layanan Hukum	1 Layanan
EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan
<b>IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	<b>20%</b>
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3 Layanan
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	260 Orang
<b>IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	<b>15%</b>
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3 Dokumen
<b>IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	<b>15%</b>
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4 Dokumen
<b>IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik</b>	<b>15%</b>
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan

**KEGIATAN**

Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

**ANGGARAN**

Rp6.320.590.000,00

JAKARTA, 5 JANUARI 2024

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

**HERRY TRISAPUTRA ZUNA**

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

**SUDIRO ROI SANTOSO**

REVISI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sudiro Roi Santoso**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua

  
**TRIONO JUNOASMONO**

Pihak Pertama

  
**SUDIRO ROI SANTOSO**

REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR (1)	TARGET (2)
<b>SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>	
<b>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>	
<b>SK. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	
<b>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan</b>	<b>15%</b>
EBA.956 Layanan Sarang Milik Negara	1 Layanan
EBA.962 Layanan Umum	1 Layanan
EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan
EBB.951 Layanan Sarana Internal	2 Unit
EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2 Unit
<b>IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum</b>	<b>15%</b>
EBA.957 Layanan Hukum	1 Layanan
EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan
<b>IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai</b>	<b>15%</b>
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan
EBK.994 Layanan Manajemen SDM	260 Orang
<b>IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran</b>	<b>15%</b>
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3 Dokumen
<b>IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran</b>	<b>15%</b>
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4 Dokumen
<b>IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik</b>	<b>15%</b>
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan
<b>IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi</b>	<b>10%</b>

KEGIATAN

Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp67.991.513.000,00

JAKARTA, 31 JULI 2024

DIREKTUR JENDERAL  
 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

**TRIONO JUNOASMONO**

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

**SUDIRO ROI SANTOSO**

REVISI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Renih Ahiantini**  
 Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**  
 Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua

**TRIONO JUNOASMONO**

Pihak Pertama

**RENI AHIANINI**

REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
<b>SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>	
<b>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>	
<b>SK. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	
<b>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan</b>	<b>15%</b>
EBA.956 Layanan Barang Milik Negara	1 Layanan
EBA.962 Layanan Umum	1 Layanan
EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan
EBB.951 Layanan Saranis Internal	3 Unit
EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2 Unit
<b>IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum</b>	<b>15%</b>
EBA.957 Layanan Hukum	1 Layanan
EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan
<b>IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pungadministrasian Pegawai</b>	<b>15%</b>
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	422 Orang
<b>IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran</b>	<b>15%</b>
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3 Dokumen
<b>IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran</b>	<b>15%</b>
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4 Dokumen
<b>IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik</b>	<b>15%</b>
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan
<b>IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi</b>	<b>10%</b>

**KEGIATAN**

Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

**ANGGARAN**

Rp85.104.426.000,00

JAKARTA, 1 OKTOBER 2024

**DIREKTUR JENDERAL  
 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

**TRIONO JUNOASMONO**

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

**RENI AHIANINI**



**LAMPIRAN 2**  
**Data Pegawai**

**Pegawai Negeri Sipil**

NO.	NAMA	JABATAN
1	Dr. Triono Junoasmono S.T., M.T.	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan
2	Reni Ahiantini S.T., M.Sc.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan
3	Sudiro Roi Santoso S.T., M.T.	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Madya
<b>Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan</b>		
4	Desy Nina Wulandari S.E., M.T.	Kepala Bagian Perencanaan, Program, Dan Keuangan
5	Nila Kusumastuti, SE	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
6	Bayu Kusuma Dwi Chandra Sarie S.T., M.Si.	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Madya
7	Rahmawati Waluyaningsih, S.Kom, MM	Analisis Anggaran Ahli Muda
8	Handini Lestari S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Madya
9	Sukirno, S.Ipem	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda
10	Joko Tri Kusnanto S.T.	Analisis Anggaran Ahli Muda
11	Puteri Rizqi Amelia, ST	Perencana Ahli Pertama
12	Rindy Roosmala Prameswari, S.ST	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama
13	Wirawan Widiyanto ST	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama
14	Karina Apriani S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
15	Lucky Astri Fitriana SE	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama
16	Sumardi, SE	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ahli Muda
17	Gede Yoga Mahendra, SE	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ahli Muda
18	Diana Suryana Putra, S.AP	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda
19	Lutfia Herawati, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan Apbn Ahli Muda
20	Nurul Fauzia S.Kom., M.M.	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda
21	Muhammad Hammami, A.Md.Ak	Pengelola Keuangan
22	Denia Khaerunissa, A.Md.Ak	Pengelola Keuangan
23	Catur Budi Satriawan, S.E.	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ahli Muda
24	Eka Nisfiasari, S.E.	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ahli Muda

NO.	NAMA	JABATAN
24	Shanti Sujitno S.E.	Analisis Keuangan
25	Ni Putu Intan Ade Liana, A.P.Kb.N	Pengelola Keuangan
26	Sardi	Pengadministrasi Umum
27	Fikri Nuru Jaman, SE	Karya Siswa
<b>Bagian Kepegawaian dan Umum</b>		
28	Bambang Adhityo S.E., M.M.	Kepala Bagian Kepegawaian Dan Umum
29	Aisah Dewi Setiawaty S.T., M.Si.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya
30	Jaffri, S.Kom, M.Si	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
31	Ni Wayan Sumila Dewi, S.Sos, M. Ak	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
32	Mendung Sunarno, S. AP	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
33	Fitriana Ayu Ningrum, SH	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
34	Rio Febrianto Moroisa, S. Kom	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ahli Muda
35	Devy Loviardi, S.T, M.Si	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ahli Muda
36	Setyo Tri Handoko Lindyaspupro S.Sos	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda
38	Iin Imania, SE	Arsiparis Ahli Muda
40	Ahmad Muhajir S.E., S.T.	Arsiparis Ahli Muda
42	Tatang Rasydin, S.AP	Arsiparis Ahli Muda
43	Arif Harsa Pradipta, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
44	Adi Pratomo S.A.P.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
45	Andreas Syahputra Sinurat S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama
46	Rifki Maudianda S.E., M.B.A.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
47	Galuh Aulia Alfath S.Ikom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
48	Romlih	Pengadministrasi Umum
49	Kasno	Teknisi Mesin
<b>Bagian Hukum dan Komunikasi Publik</b>		
50	Anggoro Widyastika S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum Dan Komunikasi Publik
51	Putrawan, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
52	Fenty Meilisya Syafril S.Sos, M.Si	Pranata Humas Ahli Muda

NO.	NAMA	JABATAN
53	Siska Purnianti S.H., M.Hum.	Analisis Advokasi Hukum
54	Yudhistira Adi Nugroho, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama
55	Ruby Esti Aprillia, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Pertama
55	Mifta Fadya S.Tr.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
56	Antonius Simbolon S.E., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
57	Sri Rahmi Purnamasari, S.Ikom	Pranata Humas Ahli Muda
58	Rahaju Sutjipta, S.Sos	Pranata Humas Ahli Muda

### Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

NO.	NAMA	JABATAN
<b>Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan</b>		
1	Mohamad Iqbal, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
<b>Bagian Kepegawaian dan Umum</b>		
2	Iva Parikhah S.Kom.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
<b>Bagian Hukum dan Komunikasi Publik</b>		
3	Mahesa Lintang Wicaksana S.I.Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
4	Adam Ramadhan S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama
5	Imam Syahid Izzatur Rahim, A.Md	Terampil - Pranata Hubungan Masyarakat

### Pegawai Honorer

NO.	NAMA	JABATAN
1	Dwi Cristianto	Pengadministrasi Umum
2	Shara Vadya, S.I.Kom	Penelaah Pelayanan Informasi Publik
3	Insan Hermawanto, SAP	Penelaah Kebijakan
4	Dony Triastomo, SE	Penelaah Kebijakan
5	Andi	Pengadministrasi Umum
6	Michael Adha	Pengadministrasi Umum
7	Komarudin	Pengadministrasi Umum
8	Edi Prastiyo, S.Kom	Analisis Sistem Informasi Manajemen
9	Putri Asiah	Pengadministrasi Umum
10	Agus Nurzaman	Pramubakti

NO.	NAMA	JABATAN
11	Jemi Mujamil Sodik	Pramubakti
12	Haryunta Rizky Pratama, SE	Penelaah Tata Naskah Dinas
13	M.Mahput Anwar	Pengemudi Pimpinan
14	Puji Anisa	Pramubakti
15	Ruri Rumita Maizar, S.Psi	Penelaah Tata Naskah Dinas
16	Muhammad Jaya AW, SE	Penelaah Keuangan
17	Azis Ketut Ontoseno	Pengemudi Non Pimpinan
18	Gilang Bayu Perdana, S.Kom, M.M.S.I	Analisis Sistem Informasi Manajemen
19	Munawir	Pramubakti
20	Riki Salman Mubaroq	Pelaksana Urusan Kerumahtanggaan TUP
21	Muhamad Muklis, SE	Penelaah Tata Naskah Dinas
22	Khoirul Anwar, S.Sos.I	Penelaah Tata Naskah Dinas
23	Warih	Pramubakti
24	Isam Purbaya, A.Md	Pengolah Data dan Informasi
25	Andi Achmad	Pengemudi Non Pimpinan
26	Rojak	Pramubakti
27	Hari Roberto	Pelaksana Urusan Kerumahtanggaan TUP
28	Irwan Munandar	Petugas Keamanan
29	Kartoyo	Pengemudi Non Pimpinan
30	Kosim Miharja	Pramubakti
31	Halimahtus Sadiah	Pengadministrasi Umum
32	Yoestika Daroe Laksana Putra	Petugas Keamanan
33	Sartini, SE	Penelaah Tata Naskah Dinas
34	Sobirin	Pelaksana Urusan Kerumahtanggaan TUP
35	Suryanah, S.Pd.	Penelaah Tata Naskah Dinas
36	Mohammad Fazri	Petugas Keamanan
37	Marahalim	Pramubakti
38	Jumadi	Pelaksana Urusan Kerumahtanggaan TUP
39	Marlinah	Pengadministrasi Umum
40	Budianto, SE	Penelaah Keuangan
41	Tatang	Petugas Teknik

NO.	NAMA	JABATAN
42	Suroto	Petugas Teknik
43	Haqqi Harisina, S.Kom	Analisis Sistem Informasi Manajemen
44	Denny Darmawan	Pengadministrasi Umum
45	Erwin, SP	Penyusun Program dan Rencana Anggaran
46	Nurmawati	Pengadministrasi Umum
47	Rahmatullah, A.Md	Penata Keuangan
48	Yudhantoro, S.Pt, M.Pd	Penelaah Tata Naskah Dinas
49	Haerul Anwar, SAP	Penyusun Monev dan Pelaporan
50	Endang Rusmaya	Pengadministrasi Umum

### Konsultan Individu

NO.	NAMA
1	KURTUBI, ST
2	DIANE KHATRIN TRI ASIH, SE
3	DIDIK PRAMONO, S.PD
4	SINGGIH ZATOMI, SH
5	MAISARA HUMAIRA YANDARI, ST
6	Arfan Haras, S.PI, MM
7	DISA TAFIRA RAIMALDA, SH
8	SOPAN SOPIAN, S.Sn
9	FAHMI NURHUDA, S.Ds
10	ADZRA VABIAN PURWANTI, S.Ikom
11	SALSABILA TAPALONA
12	SRI ANDRIYANI, SH, M.Si
13	Lukky Aprinaldi
14	KHOIRUL MU'MININ, S.Tr.T
15	SUNARDI
16	AFANDI

**LAMPIRAN 3**  
**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**NOMOR : SP DIPA-033.16-0/2024**



DS-2004-5003-7496-6001

**A. DASAR HUKUM :**

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

**B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :**

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  |
| 2. UNIT ORGANISASI             | : | 033.16 Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  |
| 3. PAGU                        | : | Rp.160.758.779.000<br>(SERATUS ENAM PULUH MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) |

**C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :**

1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.



\*Dokumen ini telah di tandatangi menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN



ISA RACHMATARWATA  
NIP.196612301991021001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA-033.16-0/2024**



DS:2004-5003-7496-6001

**I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM**

Halaman : 1 dari 3

**A. IDENTITAS UNIT :**

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	: 033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. UNIT ORGANISASI	: 16	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. PAGU	: Rp.160.758.779.000	(SERATUS ENAM PULUH MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

**B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :**

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	: 033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.232.000
	: 033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	131.526.779
2. SASARAN STRATEGIS K/L	: 01	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	
	: 02	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	
	: 03	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	
	: 04	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	
	: 05	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
3. FUNGSI	: 04	EKONOMI	131.526.779
SUB FUNGSI	: 0490	EKONOMI LAINNYA	131.526.779
FUNGSI	: 06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	29.232.000
SUB FUNGSI	: 0690	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	29.232.000
4. PRIORITAS NASIONAL	: 05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	16.000.000
NON PRIORITAS NASIONAL	:		144.758.779



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA-033.16-0/2024**



DS:2004-5003-7496-6001

**I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM**

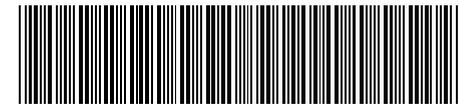
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		29.232.000
SP01	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
IKP01	Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100 %	
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan		29.232.000
01.01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100 %	
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen		131.526.779
SP01	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKP08	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100 %	
IKP09	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	84,12 %	
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		71.920.590
01.01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	20 %	
01.02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15 %	
01.03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	20 %	
01.04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15 %	
01.05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15 %	
01.06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	15 %	
01.07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP	0 %	
01.08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP	0 %	



**DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA-033.16-0/2024**



DS:2004-5003-7496-6001

**I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM**

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan		10.500.000
01.01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100 %	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		49.106.189
01.01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25 %	
01.02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25 %	
01.03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25 %	
01.04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25 %	

**KETENTUAN**

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

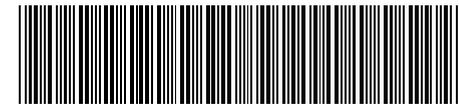
Jakarta, 24 November 2023  
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
SEKRETARIS JENDERAL



Mohammad Zainal Fatah  
NIP 196610211996031001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA-033.16-0/2024



DS:2004-5003-7496-6001

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
2. UNIT ORGANISASI : 033.16 Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
3. PAGU : Rp.160.758.779.000  
(SERATUS ENAM PULUH MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI 51	BARANG 52	MODAL 53	BANTUAN SOSIAL 57		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		0	29.232.000	0	0	29.232.000	4.000.000
	01	DKI JAKARTA		0	29.232.000	0	0	29.232.000	4.000.000
	631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	KP	0	29.232.000	0	0	29.232.000	4.000.000
	A00	RM		0	29.232.000	0	0	29.232.000	4.000.000
	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen		34.260.590	95.756.189	1.510.000	0	131.526.779	2.370.120
	01	DKI JAKARTA		34.260.590	95.756.189	1.510.000	0	131.526.779	2.370.120
	631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	KP	34.260.590	95.756.189	1.510.000	0	131.526.779	2.370.120
	A00	RM		34.260.590	95.756.189	1.510.000	0	131.526.779	2.370.120
		TOTAL		34.260.590	124.988.189	1.510.000	0	160.758.779	6.370.120
		RM		34.260.590	124.988.189	1.510.000	0	160.758.779	6.370.120
		PENDAPATAN						0	

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 24 November 2023  
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
SEKRETARIS JENDERAL



Mohammad Zainal Fatah  
NIP 196610211996031001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA-033.16-0/2024**



DS:2004-5003-7496-6001

**III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**

**A. IDENTITAS UNIT :**

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
2. UNIT ORGANISASI : 033.16 Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
3. PAGU : Rp.160.758.779.000  
(SERATUS ENAM PULUH MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

**B. RENCANA PER PROGRAM**

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN PROGRAM	PAGU	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman													
		RENCANA PENARIKAN DANA	29.232.000	65.230	437.306	1.081.189	1.047.159	1.169.280	2.338.560	2.338.560	2.630.880	1.811.738	6.080.898	7.308.000	2.923.200
2	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen													
		RENCANA PENARIKAN DANA	131.526.779	2.495.848	5.478.153	7.403.689	9.823.756	8.318.133	12.136.702	10.785.616	11.136.170	13.813.782	16.891.114	18.825.455	14.418.362
		<b>TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA</b>	<b>160.758.779</b>	<b>2.561.078</b>	<b>5.915.459</b>	<b>8.484.878</b>	<b>10.870.915</b>	<b>9.487.413</b>	<b>14.475.262</b>	<b>13.124.176</b>	<b>13.767.050</b>	<b>15.625.520</b>	<b>22.972.012</b>	<b>26.133.455</b>	<b>17.341.562</b>
		<b>TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jakarta, 24 November 2023  
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
SEKRETARIS JENDERAL



Mohammad Zainal Fatah  
NIP 196610211996031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2024**



DS:3001-0600-3155-7949

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

**Revisi ke 03**

Tanggal : 02 Mei 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- Sebesar : Rp. 160.758.779.000 ( SERATUS ENAM PULUH MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

**Terlampir**

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	160.758.779.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN JAKARTA V (139) Rp. 160.758.779.000

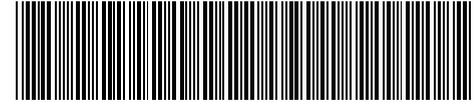
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024**



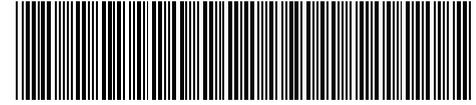
DS:3001-0600-3155-7949

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

---

04	EKONOMI	Rp.	131.526.779.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	131.526.779.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	29.232.000.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	29.232.000.000

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024**



DS:3001-0600-3155-7949

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	29.232.000.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	29.232.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	131.526.779.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	71.970.590.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	11.700.000.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	47.856.189.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			29.232.000.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan			29.232.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.512.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.00	Rekomendasi Kebijakan	5.512.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.000.000.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.720.000.000
Rincian Output	:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.00	Dokumen	6.720.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi	3,00	kegiatan	5.000.000.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	2.00	kegiatan	3.000.000.000
	:	02 PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan (PN)	1.00	kegiatan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	7.000.000.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1.00	layanan	4.500.000.000
	:	02 QAH.002	Fasilitas Mikro Kredit Perumahan (PN)	1.00	layanan	2.500.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	100,00	Rumah Tangga	4.000.000.000
Rincian Output		:	01	QFC.001 Mikro Kredit Perumahan (PN)	100.00	Rumah Tangga	4.000.000.000
Program		:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			131.526.779.000
Kegiatan		:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			71.970.590.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
			7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
			8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	66.937.990.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	540.000.000
			02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	650.000.000
			03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	1.627.400.000
			04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	570.000.000
			05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	600.000.000
			06	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	30.000.000
			07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	62.920.590.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,00	Unit, m2, Paket	2.000.000.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	2,00	Unit	500.000.000
		:	02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2,00	Unit	1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	260,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	610.000.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	260,00	Orang	610.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.422.600.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4,00	Dokumen	1.182.600.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,00	Dokumen	660.000.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3,00	Dokumen	580.000.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			11.700.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.751.000.000
Rincian Output		:	01	ABF.002 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	Rekomendasi Kebijakan	6.501.000.000
		:	02	ABF.003 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.879.000.000
Rincian Output		:	01	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	4,00	Layanan	1.879.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.070.000.000
Rincian Output		:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	720.000.000
		:	02 EBD.965	Layanan Audit Internal	3.00	Dokumen	1.350.000.000
Kegiatan		:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			47.856.189.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
		:	2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
		:	3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
		:	4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	8	:	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	20,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	26.784.622.000
Rincian Output		:	01 ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		:	02 ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.490.000.000
		:	03 ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.126.280.000
		:	04 ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
		:	05 ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	922.400.000
		:	06 ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000.000
		:	07 ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.791.789.000
		:	08 ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Rekomendasi Kebijakan	2.168.153.000
		:	09 ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.800.000.000
		:	10 ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.146.000.000
		:	11 ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	900.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 5

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana

Rekomendasi Kebijakan, Kajian

	12	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.200.000.000	
	13	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.540.000.000	
Klasifikasi Rincian Output 9	:	4197.AEE	Kemitraan	12,00	Kesepakatan	12.416.809.000	
Rincian Output	:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.423.720.000
		02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.562.000.000
		03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.431.089.000
		04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	4.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 10	:	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	2.679.000.000	
Rincian Output	:	01	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	1.479.000.000
		02	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	700.000.000
		03	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 11	:	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	26,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.975.758.000	
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	26.00	Dokumen	5.975.758.000

Jakarta, 24 November 2023  
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.  
Mohammad Zainal Fatah  
NIP 196610211996031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2024**



DS:4089-7103-4505-5819

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

**Revisi ke 05**

Tanggal : 16 Juli 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- Sebesar : Rp. 160.758.779.000 ( SERATUS ENAM PULUH MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

**Terlampir**

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	160.758.779.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN JAKARTA V (139) Rp. 160.758.779.000

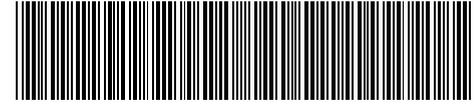
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024**



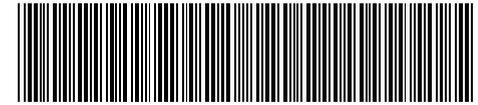
DS:4089-7103-4505-5819

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

---

04	EKONOMI	Rp.	131.668.425.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	131.668.425.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	29.090.354.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	29.090.354.000

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024**



DS:4089-7103-4505-5819

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	29.090.354.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	29.090.354.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	131.668.425.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	72.991.513.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	11.700.000.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	46.976.912.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4089-7103-4505-5819

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			29.090.354.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan			29.090.354.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.512.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.00	Rekomendasi Kebijakan	5.512.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.000.000.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.578.354.000
Rincian Output	:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.00	Dokumen	6.578.354.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi	3,00	kegiatan	5.000.000.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	2.00	kegiatan	3.000.000.000
Rincian Output	:	02 PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan (PN)	1.00	kegiatan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	7.000.000.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1.00	layanan	4.500.000.000
Rincian Output	:	02 QAH.002	Fasilitas Mikro Kredit Perumahan (PN)	1.00	layanan	2.500.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4089-7103-4505-5819

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	6	: 4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	100,00	Rumah Tangga	4.000.000.000
Rincian Output		: 01	QFC.001 Mikro Kredit Perumahan (PN)	100.00	Rumah Tangga	4.000.000.000
Program		: 033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			131.668.425.000
Kegiatan		: 4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			72.991.513.000
Indikator Kinerja Kegiatan		: 1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
		7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
		8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output	1	: 4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	68.132.970.000
Rincian Output		: 01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	686.734.000
		02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	547.813.000
		03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	1.334.800.000
		04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	641.320.000
		05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	600.000.000
		06	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	30.000.000
		07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	64.292.303.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4089-7103-4505-5819

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,00	Unit, m2, Paket	2.000.000.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	2,00	Unit	591.680.000
		:	02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2,00	Unit	1.408.320.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	260,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	679.411.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	260,00	Orang	679.411.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.179.132.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4,00	Dokumen	1.033.207.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,00	Dokumen	618.425.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3,00	Dokumen	527.500.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			11.700.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.751.000.000
Rincian Output		:	01	ABF.002 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	Rekomendasi Kebijakan	6.501.000.000
		:	02	ABF.003 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.879.000.000
Rincian Output		:	01	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	4,00	Layanan	1.879.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



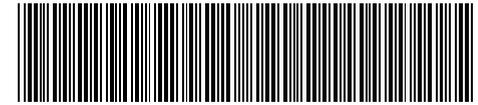
DS:4089-7103-4505-5819

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.070.000.000
Rincian Output		:	01	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	720.000.000
		:	02	EBD.965 Layanan Audit Internal	3.00	Dokumen	1.350.000.000
Kegiatan		:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			46.976.912.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
		:	2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
		:	3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
		:	4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	8	:	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	21,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	25.554.555.000
Rincian Output		:	01	ABF.001 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		:	02	ABF.002 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.490.000.000
		:	03	ABF.003 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.126.280.000
		:	04	ABF.004 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
		:	05	ABF.005 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.051.785.000
		:	06	ABF.007 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	3.479.351.000
		:	07	ABF.008 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.413.466.000
		:	08	ABF.009 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Rekomendasi Kebijakan	2.168.153.000
		:	09	ABF.011 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.339.520.000
		:	10	ABF.012 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.146.000.000
		:	11	ABF.013 Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	900.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4089-7103-4505-5819

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 5

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				Rekomendasi Kebijakan, Kajian		
	12	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.200.000.000
	13	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.540.000.000
Klasifikasi Rincian Output	9	4197.AEE	Kemitraan	12,00	Kesepakatan	12.467.809.000
Rincian Output	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.423.720.000
	02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.613.000.000
	03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.431.089.000
	04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	4.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	2.978.790.000
Rincian Output	01	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	1.778.790.000
	02	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	700.000.000
	03	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	11	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	26,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.975.758.000
Rincian Output	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	26.00	Dokumen	5.975.758.000

Jakarta, 24 November 2023  
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.  
Mohammad Zainal Fatah  
NIP 196610211996031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2024**



DS:4011-4043-4168-2192

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

**Revisi ke 06**

Tanggal : 09 Agustus 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- Sebesar : Rp. 172.031.802.000 ( SERATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR TIGA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

**Terlampir**

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	172.031.802.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN JAKARTA V (139) Rp. 172.031.802.000

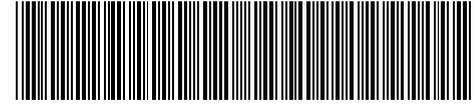
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024**



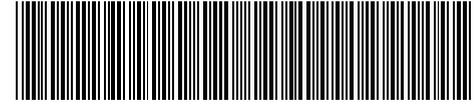
DS:4011-4043-4168-2192

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

---

04	EKONOMI	Rp.	142.941.448.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	142.941.448.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	29.090.354.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	29.090.354.000

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024**



DS:4011-4043-4168-2192

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	29.090.354.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	29.090.354.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	142.941.448.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	84.264.536.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	11.700.000.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	46.976.912.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



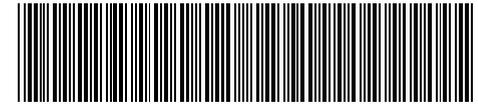
DS:4011-4043-4168-2192

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			29.090.354.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan			29.090.354.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.512.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.00	Rekomendasi Kebijakan	5.512.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.000.000.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.578.354.000
Rincian Output	:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.00	Dokumen	6.578.354.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi	3,00	kegiatan	5.000.000.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	2.00	kegiatan	3.000.000.000
Rincian Output	:	02 PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan (PN)	1.00	kegiatan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	7.000.000.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1.00	layanan	4.500.000.000
Rincian Output	:	02 QAH.002	Fasilitas Mikro Kredit Perumahan (PN)	1.00	layanan	2.500.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



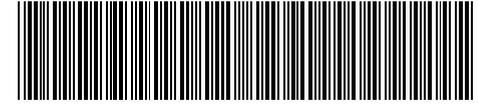
DS:4011-4043-4168-2192

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	100,00	Rumah Tangga	4.000.000.000
Rincian Output		:	01	QFC.001 Mikro Kredit Perumahan (PN)	100.00	Rumah Tangga	4.000.000.000
Program		:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			142.941.448.000
Kegiatan		:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			84.264.536.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
			7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
			8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	79.405.993.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	686.734.000
			02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	547.813.000
			03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	1.334.800.000
			04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	641.320.000
			05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	600.000.000
			06	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	30.000.000
			07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	75.565.326.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4011-4043-4168-2192

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,00	Unit, m2, Paket	2.000.000.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	2,00	Unit	591.680.000
		:	02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2,00	Unit	1.408.320.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	260,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	679.411.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	260,00	Orang	679.411.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.179.132.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4,00	Dokumen	1.033.207.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,00	Dokumen	618.425.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3,00	Dokumen	527.500.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			11.700.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.751.000.000
Rincian Output		:	01	ABF.002 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	Rekomendasi Kebijakan	6.501.000.000
		:	02	ABF.003 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.879.000.000
Rincian Output		:	01	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	4,00	Layanan	1.879.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



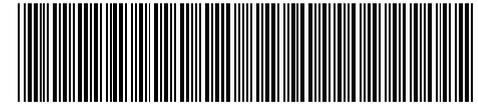
DS:4011-4043-4168-2192

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.070.000.000
Rincian Output		:	01	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	720.000.000
		:	02	EBD.965 Layanan Audit Internal	3.00	Dokumen	1.350.000.000
Kegiatan		:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			46.976.912.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
		:	2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
		:	3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
		:	4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	8	:	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	21,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	25.554.555.000
Rincian Output		:	01	ABF.001 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		:	02	ABF.002 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.490.000.000
		:	03	ABF.003 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.126.280.000
		:	04	ABF.004 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
		:	05	ABF.005 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.051.785.000
		:	06	ABF.007 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	3.479.351.000
		:	07	ABF.008 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.413.466.000
		:	08	ABF.009 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Rekomendasi Kebijakan	2.168.153.000
		:	09	ABF.011 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.339.520.000
		:	10	ABF.012 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.146.000.000
		:	11	ABF.013 Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	900.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4011-4043-4168-2192

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 5

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana

Rekomendasi Kebijakan, Kajian

	12	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.200.000.000
	13	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.540.000.000

Klasifikasi Rincian Output	9	4197.AEE	Kemitraan	10,00	Kesepakatan	12.067.809.000
Rincian Output	:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan		2.00 Kesepakatan 3.023.720.000
		02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan		2.00 Kesepakatan 2.613.000.000
		03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan		2.00 Kesepakatan 2.431.089.000
		04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan		4.00 Kesepakatan 4.000.000.000

Klasifikasi Rincian Output	10	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	3.378.790.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		1.00 NSPK 400.000.000
		02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		1.00 NSPK 1.778.790.000
		03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		1.00 NSPK 700.000.000
		04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan		1.00 NSPK 500.000.000

Klasifikasi Rincian Output	11	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	26,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.975.758.000
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		26.00 Dokumen 5.975.758.000

Jakarta, 24 November 2023  
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.  
Mohammad Zainal Fatah  
NIP 196610211996031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2024**



DS:1479-7849-2623-3142

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

**Revisi ke 07**

Tanggal : 22 Agustus 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- Sebesar : Rp. 172.031.802.000 ( SERATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR TIGA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

**Terlampir**

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	172.031.802.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN JAKARTA V (139) Rp. 172.031.802.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024**



DS:1479-7849-2623-3142

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

---

04	EKONOMI	Rp.	146.941.448.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	146.941.448.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	25.090.354.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	25.090.354.000

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024**



DS:1479-7849-2623-3142

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	25.090.354.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	25.090.354.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	146.941.448.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	89.164.426.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	11.400.110.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	46.376.912.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



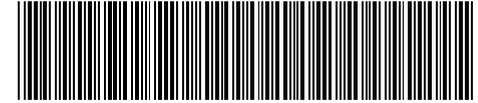
DS:1479-7849-2623-3142

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			25.090.354.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan			25.090.354.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.512.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.00	Rekomendasi Kebijakan	5.512.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.000.000.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.578.354.000
Rincian Output	:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.00	Dokumen	6.578.354.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi	3,00	kegiatan	5.000.000.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	2.00	kegiatan	3.000.000.000
Rincian Output	:	02 PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan (PN)	1.00	kegiatan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	7.000.000.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1.00	layanan	4.500.000.000
Rincian Output	:	02 QAH.002	Fasilitas Mikro Kredit Perumahan (PN)	1.00	layanan	2.500.000.000
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			146.941.448.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1479-7849-2623-3142

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			89.164.426.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
		7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
		8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	83.405.993.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	686.734.000
		02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	589.113.000
		03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	1.293.500.000
		04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	641.320.000
		05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	600.000.000
		06	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	30.000.000
		07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	79.565.326.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5,00	Unit, m2, Paket	2.899.890.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	3.00	Unit	1.491.570.000
		02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2.00	Unit	1.408.320.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1479-7849-2623-3142

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	260,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	679.411.000
Rincian Output		:	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	260.00	Orang	679.411.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.179.132.000
Rincian Output		:	01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.00	Dokumen	1.033.207.000
		:	02 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	618.425.000
		:	03 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	3.00	Dokumen	527.500.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			11.400.110.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.451.110.000
Rincian Output		:	01 ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10.00	Rekomendasi Kebijakan	6.201.110.000
		:	02 ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.879.000.000
Rincian Output		:	01 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	4.00	Layanan	1.879.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.070.000.000
Rincian Output		:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	720.000.000
		:	02 EBD.965	Layanan Audit Internal	3.00	Dokumen	1.350.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1479-7849-2623-3142

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 4

Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			46.376.912.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
		3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
		4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	8 :	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	21,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	25.991.487.000
Rincian Output	:	01	ABF.001 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		02	ABF.002 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.490.000.000
		03	ABF.003 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.126.280.000
		04	ABF.004 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
		05	ABF.005 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.051.785.000
		06	ABF.007 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	3.479.351.000
		07	ABF.008 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.413.466.000
		08	ABF.009 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3,00	Rekomendasi Kebijakan	2.520.537.000
		09	ABF.011 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.339.520.000
		10	ABF.012 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.230.548.000
		11	ABF.013 Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	900.000.000
		12	ABF.015 Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	2.200.000.000
		13	ABF.016 Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.540.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1479-7849-2623-3142

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	9	:	4197.AEE	Kemitraan	10,00	Kesepakatan	11.054.168.000	
Rincian Output		:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	3.023.720.000
		:	02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.613.000.000
		:	03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	1.417.448.000
		:	04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	4.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	3.378.790.000	
Rincian Output		:	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	NSPK	400.000.000
		:	02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	1.778.790.000
		:	03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	700.000.000
		:	04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	26,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.952.467.000	
Rincian Output		:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	26.00	Dokumen	5.952.467.000

Jakarta, 24 November 2023  
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.  
Mohammad Zainal Fatah  
NIP 196610211996031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2024**



DS:1034-5930-5521-8455

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

**Revisi ke 08**

Tanggal : 30 September 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- Sebesar : Rp. 172.031.802.000 ( SERATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR TIGA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

**Terlampir**

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	172.031.802.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN JAKARTA V (139) Rp. 172.031.802.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024**



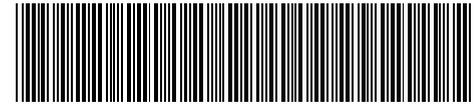
DS:1034-5930-5521-8455

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

---

04	EKONOMI	Rp.	146.941.448.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	146.941.448.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	25.090.354.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	25.090.354.000

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024**

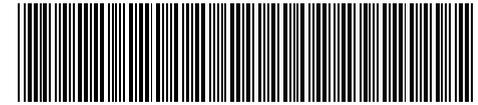


DS:1034-5930-5521-8455

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	25.090.354.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	25.090.354.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	146.941.448.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	90.104.426.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	11.180.110.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	45.656.912.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			25.090.354.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan			25.090.354.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.512.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.00	Rekomendasi Kebijakan	5.512.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.000.000.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.578.354.000
Rincian Output	:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.00	Dokumen	6.578.354.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi	3,00	kegiatan	5.000.000.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	2.00	kegiatan	3.000.000.000
Rincian Output	:	02 PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan (PN)	1.00	kegiatan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	7.000.000.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1.00	layanan	4.500.000.000
Rincian Output	:	02 QAH.002	Fasilitas Mikro Kredit Perumahan (PN)	1.00	layanan	2.500.000.000
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			146.941.448.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



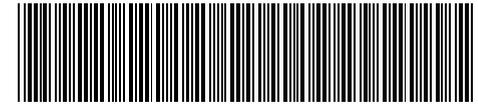
DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			90.104.426.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
		7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
		8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	83.355.705.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	686.734.000
		02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	627.347.000
		03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	1.254.590.000
		04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	591.032.000
		05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	600.000.000
		06	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	30.676.000
		07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	79.565.326.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5,00	Unit, m2, Paket	2.899.890.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	3.00	Unit	1.491.570.000
		02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2.00	Unit	1.408.320.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	422,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.669.699.000
Rincian Output		:	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	422,00	Orang	1.669.699.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.179.132.000
Rincian Output		:	01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4,00	Dokumen	1.033.207.000
		:	02 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,00	Dokumen	618.425.000
		:	03 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	3,00	Dokumen	527.500.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			11.180.110.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.336.110.000
Rincian Output		:	01 ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	Rekomendasi Kebijakan	6.086.110.000
		:	02 ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.824.000.000
Rincian Output		:	01 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	4,00	Layanan	1.824.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.020.000.000
Rincian Output		:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,00	Dokumen	720.000.000
		:	02 EBD.965	Layanan Audit Internal	3,00	Dokumen	1.300.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 4

Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			45.656.912.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
		3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
		4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	8 :	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	21,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	25.768.235.000
Rincian Output	:	01	ABF.001 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		02	ABF.002 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.490.000.000
		03	ABF.003 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.126.280.000
		04	ABF.004 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
		05	ABF.005 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.041.785.000
		06	ABF.007 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	3.479.351.000
		07	ABF.008 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.413.466.000
		08	ABF.009 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3,00	Rekomendasi Kebijakan	2.407.285.000
		09	ABF.011 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.339.520.000
		10	ABF.012 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.230.548.000
		11	ABF.013 Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	900.000.000
		12	ABF.015 Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	2.100.000.000
		13	ABF.016 Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.540.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	9	:	4197.AEE	Kemitraan	10,00	Kesepakatan	10.801.168.000	
Rincian Output		:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.923.720.000
		:	02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.553.000.000
		:	03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	1.374.448.000
		:	04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.950.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	3.188.212.000	
Rincian Output		:	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	NSPK	300.000.000
		:	02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	1.758.790.000
		:	03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	679.422.000
		:	04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	450.000.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	26,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.899.297.000	
Rincian Output		:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	26.00	Dokumen	5.899.297.000

Jakarta, 24 November 2023  
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.  
Mohammad Zainal Fatah  
NIP 196610211996031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2024**



DS:4448-9648-5586-8499

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

**Revisi ke 09**

Tanggal : 16 Oktober 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- Sebesar : Rp. 172.031.802.000 ( SERATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR TIGA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

**Terlampir**

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	172.031.802.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN JAKARTA V (139) Rp. 172.031.802.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024**



DS:4448-9648-5586-8499

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

---

04	EKONOMI	Rp.	146.941.448.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	146.941.448.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	25.090.354.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	25.090.354.000

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024**



DS:4448-9648-5586-8499

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	25.090.354.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	25.090.354.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	146.941.448.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	90.844.706.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	11.180.110.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	44.916.632.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4448-9648-5586-8499

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			25.090.354.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan			25.090.354.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.512.000.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.00	Rekomendasi Kebijakan	5.512.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.000.000.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.578.354.000
Rincian Output	:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.00	Dokumen	6.578.354.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4976.PEA	Koordinasi	3,00	kegiatan	5.000.000.000
Rincian Output	:	01 PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	2.00	kegiatan	3.000.000.000
Rincian Output	:	02 PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan (PN)	1.00	kegiatan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	7.000.000.000
Rincian Output	:	01 QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1.00	layanan	4.500.000.000
Rincian Output	:	02 QAH.002	Fasilitas Mikro Kredit Perumahan (PN)	1.00	layanan	2.500.000.000
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			146.941.448.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4448-9648-5586-8499

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			90.844.706.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
		7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
		8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	83.741.705.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	726.734.000
		02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	685.347.000
		03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	1.359.590.000
		04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	591.032.000
		05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	783.000.000
		06	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	30.676.000
		07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	79.565.326.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6,00	Unit, m2, Paket	3.166.799.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	4.00	Unit	1.794.848.000
		02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2.00	Unit	1.371.951.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4448-9648-5586-8499

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	422,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.669.699.000
Rincian Output		:	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	422,00	Orang	1.669.699.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.266.503.000
Rincian Output		:	01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4,00	Dokumen	1.120.578.000
		:	02 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,00	Dokumen	618.425.000
		:	03 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	3,00	Dokumen	527.500.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			11.180.110.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.336.110.000
Rincian Output		:	01 ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	Rekomendasi Kebijakan	6.086.110.000
		:	02 ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.824.000.000
Rincian Output		:	01 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	4,00	Layanan	1.824.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.020.000.000
Rincian Output		:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,00	Dokumen	720.000.000
		:	02 EBD.965	Layanan Audit Internal	3,00	Dokumen	1.300.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4448-9648-5586-8499

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 4

Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			44.916.632.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
		3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
		4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	8 :	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	21,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	25.343.935.000
Rincian Output	:	01	ABF.001 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		02	ABF.002 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.490.000.000
		03	ABF.003 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,00	Rekomendasi Kebijakan	2.701.980.000
		04	ABF.004 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,00	Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
		05	ABF.005 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.041.785.000
		06	ABF.007 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	3.479.351.000
		07	ABF.008 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.413.466.000
		08	ABF.009 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3,00	Rekomendasi Kebijakan	2.407.285.000
		09	ABF.011 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2,00	Rekomendasi Kebijakan	3.339.520.000
		10	ABF.012 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.230.548.000
		11	ABF.013 Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	900.000.000
		12	ABF.015 Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	2.100.000.000
		13	ABF.016 Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.540.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4448-9648-5586-8499

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	9	:	4197.AEE	Kemitraan	10,00	Kesepakatan	10.801.168.000	
Rincian Output		:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.923.720.000
			02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.553.000.000
			03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	1.374.448.000
			04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.950.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	3.188.212.000	
Rincian Output		:	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	NSPK	300.000.000
			02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	1.758.790.000
			03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	679.422.000
			04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	450.000.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	26,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.583.317.000	
Rincian Output		:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	26.00	Dokumen	5.583.317.000

Jakarta, 24 November 2023  
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.  
Mohammad Zainal Fatah  
NIP 196610211996031001

## LAMPIRAN 4

### Nota Dinas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN  
Jalan Raden Patah 1 Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7264375, (021) 7264375

Nomor : PR 0304-PJ/24  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat  
Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2023

Jakarta, 21 Mei 2024

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur  
Pekerjaan Umum dan Perumahan  
di tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2023 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, berdasarkan laporan tersebut disampaikan hal sebagai berikut:

#### A. Dasar Penugasan

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 10/KPTS/Dp/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024;
2. Surat Tugas Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Nomor: 157/SPT/Pj/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penugasan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

#### B. Tujuan Evaluasi

1. Mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP;
3. Menilai tingkat implementasi AKIP;
4. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
5. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP; dan
6. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### C. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang

memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

#### D. Uraian Hasil Evaluasi

1. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi AKIP, maka implementasi atas AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023 dapat dikategorikan A dalam pengertian bahwa **Memuaskan**, dengan pencapaian nilai **86,00%** dengan rincian per komponen:

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maksimal (%)	Nilai Hasil Evaluasi TA 2023 (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	23,70
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,20
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,50
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>100</b>	<b>86,00</b>

Hasil implementasi AKIP pada tahun anggaran 2023 meningkat sebesar 2,54% apabila dibandingkan dengan hasil implementasi AKIP tahun anggaran 2022, berikut hasil implementasi AKIP tahun 2022:

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maksimal (%)	Nilai Hasil Evaluasi TA 2022 (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,15
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,50
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>100</b>	<b>83,46</b>

2. Tidak tercapainya nilai maksimal dalam implementasi AKIP di lingkungan **Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan** disebabkan masih adanya kelemahan dalam komponen/subkomponen AKIP sebagai berikut:

No	Komponen/Sub-komponen	Permasalahan
1.	<b>Perencanaan Kinerja</b>	
	a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	-
	b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan ( <i>cascading</i> ) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perbedaan Rencana Kurva S Keuangan dan Fisik antara Rencana Aksi dengan Laporan Monev Bulanan dan Laporan Kinerja</li> <li>• Terdapat perbedaan pada Dokumen Perencanaan Kinerja antara Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Setditjen PI dengan Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen PI. Dokumen PK mengacu pada Renstra Eselon I (DJPI) sebagaimana telah dijelaskan pada Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan Nomor 26/ND/Ps.1/2020</li> </ul>
	c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	-
2.	<b>Pengukuran Kinerja</b>	
	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	-
	b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terdapat keterlambatan dalam melakukan <i>upload</i> Laporan Monitoring Kinerja Bulanan dan Laporan Kinerja TA 2023 kedalam Aplikasi E-Sakip</li> <li>• Dalam Laporan Monev Bulanan belum konsisten melampirkan Form Lembar Kendali sebagai bukti keterlibatan Pimpinan dalam penyusunan Laporan Monev Bulanan</li> </ul>
	c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberia <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Tunjangan kinerja TA 2023 belum berdasarkan pengukuran kinerja, masih berdasarkan kehadiran /presensi pada Aplikasi Bravo
3.	<b>Pelaporan Kinerja</b>	
	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	Terjadi keterlambatan Nota Dinas Penyampaian Laporan Kinerja TA 2023 dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

No	Komponen/Sub komponen	Permasalahan
		kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
	b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	Tidak diinformasikan dan diditilkan terkait kronologis dan sebab terjadinya Perubahan Perjanjian Kinerja didalam Laporan Kinerja
	c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	-
<b>4.</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	-
	b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	Evaluasi AKIP telah menggunakan aplikasi/teknologi sistem informasi namun belum ada petunjuk teknis dalam penggunaan e-SAKIP
	c. Implementasi AKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisien Kinerja.	Tindak lanjut atas evaluasi AKIP Tahun 2022 belum dapat ditindak-lanjuti secara maksimal seperti masih terdapat keterlambatan dalam melakukan upload Laporan Monev Bulanan ke Aplikasi E-Sakip

#### E. Rekomendasi

No	Komponen	Rekomendasi
1.	Perencanaan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu dilakukan sinkronisasi pada Dokumen Perencanaan Kinerja seperti didalam Rencana Aksi dengan Laporan Monev Bulanan dan Laporan Kinerja. Apabila terdapat perubahan Rencana diharapkan dapat memberikan keterangan</li> <li>Memastikan keselarasan dokumen perencanaan seperti Renstra, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja</li> </ul>
2.	Pengukuran Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meng-<i>upload</i> Laporan Monitoring Kinerja Bulanan dan Laporan Kinerja TA 2023 kedalam Aplikasi E-Sakip sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018)</li> <li>Pada Laporan Monev Bulanan perlu melampirkan Form Lembar Kendali yang telah ditandatangani pimpinan secara berkala dan konsisten</li> </ul>
3.	Pelaporan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam penyampaian Nota Dinas Laporan Kinerja kepada Jenderal Pembiayaan</li> </ul>

No	Komponen	Rekomendasi
		<p>Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengikuti ketentuan yang berlaku (Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu diinformasikan terkait sebab ataupun alasan terjadinya perubahan Perjanjian Kinerja didalam Laporan Kinerja</li> </ul>
4.	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setditjen PI perlu berkoordinasi dengan Direktorat PSSPP agar dapat melakukan koordinasi dengan Biro PAKLN sebagai koordinator e-SAKIP</li> <li>• Untuk tahun berikutnya agar setiap rekomendasi hasil evaluasi AKIP dapat ditindaklanjuti secara maksimal</li> </ul>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan  
Infrastruktur Jalan dan Jembatan,



**Reni Ahiantini**

NIP. 196910181996032002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.

**LAMPIRAN 5**  
**Dokumentasi Kegiatan**  
**Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja**



## KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021) 7200793

### BERITA ACARA KESEPAKATAN

NOMOR: 01 /BA/Ps/2025

#### **CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TA 2024**

Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2024 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah disepakati Berita Acara Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024 dengan hasil sebagai berikut:

#### **1. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA 2024 Berdasarkan Perjanjian Kinerja**

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024 (%)	Target PK 2024 (Baseline) (%)	Realisasi 2024 (%)	Kinerja Terhadap PK (%)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya				
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR				
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	94,58	99,37	99,96	
Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan)	100	100	100,59	
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	15,00	15,00	14,96	99,73%
IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	15,00	15,00	15,00	100,00%
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	15,00	15,00	15,34	102,27%
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	15,00	15,00	15,43	102,85%
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	15,00	15,00	14,50	96,65%
IKK. Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang Modern, Terpadu dan Berorientasi Publik	15,00	15,00	15,24	101,58%
IKK. Nilai SAKIP Unit Organisasi	10,00	10,00	10,13	101,30%

## 2. Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA 2024

Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu	Realisasi	Keuangan		Fisik		
			(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL	RN	RL	Kinerja
<b>Program Dukungan Manajemen</b>									
<b>Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>			<b>85.844.706</b>	<b>81.996.774</b>	<b>100</b>	<b>95,75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Layanan Dukungan Manajemen Internal	7	Layanan/Laporan /Dokumen	78.741.705	75.051.498	100	95,58	100	100	100
Layanan BMN	1	Layanan/Laporan /Dokumen	726.734	724.590	100	99,71	100	100	100
Layanan Hukum	1	Layanan/Laporan /Dokumen	695.018	692.975	100	99,71	100	100	100
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan/Laporan /Dokumen	1.349.919	1.326.722	100	98,28	100	100	100
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan/Laporan /Dokumen	591.032	589.564	100	99,75	100	100	100
Layanan Umum	1	Layanan/Laporan /Dokumen	783.000	780.652	100	99,70	100	100	100
Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan/Laporan /Dokumen	30.676	29.660	100	96,69	100	100	100
Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan /Dokumen	74.565.326	70.907.336	100	95,39	100	100	100
<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>6</b>	<b>Unit/m2/Paket</b>	<b>3.166.799</b>	<b>3.123.245</b>	<b>100</b>	<b>98,62</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Layanan Sarana Internal	4	Unit/m2/Paket	1.794.848	1.751.298	100	97,57	100	100	100
Layanan Prasarana Internal	2	Unit/m2/Paket	1.371.951	1.371.948	100	100	100	100	100
<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>	<b>422</b>	<b>Orang/Layanan</b>	<b>1.669.699</b>	<b>1.666.301</b>	<b>100</b>	<b>99,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Layanan Manajemen SDM	422	Orang/Layanan	1.669.699	1.666.301	100	99,80	100	100	100
Layanan Manajemen Kinerja Internal	10	Layanan/Laporan /Dokumen	2.266.503	2.155.730	100	95,11	100	100	100

Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu	Realisasi	Keuangan		Fisik		
			(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL	RN	RL	Kinerja
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4	Layanan/Laporan /Dokumen	1.120.578	1.120.425	100	99,99	100	100	100
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	Layanan/Laporan /Dokumen	618.425	618.177	100	99,96	100	100	100
Layanan Manajemen Keuangan	3	Layanan/Laporan /Dokumen	527.500	417.128	100	79,08	100	100	100

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Januari 2025

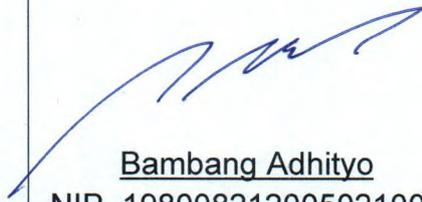
Yang Menyepakati,

Kepala Bagian Perencanaan,  
Program dan Keuangan



Desy Nina Wulandari  
NIP. 197712092005022001

Kepala Bagian  
Kepegawaian dan Umum



Bambang Adhityo  
NIP. 198008212005021002

Kepala Bagian Hukum dan  
Komunikasi Publik



Anggoro Widyastika  
NIP. 198001222009121001

Mengetahui,

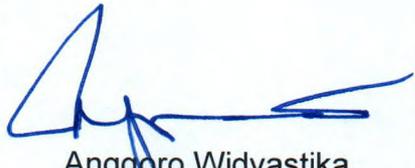
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan  
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Reni Ahiantini  
NIP. 196910181996032002

Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu	Realisasi	Keuangan		Fisik		
			(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL	RN	RL	Kinerja
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4	Layanan/Laporan /Dokumen	1.120.578	1.120.425	100	99,99	100	100	100
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	Layanan/Laporan /Dokumen	618.425	618.177	100	99,96	100	100	100
Layanan Manajemen Keuangan	3	Layanan/Laporan /Dokumen	527.500	417.128	100	79,08	100	100	100

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Januari 2025		
Yang Menyepakati,		
Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan   <u>Desy Nina Wulandari</u> NIP. 197712092005022001	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum   <u>Bambang Adhityo</u> NIP. 198008212005021002	Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik   <u>Anggoro Widyastika</u> NIP. 198001222009121001
Mengetahui,		
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan    <u>Reni Ahiantini</u> NIP. 196910181996032002		

**LAMPIRAN 6**  
**Dokumentasi Kegiatan**

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
1	<p>Rapat Pembahasan Kegiatan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) TA 2024 pada tanggal 5 Januari 2024 di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 DJPI.</p> <p>Hasil Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan Format TOR dan RAB Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) TA 2024;</li> <li>- Akan dilakukan rapat tindak lanjut pemenuhan anggaran SMAP.</li> </ul>	
2	<p>Rapat Persiapan Konsinyasi Pelaksanaan Anggaran TA 2024 pada tanggal 9 Januari 2024 di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 DJPI.</p> <p>Hasil Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan kegiatan konsinyasi pelaksanaan anggaran TA 2024 di lingkungan DJPI;</li> <li>- Akan dilakukan kegiatan konsinyasi pelaksanaan anggaran TA di lingkungan DJPI pada tanggal 18-19 Januari 2024.</li> </ul>	
3	<p>Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan II BA.999.07 Semester II TA.2023 pada tanggal 11 s.d. 12 Januari 2024 di Royal Padjajaran Hotel.</p> <p>Hasil Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas terkait kekurangan bayar SBUM dan SBK yang terjadi pada 2023;</li> <li>- Permasalahan yg timbul seperti belum diberlakukannya sistem TNP pada Rekening Bank Pelaksana;</li> <li>- Penjumlahan utang subsidi pada neraca LK Semester II 2023.</li> </ul>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
4	<p>Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan BA.033.16 Semester II TA.2023 Unaudited pada tanggal 15 s.d. 16 Januari 2024 di Ruang Rapat Balai Teknologi Air Minum.</p> <p>Hasil Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Utang Kepada Pihak Ketiga pada Neraca per 31 Desember 2023 senilai Rp26.235.500,00 sedang dilakukan koordinasi dengan KPPN Jakarta V atas permasalahan tersebut;</li> <li>- Sampai saat ini satker PI masih melakukan proses data atas Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya terkait Konsultan Individual Expert dan TPI;</li> <li>- Untuk SPM ATR akan dilakukan Penambahan Faktur Barang yg isinya secara singkat pekerjaan Renovasi yg akan dilakukan serah terima ke Biro Umum;</li> <li>- Mengumpulkan Dokumen pendukung Renovasi salah satunya SPM dan Foto sesudah dan Sebelum Renovasi,</li> </ul>	
5	<p>Rapat Konsinyasi Pelaksanaan Anggaran TA 2024 pada tanggal 18 s.d. 19 Januari 2024 di Ruang Rapat Lantai 9 DJPI.</p> <p>Hasil Rapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis anggaran setiap Unit Eselon II;</li> <li>- Masih terdapat RAB dan TOR Paket Kegiatan yg belum sesuai;</li> <li>- Akan dilakukan perhitungan potensi sisa anggaran pada TA 2024.</li> </ul>	
6	<p>Rapat Finalisasi Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semester II TA. 2023 pada tanggal 22 Januari 2024 di Ruang Rapat 1 lantai 2 wing 3 DJPI.</p> <p>Hasil Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk usulan RKBMN Tahun 2024 Bagian Kepegawaian dan Umum hanya mengusulkan perubahan pengadaan sewa KDJ menjadi pembelian KLBB;</li> <li>- Selanjutnya akan mengajukan sesuai dengan usulan Bagian Kepegawaian dan Umum untuk diajukan ke Biro BMN dan Tim APIP Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.</li> </ul>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
7	<p>Rapat Koordinasi IKPA Indikator Deviasi Hal III DIPA dan Capaian Output serta Pencantuman Target PDN dan Impor TA 2024 pada tanggal 30 s.d. 31 Januari 2024 di Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.</p> <p>Hasil Rapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan IKPA Indikator deviasi Hal III DIPA dan capaian Output;</li> <li>- Pencantuman target PDN dan Impor TA 2024.</li> </ul>	
8	<p>Undangan Rapat Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 pada tanggal 15 Januari 2024/ RR Lantai 9.</p> <p>Hasil Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Total kebutuhan ASN DJPI adalah 490 pegawai, status pegawai per 31 Desember 2023 adalah 269 termasuk proyeksi penambahan PPPK formasi 2023</li> <li>- Usulan pengadaan ASN DJPI Tahun 2024 adalah 129 Formasi</li> </ul>	
9	<p>Verifikasi dan Validasi Usul Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 16 Januari 2024/ Zoom Meeting</p> <p>Hasil Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemprov DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan JF Analis Pembiayaan Infrastruktur sebanyak 13 kebutuhan formasi yang terdiri dari 2 JF Ahli Madya, 3 JF Ahli Muda dan 8 G77JF Ahli Madya</li> <li>- Usulan tersebut disetujui oleh DJPI sebagai Instansi Pembina</li> <li>- DJPI telah menerbitkan surat rekomendasi kebutuhan formasi sebanyak 13 formasi</li> </ul>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
10	<p>Reviu Dokumen Anjab dan ABK Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tanggal 23 s.d. 24 Januari 2024 di Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Permukiman, Bandung.</p> <p>Hasil Rapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah disusun seluruh analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan kebutuhan jabatan di masing-masing unit kerja DJPI</li> </ul>	
11	<p>Pendampingan dan Penelitian Perubahan Usulan RKBMN Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan TA. 2024 pada tanggal 5 s.d. 6 Februari 2024 di Ruang Rapat Sekunder, Balai Penelitian dan Pengembangan Irigasi.</p> <p>Hasil Rapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pengadaan sewa 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan menjadi pengadaan melalui pembelian kendaraan dinas jabatan berbasis baterai. Atas perubahan tersebut agar dilakukan konsolidasi dan dilakukan penyusunan dokumen revisi RKBMN TA. 2024 sesuai arahan dari Biro PBMN dan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR;</li> <li>- Terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional berupa Toyota Innova, yang telah dilakukan alih status penggunaan pada Tahun 2023 dan sudah diserahkan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR agar segera dilakukan revisi RKAKL</li> </ul>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
12	<p>Wawancara Dirjen dengan Majalah Trust pada tanggal 16 Februari 2024 di Gedung DJPI lantai 2.</p> <p>Hasil Rapat: Wawancara mengenai Rencana Strategis dalam memperkuat Pembiayaan Infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan Pembangunan Nasional di Tahun 2024. Hasil dari berita tersebut akan ditayangkan pada Majalah Trust edisi di bulan Maret 2024</p>	
13	<p>Sosialisasi Penggunaan KKP, Bela Pengadaan dan Digipay serta Sosialisasi PP No. 28 Tahun 2023 pada tanggal 19 s.d. 20 Februari 2024 di Balai Teknik Irigasi</p> <p>Hasil Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Katalog elektronik dan toko daring merupakan platform belanja pemerintah, dimana eksekusi atas pilihan produk yang akan di belanjakan (di purchase) merupakan kewenangan masing-masin PPK/PP yang tersebar di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;</li> <li>- Digipay Satu adalah Platform belanja online pemerintah, kehadirannya melengkapi Gap yang tidak di fasilitasi <i>marketplace</i> populer</li> </ul>	
14	<p>Sosialisasi dan Pendampingan Pengisian SPT PPh 21 Tahun 2023 (e-Filing) pada tanggal 22 Februari 2024 di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 DJPI</p> <p>Hasil Rapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan Pengisian SPT PPh 21 Tahun 2023 (e-Filing);</li> <li>- Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan TER berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/Pj/2024 akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.</li> </ul>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
15	<p>Pembahasan Penyusunan Rencana Aksi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 23 Februari 2024 di Ruang Rapat 2 Lantai 2 Wing 3.</p> <p>Hasil Rapat:            Jumlah IKK Sekdijen pada TA. 2024 berdasarkan Renstra DJPI dan DIPA awal sebanyak 6 IKK (Perjanjian Kinerja Setdijen TA 2024) dengan target capaian di akhir sebesar 100%;</p>	 <p>Feb 23, 2024 2:34:19 PM            Selong            Kebayoran Baru            South Jakarta City            Jakarta</p>
16	<p>Rapat peningkatan dalam pembentukan produk hukum bidang pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan pada tanggal 23 Februari 2024 di balai Pengembangan Bapekom Wilayah 4</p> <p>Hasil Rapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendetailan bisa dilakukan baik dalam bentuk SE dan peraturan lainnya asalkan masih sesuai dengan kewenangan tidak dilebihkan dan tidak dikurangi, dan jika sudah sesuai dengan pasal tertulis maka tidak perlu didetailkan lagi;</li> <li>- Terkait proses KPBU, jika alur perencanaan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka akan diteruskan ke Bappenas setelah itu akan didiskusikan lagi dengan k/l terkait, apabila sudah mendapatkan kesepakatan bersama dan sudah tercantum di Bappenas, selanjutnya akan dilimpahkan ke PJPK;</li> </ul>	
17	<p>Rapat Koordinasi Persiapan Pengolahan Arsip Terjaga di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tanggal 27 Februari 2024 di Ruang Rapat 1, Lantai 2 Wing 3, DJPI.</p> <p>Hasil Rapat :</p> <p>Rapat diadakan dalam rangka persiapan Pengolahan Arsip Terjaga di Lingkungan DJPI, sesuai dengan Surat dari Kepala Biro Umum, tanggal 13 Februari 2024, Nomor: UM0202-Su/139, Hal: Penyusunan Salinan Autentik dan Daftar Arsip Terjaga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024.</p>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
18	<p>Konfirmasi Progress Tindak Lanjut Pemeriksa pada Satker Ditjen (Subsidi SBK dan SBUM) pada tanggal 26 Februari 2024 Ruang Rapat Lantai 9 DJPI.</p> <p>Hasil Rapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan dibuatkan Surat penyampaian penghentian subsidi terhadap 353 debitur tidak memadai per Januari 2024;</li> <li>- Akan dibuatkan surat penagihan akses CMS kepada Bank Kalsel Syariah, Kalbar Syariah, dan Sumut Syariah paling lambat sampai tanggal 13 Maret 2024.</li> </ul>	
19	<p>Koordinasi Identifikasi Awal Risiko UPR T1 TA.2024 pada tanggal 26-28 Februari 2024 di Ruang Rapat Setditjen PI lantai 2 wing 1.</p> <p>Hasil Rapat :</p> <p>Terdapat satu pernyataan risiko yang diusulkan untuk diangkat ke tingkat kementerian yaitu “timeline proyek KPBU tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.” Untuk mendukung sasaran strategis kementerian PUPR-5 “Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya.”</p>	
20	<p>Monitoring Tindak Lanjut LHA 032 pada tanggal 29 Februari 2024 di Ruang Rapat Setditjen PI lantai 2 wing 1.</p> <p>Hasil Rapat:</p> <p>Akan dilakukan pemantauan progress tindak lanjut kembali pada 8 Maret 2024.</p>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
21	<p>Menerima dan mendokumentasikan kunjungan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 1 Maret 2024 di Ruang Rapat 2 lantai 2 wing 3.</p> <p>Hasil Rapat: Konsultasi ini dilakukan untuk mencari bahan dan data perbandingan yang akan diterapkan di Daerah Kabupaten Lampung Timur</p>	
22	<p>Pelaksanaan Penganangan Pembangunan Zona Integritas pada 5 Maret 2024 di Atrium Lantai 2 Gedung A, DJPI.</p> <p>Hasil Rapat: Tindak lanjut berupa Penyusunan rencana aksi pembangunan Zona Integritas</p>	
23	<p>Sosialisasi PMK 119 th 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Tanggal 6 Maret 2024 RR. lantai 9 Gedung A2 DJPI</p> <p>Hasil Rapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para Pejabat PPK akan melakukan pembahasan internal terkait rencana kerjasama dengan PT. Blue Bird Group;</li> <li>- Akan diagendakan pembahasan fitur Corporate dan peluang kerjasama dengan Traveloka</li> </ul>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
24	<p>Pembahasan Rencana Revisi DIPA Tahap I di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; Tanggal 6 Maret 2024 RR Setditjen PI Lantai 2 Wing 1. Hasil Rapat: Akan dilakukan Revisi DIPA Tahap I TA 2024 pada tanggal 20 Maret 2024.</p>	
25	<p>Rapat Internalisasi Penyusunan KAK, KAB RO dan Paket Kegiatan TA. 2025 di Lingkungan DJPI Tanggal 7 Maret 2024 RR. lantai 9 Gedung A2 DJPI. Hasil Rapat: KAK RAB RO dan Paket tersebut sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.</p>	 <p>Mar 7, 2024 10:10:43 No 2 Jalan Raden Patah Selong Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p>
26	<p>Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Percepatan Progres Pengelolaan Kawasan Wisma Werdhapura; Tanggal 8 Maret 2024 Ruang Rapat Setditjen PI Lantai 2 Wing 1, Gedung DJPI. Hasil Rapat: - EL Hotel diharapkan akan menyampaikan proposal usulan pada awal April 2024 dengan target tender lelang Badan Usaha Pelaksana pada KSP Kawasan Wisma Werdhapura pada September 2024 telah selesai dilakukan;</p>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
27	<p>Fogging Nyamuk DBD dan penyemprotan Anti Rayap Gedung A1 dan A2 Kementerian PUPR Ditjen. Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.</p> <p>Tanggal 9 Maret 2024. Hasil : Diharapkan dapat mencegah penyakit demam berdarah</p>	
28	<p>Peliputan dan dokumentasi acara pelantikan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera di Auditorium Kementerian PUPR.</p> <p>Tanggal 13 Maret 2024</p>	
29	<p>Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas DJPI</p> <p>Tanggal 14 Maret 2024 RR. Setditjen Lantai 2 Wing 1 Hasil Rapat: Terkait sewa kendaraan besarnya akan dikordinasikan kembali dengan Biro Keuangan Kementerian PUPR</p>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
30	<p>Penyusunan Profil Risiko UPR T1 TA.2024</p> <p>Tanggal 14 Maret 2024 di RR. 1 lantai 2 wing 3 DJPI.</p> <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan dilakukan pembahasan mengenai pendetailan profil risiko UPR T1 dengan Tim Manajemen Risiko di Lingkungan DJPI;</li> <li>- Akan dilakukan pembahasan finalisasi profil risiko setelah dihasilkan konsep profil risikopendetailan di poin 1</li> </ul>	
31	<p>Penyusunan Rencana Kerja Zona Integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</p> <p>Tanggal 14 Maret 2024 Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta.</p> <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan disusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas pada masing-masing unit kerja;</li> <li>- Layanan yang diusulkan dalam pembangunan Zona Integritas diharapkan masing- masing unit kerja membantuk agen perubahan beserta inovasinya.</li> </ul>	
32	<p>Pematangan Profil Risiko UPR T2 Setditjen TA.2024</p> <p>Tanggal 18 s.d. 19 Maret 2024 RR Setditjen PI lantai 2 wing 1.</p> <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan dilakukan pembahasan kembali mengenai konsep profil risiko dari Bagian Kepegawaian dan Umum;</li> <li>- Akan dilakukan pembahasan dan penetapan profil risiko oleh pemilik risiko UPR T2 Setditjen PI.</li> </ul>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
33	<p>Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (AP) Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan</p> <p>Tanggal 27 Maret 2024 Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta.</p> <p>Hasil : Menetapkan dan mendokumentasikan SOP AP yang telah disusun dan dibahas bersama dengan setiap Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</p>	
34	<p>Pemutakhiran Data e-HRM pada</p> <p>Tanggal 08 April 2024 Ruang Rapat 2 lantai 2 wing 3 DJPI.</p> <p>Hasil : Dilakukan upload data ke e-HRM masing-masing pegawai Dilakukan juga upload data ke online drive yang telah disediakan serta dilakukan pengisian form microsoft excel terkait PAK dan Pelatihan.</p>	
35	<p>Rapat Pematangan Profil Risiko UPR T1 2024</p> <p>Tanggal 21 April 2024 RR Setditjen PI lantai 2 wing 1.</p> <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu dilakukan koordinasi lanjutan dengan Direktorat PPP serta satker subsidi mengenai penambahan klausul monitoring berkala pada PKS serta usulan inovasi pengendalian berupa lapor diri;</li> <li>- Perlu dilakukan koordinasi dengan Direktorat PSSPP mengenai kriteria penetapan quick win serta mekanisme permintaan daftar proyek dari unit kerja;</li> <li>- Perlu dilakukan pembahasan dengan pengelola dan pemilik risiko UPR T1 untuk dapat menetapkan profil risiko UPR T1 DJPI TA.2024.</li> </ul>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
36	<p>Rapat Koordinasi Subsidi Temuan 2023</p> <p>Tanggal 22 April 2024 RR Setditjen PI lantai 2 wing 1.</p> <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan ditindak lanjut menggunakan Surat Keterangan KPA yang menjelaskan bahwa evaluasi kelayakan penerima subsidi tidak dapat dilakukan;</li> <li>- Akan disampaikan Surat Penghentian Subsidi dari KPA melalui Bank Pelaksana terhadap 9 debitur pada 4 yang tidak menghuni berdasarkan hasil kunjungan lapangan pada 4 Provinsi yaitu Aceh, Kepulauan Riau, Banjarmasin dan Bali.</li> </ul>	
37	<p>Rapat Pembahasan <i>Cost of Fund</i> atas Biaya Retensi Dana Talangan FLPP Tahun 2019, Tanggal: 1 Mei 2024, RR. Setditjen Lantai 2 Wing 1.</p> <p><b>Hasil:</b> Pihak BTN telah memaparkan rekap kertas kerja excel terkait dengan data clustering sebagai progress tindak lanjut arahan Inspektorat Jenderal, namun terdapat ketidaksesuaian terhadap clustering yang dimaksud, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) format excel antara BTN konvensional dengan BTN syariah masih terdapat perbedaan,</li> <li>b) belum terdapat KC pada rekapitulasi clustering pada BTN syariah, dan</li> <li>c) terdapat perbedaan jumlah debitur pada rekap excel yang diajukan.</li> </ul>	
38	<p>Peliputan dan dokumentasi kegiatan Seminar PT SMF</p> <p>Tanggal 26 Mei 2024 di Glass House Ritz Carlton</p>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
39	<p>Peliputan dan dokumentasi kegiatan <i>Community of Practice INFINITY Gathering &amp; Buka Puasa Bersama PT PII</i></p> <p>Tanggal 26 Mei 2024 Hotel Kempinski.</p> <p>Hasil: Diharapkan acara ini sebagai salah satu inovasi yang berbasis multi-engagement stakeholder untuk mendorong pembelajaran dan memobilisasi tacit knowledge guna mencapai tujuan pembagunan infrastruktur yang berkelanjutan.</p>	
40	<p>Kick off Meeting dengan KIAT untuk membahas terkait Pengurangan Emisi <i>Green House Gas (GHG)</i> dalam bidang infrastruktur</p> <p>Tanggal 28 Mei 2024 Ruang Rapat DJPI lantai 2 wing 2.</p>	
41	<p>Rapat Pembahasan SOP perusahaan Jalan Tol</p> <p>Tanggal 28 Mei 2024 Sukamahi, Jawa Barat.</p> <p>Hasil : Disepakati SOP ditetapkan dalam bentuk Kepmen PUPR dan akan meminta sirkuler persetujuan antara DJPI, Bina Marga dan BPJT.</p>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
42	<p>29 Mei 2024</p> <p>Monitoring Tindak Lanjut LHA di Ruang Rapat Setditjen PI Lantai 2 Wing 1</p> <p>Hasil : Tindak lanjut yaitu apabila sudah terdapat data-data tambahan serta data dukung pencairan, maka Bank BTN perlu mengidentifikasi debitur apakah memang terjadi keterlambatan, sehingga akan menyesuaikan angka perhitungan denda keterlambatan.</p>	
43	<p><b>Senin, 3 Juni 2024</b></p> <p>Rapat Pembahasan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Setditjen PI TA. 2023 di Ruang Rapat lantai 9 Gedung DJPI</p> <p>Tindak lanjut: Setditjen PI akan berusaha sebaik mungkin dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari pihak evaluator.</p>	 <p>Network: 3 Jun 2024 at 2:56:50 PM GMT+7  Local: 3 Jun 2024 at 2:56:50 PM GMT+7  South Jakarta  Indonesia  Ruang Rapat Prambanun Kementerian ATR/ULH</p>
44	<p><b>Senin, 3 Juni 2024</b></p> <p>Rapat Telaahan Tunjangan Kinerja Pegawai Bulan Mei 2024 di Ruang Rapat Setditjen PI lantai 2 wing 1 Gedung DJPI</p> <p>Hasil : Seluruh data-data pendukung agar segera di unggah pada tautan <a href="https://bit.ly/DATATUKIN-DJPI-2024">https://bit.ly/DATATUKIN-DJPI-2024</a> Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan paling lambat tgl 10 Juni 2024</p>	 <p>GPS Map Camera  Kecamatan Kebayoran Baru, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia  Jl. Raden Patah No 2, RT2/09K1, Setong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12113, Indonesia  Lat: -6.238532°  Long: 106.806436°  03/06/24 10:27 AM GMT +7:00</p>

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
45	<p><b>Selasa, 4 Juni 2024</b></p> <p>Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Tim Sekretariat Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Kementerian PUPR di Ruang Rapat Setditjen PI lantai 2 wing 1 Gedung DJPI</p> <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Sekretariat Pelaksana akan Menyusun Rencana Kerja Simpul KPBU sampai dengan Desember 2024 dilengkapi dengan Rencana Kebutuhan Anggaran;</li> <li>- Konsep Rencana Kerja Simpul KPBU diharapkan dapat selesai pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024;</li> <li>- Tim Sekretariat Pelaksana akan menyelenggarakan pertemuan rutin setiap 2 minggu dengan pertemuan berikut akan diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2024.</li> </ul>	
46	<p><b>Rabu, 5 Juni 2024</b></p> <p>Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI periode Mei 2024 di Ruang Rapat Setditjen PI lantai 2 wing 1 Gedung DJPI</p> <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diharapkan Unit Kerja dan Setditjen yang melakukan Revisi DIPA dan mengakibatkan adanya penambahan atau pengurangan RO dapat berkoordinasi dengan Bagian PPK untuk pembaharuan data Capaian Output yang perlu dilakukan assesment ulang;</li> <li>- Perlu mengkawal penagihan Termin Kontraktual agar sesuai dengan jadwal RPD yang telah disusun;</li> <li>- Untuk kegiatan kontraktual yang akan proses lelang ulang setelah putus kontrak perlu mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan serta menyusun strategi pelaksanaan dengan keterbatasan waktu.</li> </ul>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
47	<p><b>Rabu, 5 Juni 2024</b>            Peliputan dan dokumentasi kegiatan Media <i>Briefing</i> Tabungan Perumahan Rakyat di Lobby BP Tapera</p>	
48	<p><b>Kamis, 6 Juni 2024</b>            Peliputan dan dokumentasi kegiatan Rapat Kerja Menteri PUPR dengan Komisi VDPR RI di Komisi V gedung DPR MPR RI Senayan</p>	
49	<p><b>Kamis, 6 Juni 2024</b>            Peliputan dan dokumentasi kegiatan Bersama fraksi PAN dengan tema: Tapera; Solusi atau Masalah di Ruang Rapat Fraksi PAN DPR RI Nusantara 1 Lantai 20</p>	



No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
53	<p><b>Rabu, 19 Juni 2024</b>            Internalisasi Peraturan Bidang Kepegawaian di Ruang Rapat Lantai 9 gedung DJPI.            Hasil :            Diperlukan aturan lebih lanjut berupa Surat Edaran Direktur Jenderal sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>	
54	<p><b>Rabu, 19 Juni 2024</b>            Memposting info “hal-hal yang perlu dicek oleh calon konsumen sebelum memutuskan membeli rumah” di Instagram DJPI.</p>	
55	<p><b>Jum'at, 21 Juni 2024</b>            Memposting ucapan selamat bertugas kepada Dirjen PI yang baru.</p>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
56	<p><b>Kamis, 27 Juni 2024</b>  Rapat Pembahasan Capaian Fisik Lanjutan di Ruang Rapat Gedung A2 Lantai 6  Hasil :  - Perlu pembahasan lebih lanjut dengan seluruh unit kerja terkait sistem pengisian realisasi fisik secara rutin;</p>	 <p>Network: 27 Jun 2024 at 9:43:02 AM GMT+7  Jalan Sisingamangaraja, South Jakarta</p>
57	<p><b>Jum'at, 28 Juni 2024</b>  Rapat Pembahasan Perubahan Rencana Strategi Setditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan di Ruang Rapat Setditjen PI lantai 2 wing 1 DJPI.  Hasil :  Akan ada pembahasan lanjutan terkait perubahan Resntra Setditjen PI.</p>	 <p>Network: 28 Jun 2024 at 2:16:50 PM GMT+7  Jalan Sisingamangaraja, South Jakarta</p>
58	<p><b>Jum'at, 28 Juni 2024</b>  FGD Pengembangan Dashboard Penanganan Pengaduan Masyarakat DJPI di Gedung Arsip Kementerian PUPR Kintaka.</p>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
59	<p><b>Jum'at, 28 Juni 2024</b>  Peliputan dan dokumentasi pada acara Pisah Sambut Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan di Ruang Rapat lantai 9 Gedung DJPI.</p>	
60	<p><b>Tanggal 1 s.d. 2 Juli 2024</b>  Workshop Penyusunan Proses Bisnis Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat Lantai 9, Gedung A1, DJPI  Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyesuaikan kembali Draf Peta Proses, Peta Sub Proses dan Judul Peta Lintas Fungsi sesuai dengan hasil pembahasan/ kesepakatan rapat;</li> <li>- Berkoordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan terkait kesesuaian Draf Proses Bisnis DJPI dengan Revisi Renstra DJPI 2020-2024;</li> <li>- Menggambarkan bagan/ alur Peta Lintas Fungsi (PLF) sesuai dengan judul PLF yang telah disepakati.</li> </ul>	
61	<p><b>Tanggal 2 s.d. 3 Juli 2024</b>  Monitoring Anggaran dan Sosialisasi pembahasan Capaian Output dan Capaian Fisik Kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat Setditjen PI lantai 2 wing 1  Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu diperhatikan untuk Unit Kerja yang memiliki paket kegiatan dengan deviasi cukup tinggi;</li> <li>- Pengisian capaian output diharapkan dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati yaitu maksimal 3 (tiga) hari kerja setiap awal bulan;</li> </ul>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
62	<p><b>Tanggal 3 Juli 2024</b>  Identifikasi transaksi keuangan semester I TA.2024 pada Satuan Kerja Pembiayaan Infrastuktur PU dan Perumahan (BA.033.16) di Ruang Rapat Satker PI</p> <p>Hasil :  Akan dilakukan konfirmasi ke pengelola data dan informasi Direktorat PSSPP terkait <i>updating</i> penggunaan aplikasi.</p>	
63	<p><b>Tanggal 4 Juli 2024</b>  Rapat Pembahasan Pelaksanaan Lembur Pegawai di Lingkungan DJPI di Ruang Rapat Setditjen PI Lantai 2 Wing 1 DJPI</p> <p>Hasil :  Setiap Pegawai diminta untuk membuat output lembur yang jelas, serta melengkapi data lembur seperti absensi dan foto kegiatan riil.</p>	
64	<p><b>Tanggal 4 Juli 2024</b>  Rapat Evaluasi dan pembahasan Podcast DJPI di Ruang Rapat DJPI lantai 2 wing 2.</p> <p>Hasil :  Akan dilakukan persiapan materi untuk podcast yang akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan Juli 2024.</p>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
65	<p><b>Tanggal 4 s.d. 11 Juli 2024</b>  Pelatihan dan Bimbingan dalam rangka Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Bapekom Pasar Jumat Jakarta</p> <p>Hasil :  Para Pegawai Non ASN dengan NRP diharapkan mempunyai bekal secara materi untuk menghadapi tes Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024.</p>	
66	<p><b>Tanggal 5 Juli 2024</b>  Rapat Pembahasan Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Bulan Juni 2024 di Ruang Rapat Setditjen PI lantai 2 wing 1</p> <p>Hasil :  Tindak lanjut dari isu dan permasalahan yang dihadapi selama Bulan Juni</p>	 <p>Network: 5 Jul 2024 at 2.55.27. PM GMT+7  Jalan Sisingamangaraja No. 2  South Jakarta</p>
67	<p><b>Tanggal 8 Juli 2024</b>  Peliputan dan dokumentasi Market Sounding (Penjajakan Pasar) Proyek Revitalisasi Rusun Pasar Jumat Dalam Kawasan Berorientasi Transit (TOD) Lebak Bulus di Jakarta</p>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
68	<p><b>Tanggal 9 s.d. 12 Juli 2024</b>            Penyusunan dan Reviu Atas Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tingkat Esselon I pada BA 033 dan Laporan Keuangan BA.999 Semester I TA. 2024 di Balai Jasa Konstryksi Wilayah III, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Jl. Pahlawan Sanja, Citereup, Bogor, Jawa Barat            Hasil :            Akan dilakukan konsultasi ke KPPN.</p>	
69	<p><b>Tanggal 15 Juli 2024</b>            Rapat Tindak Lanjut Permohonan Masukan terkait Isu-isu strategis, Usulan Kebijakan dan Strategi serta Kerangka Regulasi dalam rangka Penyiapan RENSTRA DJPI TA 2025-2029 di Ruang Rapat Setditjen Lantai 2 Wing 1, DJPI            Hasil :            Masukan dari masing-masing Unit Kerja adalah sebagai Bahan untuk Penyiapan Penyusunan RENSTRA DJPI TA 2025-2029.</p>	
70	<p><b>Tanggal 17 s.d. 18 Juli 2024</b>            FGD Peningkatan Pelayanan Kehumasan di Balai Jasa Konstruksi Wilayah III, Bogor.            Hasil :            Tim BHKP akan berkoordinasi lebih lanjut dengan unit kerja DJPI untuk dapat menindaklanjuti hasil diskusi</p>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
71	<p><b>Tanggal 18 Juli 2024</b>  <i>Coaching Clinic</i> PMK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Lantai 9 DJPI</p> <p>Hasil :            PMK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai acuan untuk Penyusunan Rencana Anggaran pada Tahun 2025 dimana PMK tersebut adalah sebagai standar batas atas untuk honorarium maupun biaya yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan</p>	
72	<p><b>Tanggal 24 s.d. 25 Juli 2024</b>            Monitoring dan Evaluasi SOP AP Setditjen PI di Ruang Sekunder, Balai Penelitian dan Pengembangan Irigasi, Kota Bekasi, Jawa Barat</p> <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun laporan hasil monev SOP;</li> <li>- Memperbaiki SOP berdasarkan hasil monev.</li> </ul>	
73	<p><b>Tanggal 26 Juli 2024</b>            Rapat Koordinasi Penerapan Manajemen Risiko UPR T1 DJPI Triwulan II TA. 2024 di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3 Gedung DJPI</p> <p>Hasil :            Akan dilakukan koordinasi dengan Direktorat PSSPP mengenai data capaian kinerja dan progres KPBU</p>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
74	<p><b>Tanggal 6 Agustus 2024</b> Rapat Pembahasan Perhitungan Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Bulan Juli 2024 dengan menyesuaikan Revisi Renstra periode 2020-2024 di Ruang Rapat Setditjen PI, Lantai 2 Wing 2</p> <p>Hasil : Setiap bagian di lingkungan Setditjen PI diharapkan dapat konsisten mengirimkan perhitungan capaian bulanan beserta permasalahan dan tindak lanjutnya kepada tim PE Setditjen PI setiap awal bulan berikutnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan koordinasi dengan pimpinan yang baru terkait komunikasi publik.</li> </ul>	 <p>Network:6 Aug 2024 at 2:36:20, PM GMT+7 Jalan Raden Patah No. 2 South Jakarta</p>
75	<p><b>Tanggal 8 Agustus 2024</b> Rapat Pembahasan Capaian Indikator Penyerapan Anggaran Nilai IKPA Bulan Juli DJPI di Ruang Rapat Setditjen PI Lantai 2 Wing 2</p> <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit kerja tidak diperkenankan untuk melakukan pengajuan UP tanpa melalui PPK dan tidak diperkenankan pembayaran UP untuk honorarium narasumber</li> <li>- Diharapkan seluruh unit kerja untuk menyusun rencana pada tahun 2025 dimana sudah terdapat realisasi di awal tahun</li> </ul>	 <p>8 Agu 2024 09:49:56 No. 2 Jalan Sisjngamangaraja Serong Kecamatan Kebayoran Baru KOTA ADM. JAKARTA SELATAN Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p>
76	<p><b>Tanggal 8 Agustus 2024</b> Dokumentasi kegiatan Lomba Kekompakan Tim dalam rangka memperingati hut RI yang ke 79 di Kampus Kementerian PUPR</p>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
77	<p><b>Tanggal 13 Agustus 2024</b>  Rapat Koordinasi Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di BBWS Cimanuk Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat  Hasil :  Perlu menjadi perhatian jika terdapat Revisi DIPA yang mempengaruhi adanya perubahan pada RO/Volume output diharapkan dapat disampaikan pada Bagian PPK maupun Kesatkeran sebelum waktu pengisian capaian output (setiap awal bulan)</p>	 <p>Aug 13/2024 9:27:40 AM  No.40 Jalan Pemuda Raya  Sunyaragi  Kecamatan Kesambi  Kota Cirebon  Jawa Barat</p>
78	<p><b>Tanggal 13 Agustus 2024</b>  Dokumentasi Lomba Band DJPI di Gedung Auditorium PUPR</p>	
79	<p><b>Tanggal 14 Agustus 2024</b>  Pembahasan Lanjutan Revisi SE Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 06/SE/Dp/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di BBWS Cimanuk Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat  Hasil :  Finalisasi SE 06/SE/Dp/2024 akan disusun oleh Bagian Hukum dan Komunikasi Publik dibantu oleh Bagian Perencanaan Program dan Keuangan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses sirkuler ke masing-masing Unit</p>	 <p>Kecamatan Kesambi, Jawa Barat, Indonesia  Jl. Pemuda Raya No.42, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132, Indonesia  Lat -6.730202°  Long 108.541652°  14/08/24 01:49 PM GMT +07:00</p>

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
80	<p><b>Tanggal 15 s.d. 16 Agustus 2024</b></p> <p>Penyusunan SKP di Lingkungan DJPI di Balai Teknik Jalan dan Jembatan Bandung</p> <p>Hasil : Menunggu penilaian SKP dari pimpinan/atasan masing-masing Unit Kerja di DJPI.</p>	
81	<p><b>Tanggal 16 Agustus 2024</b></p> <p>Podcast NGOPI di Ruang Tunggu Dirjen PI lantai 2 wing 2, Gedung DJPI</p>	
82	<p><b>Tanggal 21 Agustus 2024</b></p> <p><i>Focus Group Discussion (FGD) Studi Tantangan Implementasi Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Gedung Widya Graha, BRIN</i></p> <p>Hasil : Diharapkan BRIN dapat membantu menjelaskan bahwa tugas Tapera yang utama adalah memberikan akses fasilitasi pembiayaan perumahan bukan memberikan rumah</p>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
83	<p><b>Tanggal 21 Agustus 2024</b></p> <p>Peliputan dan dokumentasi acara Property Point di Stasiun Tv CNBC</p>	
84	<p><b>Tanggal 27 Agustus 2024</b></p> <p>Rapat Pembahasan Cascading Kinerja Renstra Setditjen PI 2024-2029 di Ruang Rapat Setditjen PI lantai 2 wing 1, Gedung DJPI</p> <p>Hasil : Akan dilakukan pembahasan lanjutan terkait Draft Renstra DJPI 2025-2029.</p>	
85	<p><b>Tanggal 28 Agustus 2024</b></p> <p>Penyusunan Progres Rencana Aksi Agen Perubahan di Ruang Rapat 1 lantai 2 wing 3, Gedung DJPI</p> <p>Hasil : Agen Perubahan nantinya akan mempresentasikan hasil inovasi dalam kegiatan pelaksanaan monitoring pembangunan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</p>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
86	<p><b>Tanggal 3 September 2024</b></p> <p>Peliputan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta</p>	
87	<p><b>Tanggal 2 September 2024</b></p> <p>Pendampingan Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2026 di Ruang Rapat Setditjen Lantai 2 Wing 1, Gedung DJPI</p> <p>Hasil : Tim RKBMN DJPI akan menindaklanjuti kekurangan dokumen yang telah disampaikan oleh Biro BMN pada Minggu ke-2 September 2024, akan diadakan zoom meeting pada Selasa tanggal 3 September 2024 untuk membahas usulan RKBMN Tingkat Eselon I</p>	
88	<p><b>Tanggal 6 September 2024</b></p> <p>Rapat Progres Penyusunan Tools Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran KPBU di Ruang Rapat Setditjen Lantai 2 Wing 1, Gedung DJPI</p> <p>Hasil : Direncanakan akan dilakukan rapat pembahasan lanjutan pada minggu ke-3 September 2024</p>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
89	<p><b>Tanggal 11 September 2024</b></p> <p>Peliputan dan dokumentasi pada kegiatan Serah Terima Jabatan Eselon II yang baru dilantik di Ruang Rapat Dirjen lantai 2 wing 2, Gedung DJPI</p>	
90	<p><b>Tanggal 18 September 2024</b></p> <p>Peliputan dan dokumentasi pada kegiatan Workshop Pengembangan Alternatif Pembiayaan Dalam Mendukung Penurunan <i>NonRevenue Water (NRW)</i> di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta</p>	
91	<p><b>Tanggal 18 s.d. 20 September 2024</b></p> <p>Pameran INDOWATER 2024 di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta</p>	

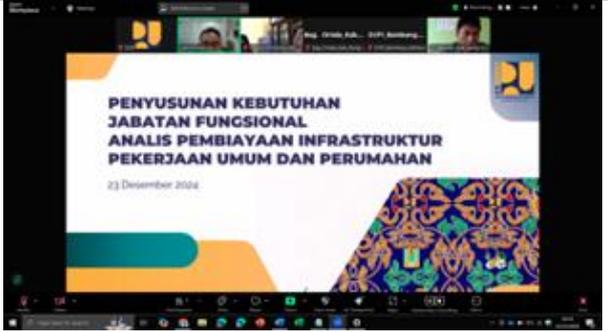
No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
92	<p><b>Tanggal 18 September 2024</b></p> <p>Rapat Update Aplikasi Tunjangan Kinerja dan Sosialisasi Tukin Web Terintegrasi SAKTI di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Wing 3, Gedung DJPI</p>	
93	<p><b>Tanggal 19 s.d. 20 September 2024</b></p> <p>Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat Kawasan Hotel Bendungan Sukamahi Cibogo, Cipayung, Bogor</p>	 <p>Kecamatan Megamendung, Jawa Barat, Indonesia    Jl. Cikopo Sd. No. Km 3, Gadag, Kac. Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16770, Indonesia    Lat: -6.67087°    Long: 106.879806°    19/09/24 09:23 AM GMT +07:00</p>
94	<p><b>Tanggal 26 September 2024</b></p> <p>Rapat Pembahasan Rakepmen Mandat Pendelegasian kewenangan Menteri PUPR selaku PJKK untuk Proyek KPBU Pembangunan dan Pengelolaan Estuary DAM di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM di Ruang Rapat Lantai 9 Gedung DJPI.</p>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
95	<p><b>Tanggal 2 Oktober 2024</b></p> <p>Rapat Pembahasan Capaian Kinerja Setditjen PI Bulan September 2024 di Ruang Rapat Setditjen PI lantai 2 wing 1 Gedung DJPI</p>	 <p>Network: 2 Oct 2024 at 9:49:17 AM GMT+7 Jalan Sisingamangaraja No. 2 South Jakarta</p>
96	<p><b>Tanggal 7 s.d. 8 Oktober 2024</b></p> <p>Rapat Pembahasan Progres Realisasi Anggaran Triwulan III DJPI dan Strategi Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV di Gedung Arsip Kintaka, Bogor, Jawa Barat.</p> <p>Hasil : Unit Kerja dan Setditjen sudah memperbaharui RPD (rencana penarikan dana) untuk Triwulan IV</p>	 <p>Network: 7 Oct 2024 at 10:09:53 AM GMT+7 Jalan Raya Sirkuit Sentul Bogor</p>
97	<p><b>Tanggal 7 s.d. 8 Oktober 2024</b></p> <p>Identifikasi Transaksi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tingkat Eselon I pada BA.033 dan Laporan Keuangan BA.999 Triwulan III TA.2024 di Balai Jasa Konstruksi Wilayah III PUPR, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR.</p>	 <p>Oct 8, 2024 2:18:01 PM Jalan Pahlawan Sanja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat Altitude: 137.0m Speed: 0.0km/h</p>

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
98	<p><b>Tanggal 8 Oktober 2024</b></p> <p>Peliputan dan dokumentasi pada acara Serah Terima Jabatan Administrator di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Di Ruang Rapat Lantai 9 Gedung DJPI.</p>	
99	<p><b>Tanggal 9 s.d. 10 Oktober 2024</b></p> <p>Monitoring Pembangunan Zona Integrasi di Lingkungan Seketariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Kantor Balai Jasa Kontruksi Wilayah III Jakarta, di Citereup Bogor, Jawa Barat</p>	
100	<p><b>Tanggal 29 Oktober 2024</b></p> <p>Rapat Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penilaian Satuan Kerja Terbaik Bidang Pengelolaan BMN Kementerian PUPR Tahun 2024 di Ruang Rapat Setditjen, Lantai 2 Wing 1, Gedung DJPI.</p>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
101	<p><b>Tanggal 29 s.d. 30 Oktober 2024</b></p> <p>Pemindahan Aset Barang Milik Negara (BMN) BP Tapera di Gudang Cipete.</p>	
102	<p><b>Tanggal 6 November 2024</b></p> <p>Peliputan dan dokumentasi pada acara Konsultasi Publik untuk rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pulau Lombok di Mataram.</p>	
103	<p><b>Tanggal 11 November 2023</b></p> <p>Rapat Pembahasan Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung A2 DJPI.</p>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
104	<p><b>Tanggal 4 Desember 2024</b></p> <p>Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang di Ruang Rapat 2 Lantai 2 DJPI.</p> <p>Hasil : Melakukan penyesuaian terhadap proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun ke depan di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.</p>	
105	<p><b>Tanggal 10 Desember 2024</b></p> <p>Koordinasi Pengecekan Aset BMN di Lingkungan DJPI di Ruang Rapat 2, Lantai 2 Wing 3.</p> <p>Hasil : Akan dilakukan Pengecekan fisik langsung oleh Bagian Kepegawaian dan Umum DJPI, Tim BMN DJPI dengan Biro PBMN dan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum</p>	
106	<p><b>Tanggal 19 Desember 2024</b></p> <p>FGD Pembahasan Digitalisasi Monitoring dan Evaluasi Penganggaran Penyiapan KPBU di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ruang Rapat Lantai 9 Gedung DJPI.</p>	

No	Pelaksanaan Kegiatan	Foto Dokumentasi
107	<p><b>Tanggal 20 Desember 2024</b></p> <p>Rapat Pembahasan Capaian Kinerja dan Draft Laporan Kinerja Setditjen Pi Tahun 2024 di Ruang Rapat Setditjen PI lantai 2 wing 1 Gedung DJPI.</p> <p>Hasil : Diharapkan seluruh data capaian dan bukti dukung dapat disampaikan selambatnya Jumat, 27 Desember 2024.</p>	
108	<p><b>Tanggal 23 Desember 2024</b></p> <p>Rapat verifikasi dan validasi kebutuhan JF Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui zoom meeting.</p>	
109	<p><b>Tanggal 29 Desember 2024</b></p> <p>Memposting Kuis Mingguan di Sosial Media DJPI.</p>	



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

